

SALIM HAJI SAID

mizan



GESTAPU 65

PKI, AIDIT,
SUKARNO,
DAN SOEHARTO

GESTAPU 65

**PKI, AIDIT,
SUKARNO,
DAN SOEHARTO**

MIZAN PUSTAKA: KRONIK ZAMAN BARU adalah salah satu lini produk (*product line*) Penerbit Mizan yang menyajikan buku-buku bertema umum dan luas yang merekam informasi dan pemikiran mutakhir serta penting bagi masyarakat Indonesia.

GESTAPU 65

PKI, AIDIT,
SUKARNO,
DAN SOEHARTO

SALIM HAJI SAID

mizan

KRONIK ZAMAN BARU

GESTAPU 65:
PKI, AIDIT, SUKARNO, DAN SOEHARTO
© copyright Salim Haji Said, 2015
Penyunting: Andityas Prabantoro
Proofreader: Ine Ufiyatiputri
Digitalisasi: Ibn' Maxum
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved
Oktober 2015
Diterbitkan oleh
Penerbit Mizan
PT Mizan Pustaka
Anggota IKAPI
Jln. Cinambo no. 135 (Cisaranten Wetan),
Ujungberung, Bandung 40294
Telp. (022) 7834310 – Faks. (022) 7834311
e-mail: kronik@mizan.com
<http://www.mizan.com>
facebook: Penerbit Mizan
twitter: @penerbitmizan
Desainer sampul: Andreas Kusumahadi
ISBN 978-979-433-905-3

E-book ini didistribusikan oleh
Mizan Digital Publishing
Jln. Jagakarsa raya no. 40,
Jakarta Selatan 12620
Telp. +6221-78864547 (Hunting); Faks. +62-21-788-64272
website: www.mizan.com
e-mail: mizandigitalpublishing@mizan.com
twitter: @mizandotcom
facebook: mizan digital publishing

ISI BUKU

Pengantar Penulis

Kata Pengantar

Gestapu, PKI, Aidit, Sukarno, dan Soeharto

Pramoedya Membabat

“Kau sudah dicekoki Nasution”

Membunuh Sukarno dengan Sukarnoisme

Pater Beek, Pastor Jesuit

Dari Biro Dokumentasi ke CSIS

Ibu Pertiwi Hamil Tua

Menjadi Kiri untuk Cari Selamat

“Manfaatkan Perintah Pangti!”

Pembaca al-Quran yang Fasih

Cornell Paper

Nasihat Ikut Jalan Mao

Angkatan Darat versus PKI

Terus Dikejar Ketakutan

Bayangan Madiun 1948

Sukarno, Soeharto, dan Tradisi Daulat

Megawati, Bayi Perempuan Sukarno

Daulat, Bukan Pembantaian

Tego Larane Ora Tego Patine

Angkatan Udara dan Gestapu

Mengganyang Film-Film Amerika

Hanya Mengikuti Jejak Syam

Suslov dan Agen-Agen Asing

Sering Diteriaki agen CIA

Komisaris Politik

Postscriptum: Sukarno, Soeharto, dan Pertarungan Politik

Pasca-Gestapu

Tentang

Penulis

PENGANTAR PENULIS

Tulisan tentang Gestapu ini pada mulanya terbit pada 2013 sebagai bagian dari buku saya yang berjudul *Dari Gestapu ke Reformasi*. Sejumlah teman kemudian mendesak agar bab mengenai Gestapu dalam buku itu bisa diterbitkan tersendiri. Tahun ini, 2015, merupakan tahun peringatan ke-50 kegagalan Gestapu dan percobaan kaum Komunis menguasai Indonesia. dengan alasan ikut memperingati kegagalan Komunis itu—sembari mengenang korban-korban yang tewas, terpenjara, atau terbuang sebagai akibat aksi kaum Komunis tersebut—saya akhirnya setuju menerbitkan bab tentang Gestapu ini menjadi sebuah buku tersendiri.

Tulisan ini telah mengalami perbaikan, tambahan, dan elaborasi di sana-sini. dibanding dengan versi aslinya yang sudah terbit dua tahun silam, buku ini lebih membuka kesempatan kepada pembaca untuk lebih mendapatkan informasi mengenai apa sebenarnya yang terjadi menjelang, selama, dan sesudah Gestapu sebagai yang disaksikan oleh seorang reporter junior dan aktivis mahasiswa usia muda masa itu.

Harus saya akui—untuk kesekian kalinya—berbagai misteri di sekitar Gestapu, prolog, dan epilognya hingga kini masih tetap saja menanti untuk diungkapkan lewat penelitian yang lebih saksama. Buku ini tidak berpretensi

sanggup dan telah mengungkapkan berbagai misteri tersebut. dalam membaca buku ini, secara langsung maupun tidak, misteri-misteri yang memerlukan pengungkapan itu saya catat. Saya berharap ada peneliti di kemudian hari yang lebih mampu mengungkap misteri-misteri tersebut.

Salim Haji Said

Jakarta, 1 Mei 2015

KATA PENGANTAR

Apaakah yang bisa dianggap sebagai realitas itu hanyalah sesuatu yang bersifat kekinian belaka? Mungkin juga begitulah hal yang sesungguhnya. Bukankah sesuatu yang bersifat kekinian itu adalah yang terlihat, terdengar, dan bahkan sangat mungkin dirasakan pula? dalam alur pemikiran yang berdimensi datar dan tunggal ini masa lalu dan bahkan juga masa depan hanya riil dalam dunia khayal. Bukankah seketika masa lalu telah dirasakan sebagai sesuatu yang riil ada—entah terwujud sebagai ingatan akan sesuatu atau tentang suatu rangkaian kejadian, entah pula cita-cita atau impian yang sempat terkhayalkan dan entah sebagai apa saja—maka di waktu itu pula hal itu telah terlepas dari aktualitas kekinian? Bahkan, mungkin lebih daripada itu. Seketika hal-hal dari masa lalu itu telah dirasakan sebagai sesuatu yang riil pernah ada dan mungkin masih berlanjut, maka di waktu itu pula kedatangan masa depan telah dirasakan sebagai yang tidak terelakkan. Pada saat hal-hal seperti ini sempat direnungkan, terasalah betapa ketiga dimensi waktu itu mempunyai fungsi yang berarti dalam realitas dinamika kehidupan. Karena itu bisalah dipahami pula kalau rasa hayat kekinian itu biasa sekali dijadikan sebagai kelanjutan dari usaha pemenuhan

hasrat yang sempat terimpikan sejak masa lalu. Masa kini pun dirasakan dan bahkan dipergunakan sebagai persiapan dan anjang-ancang untuk memasuki suasana dan corak masa depan yang telah direncanakan dan bahkan diimpikan. Tetapi sudahlah, bukankah semuanya ini adalah hal yang lumrah belaka? Bukankah setiap orang bisa saja mempunyai kesadaran akan masa lalu, masa kini, dan masa depan yang berbeda-beda? setiap orang bisa mengenang masa lalunya, berkhayal tentang masa depannya dan merasakan dan bahkan mungkin sekali menikmati kekinianya. Jadi, bisa terasa juga kearifan yang terpancar dari sebuah petuah asing—*“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift, that’s why it is called the present”*. hanya saja pemahaman akan realitas kekinian itu barulah mempunyai arti kalau semuanya telah diletakkan dalam konteks pemikiran yang berdimensi waktu. Seketika makna dari dinamika perjalanan waktu telah disadari, maka di waktu itu pula rasa hayat kesendirian telah pula semakin terikat dengan dinamika kehidupan kemasyarakatan.

Dalam konteks suasana dan alam pemikiran yang telah bersifat kemasyarakatan inilah, kejadian dan peristiwa yang pernah atau bahkan yang *konon* pernah dialami menjadi berarti pula dalam kehidupan. Karena itu, bisalah dipahami juga kalau hal-hal yang “serba-konon” bukan saja terlalu biasa mewujudkan dirinya dalam tradisi lisan—sesuatu yang sebenarnya boleh dikatakan *mirage of reality*, bayangan kenyataan, kata seorang ahli—tetapi tidak pula jarang tampil sebagai mitologi, yang konon bisa

berfungsi sebagai *conscience collective*, sebagaimana seorang pentolan keilmuan yang lain pernah men-teorikannya.

Dunia dan masyarakat modern pun tidak pula membiarkan peristiwa yang berkesan itu berlalu begitu saja. Peristiwa yang terjadi itu tidak hanya diingat malah teramat biasa dicatat untuk kemudian—bila diperlukan—dijadikan sebagai sumber ketika apa yang telah terjadi itu hendak dikisahkan. dalam kesempatan ini bukan saja peristiwanya direkonstruksi—ketika “apa, siapa, bila, dan di mana” diberitahukan—bahkan semua kemungkinan tentang struktur dan dinamika “bagaimana dan mengapa” diungkapkan pula. Ketika hal ini telah dilakukan, maka berarti struktur dan corak dinamika kejadiannya telah pula mengalami proses peng-analisis-an. Karena itu, bisalah pula dipahami kalau hasil rekonstruksi kritis tidak jarang mendatangkan perdebatan. Bukankah semua hal ini dilakukan setelah pertanyaan pokok telah diajukan dan alur berpikir dipergunakan? Bukankah pula corak dan bentuk pertanyaan pokok sangat pula bergantung pada jawaban yang sedang dicari? Maka, meskipun tidak selamanya perdebatan atas hasil rekonstruksi yang kritis itu bisa terelakkan, tetapi seketika hal-hal yang bersifat kritis ini telah dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kejujuran orang pun bisa berkata bahwa sebuah karya sejarah akademis telah selesai ditulis.

Manusia modern biasa sekali mengingat-ingat dan bahkan tidak pula jarang mencatat peristiwa yang dirasakan dan dianggap penting dalam perjalanan

kehidupannya. Bukankah tanggal kelahiran, pernikahan, dan bahkan penerimaan ijazah tertinggi biasa sekali diingat-ingat, andaikan malas atau enggan untuk merayakannya? tetapi, bagaimanapun juga merayakan ataupun hanya sekadar mengingat atau bahkan mungkin kebetulan teringat saja adalah kesempatan sesaat ketika fase-fase dalam perjalanan hidup terenungkan juga. Karena itu, bisalah dipahami juga kalau hal-hal yang ingin dilupakan kadangkadang datang begitu saja untuk bermain dalam ingatan atau bahkan mungkin mengganggu rasa ketenangan. Tetapi, bagi suatu kesatuan masyarakat atau suatu ikatan sosial—entah masyarakat-bangsa, entah penduduk suatu provinsi, atau bahkan mungkin organisasi kemasyarakatan yang dengan sengaja diciptakan, merayakan hari-hari yang dianggap penting itu adalah suatu cara dalam usaha peneguhan keutuhan ikatan.

Karena itu, bisalah dianggap sebagai kewajaran yang biasa saja jika suatu masyarakat, yang telah mewujudkan dirinya sebagai negara-bangsa, tidak pernah alpa merayakan hari-hari yang telah dinyatakan sebagai “hari Nasional”. Ketika “hari kemerdekaan” dirayakan bukan saja peristiwa yang telah berlalu itu ingin dikenang dan bahkan bukan pula sekadar makna peristiwa itu bagi hari kini dan masa depan ingin diteguhkan, tetapi tidak pula jarang hal itu dilakukan pada saat visi kebangsaan yang baru hendak dirumuskan. dalam suasana peringatan hari kebangsaan ini berbagai atraksi yang menggairahkan kehidupan masyarakat biasa pula dipertunjukkan. Semoga

dengan berbagai corak upacara ini masyarakat-bangsa semakin menyadari makna kemerdekaan dan arti pengorbanan para pahlawan. Karena itulah, tidak jarang peringatan “hari kemerdekaan” itu didampingi oleh upacara peringatan hari-hari lain yang telah dikumandangkan sebagai bagian dinamika dari proses ke arah semakin terwujudnya tatanan masyarakat-bangsa yang diidamidamkan.

Semoga dengan penambahan nilai historis dari peristiwa ini, keutuhan bangsa semakin teguh saja dan biarkanlah para sejarahwan tersenyum-senyum melihat betapa sebuah peristiwa sejarah yang “biasa saja” telah dijadikan sebagai alat tambahan pemersatu bangsa. Kalau dipelajari dengan semangat kritisakademis yang wajar memang harus diakui juga bahwa ada peristiwa yang nilai historisnya barulah dirasakan setelah berbagai corak riak gelombang dalam arus perjalanan sejarah telah dilalui. Memperingati hari-hari yang secara historis dan bahkan—tidak pula jarang—simbolis penting dan bermakna adalah bagian dari usaha peneguhan *nation building*—suatu usaha yang harus dilakukan tanpa henti.

Kalau diingat-ingat maka terasalah juga bahwa *nation formation* dan *nation building* bukan saja dua tema utama dalam sejarah politik, tetapi sesungguhnya bisa pula dilihat sebagai sebuah bentuk periodisasi sejarah bangsa ketika zaman modern telah dimasuki. Tema *pertama*—*nation formation*—bukan saja sebuah proses, tetapi bisa juga dilihat sebagai sebuah periode ketika berbagai unsur historis dan sosial-kultural sedang berada dalam alur

sejarah yang mempersatukan berbagai ikatan-ikatan sosial-kultural primordial dan pada saat segala corak kesatuan politik sedang digerakkan ke arah terwujudnya sebuah negarabangsa. Sedangkan tema *kedua*—*nation building*—adalah dinamika kesejarahan ketika berbagai corak dinamika sosialpolitik, beragam orientasi kultural dan ideologi bukan saja terlibat dalam usaha untuk mempertahankan eksistensinya, tetapi bergolak untuk mencapai idealisme yang telah diimpikan. dalam suasana inilah, negara-bangsa harus bergumul untuk mendapatkan “jawab” (*response*, kata toynbee) yang tepat dalam menghadapi berbagai ragam “tantangan” yang datang menghadang.

Kalau saja dunia sastra boleh dipakai sebagai analogi, maka tidaklah terlalu berlebih-lebihan kalau dikatakan bahwa *nation formation* adalah periode romantik dalam sejarah bangsa. Inilah saatnya ketika keindahan alam dinyanyikan sebagai milik bersama dan keberanian melawan segala corak penistaan dari luar didendangkan sebagai pancaran dari tradisi kepahlawanan bangsa. dalam suasana inilah, segala bentuk keragaman dan corak hambatan dan bahkan ancaman yang menghadang direlatifkan menjadi milik dan pengalaman sesama anak bangsa. dalam suasana romantik inilah, negara-bangsa yang diidam-idamkan akhirnya terwujud juga. Tetapi, seandainya perbandingan yang memakai ukuran berat-ringan ingin dipakai, maka barangkali tidaklah salah kalau dikatakan bahwa ujian yang datang pada saat proses *nation building* sedang dikayuh itu biasa sekali dirasakan

sebagai sebuah tusukan tajam. Seketika hal itu telah terjadi, maka abadi tertanam dalam struktur ingatan kolektif bangsa. usaha pelupaan yang dilakukan dengan berbagai cara bahkan tidak jarang hanya menghasilkan penebalan ingatan akan ujian yang pernah dialami itu. Jadi, bisalah dipahami juga kalau perbedaan sikap di antara anak bangsa dalam menentukan pilihan tentang peristiwa mana yang semestinya diingat dan mana pula yang sebaiknya dilupakan tidak selamanya bisa terhindarkan. Bahkan, dalam perjalanan waktu tidak pula jarang terjadi perbedaan penilaian semakin menebal saja. Kalau telah begini mestikah diherankan jika pemahaman akan konteks dan suasana sosial-politik dan bahkan ideologis seperti dibiarkan saja sebagai hal-hal yang terlepas dari aktualitas peristiwa sejarah yang ingin dikenang?

Pemberontakan *Darul Islam* di Jawa Barat bermula pada saat agresi Kedua (1948) yang dilancarkan tentara Belanda telah berhasil menduduki sebagian besar wilayah Republik Indonesia dan bahkan ketika beberapa pemimpin bangsa yang paling terkemuka telah pula jatuh ke dalam perangkap tawanan musuh. Tetapi dalam perjalanan waktu, wilayah pemberontakan ini malah semakin meluas bahkan setelah kemerdekaan bangsa mendapatkan pengakuan internasional. dalam proses selanjutnya seakan-akan dengan begitu saja sekian banyak para pejuang bersenjata menjadikan tanah kelahiran mereka—sulawesi selatan, Kalimantan selatan, dan akhirnya Aceh—sebagai bagian dari negara-bangsa yang menyebut dirinya negara *darul Islam*. Mereka telah bersama-sama

mengingkari keabsahan negarabangsa, Republik Indonesia, yang pernah mereka perjuangkan. Kegembiraan menyambut masa depan terasa semakin agak meredup juga karena di waktu itu pula *Republik Maluku Selatan* memperkenalkan kehadirannya. Para anak bangsa yang sempat berdiri di belakang kekuasaan Belanda ketika Revolusi Nasional sedang bergolak, seakan-akan ingin mempertahankan kediriannya, yaitu terlepas dari Republik Indonesia, sebuah negara-bangsa yang pernah juga sempat mereka lihat sebagai lawan.

Sepuluh tahun pertama dari kehadirannya sebagai negara berdaulat Republik Indonesia adalah sebuah negara-bangsa demokratis yang penuh idealisme. Semua wilayah yang pernah merasa diri sebagai “negara bagian”, yang tercipta atas bentukan atau dukungan politik *divide et empera*, dalam waktu yang teramat singkat kembali ke pangkuan negara kesatuan. Betapapun “jatuh-bangun kabinet” terasakan juga sebagai corak irama dari dinamika politik yang sesungguhnya tidak pernah diinginkan, tetapi optimisme akan masa depan negara yang demokratis tetap enggan untuk menipis. dalam suasana inilah, pemilihan umum—suatu perwujudan keharusan sebuah negara demokratis yang sampai kini masih diingat sebagai peristiwa politik yang paling bersih dan sopan—diadakan. Tetapi, seketika ketimpangan antara keresahan daerah dan hasil pemilihan umum tak terhindarkan, maka berbagai ujian politik pun harus dihadapi. Bagaimanakah menyelesaikan keresahan daerah yang mempunyai jumlah wakil di parlemen diselesaikan ketika para pemenang

berasal dari wilayah yang merasa cukup puas dengan situasi politik kontemporer? Maka, suatu malapetaka politik pun terjadi. Pada saat keresahan daerah telah dirumuskan sebagai tantangan atas keabsahan kekuasaan pusat, maka krisis politik pun semakin memprihatinkan. Seketika tantangan yang masih bersifat verbal itu telah dikumandangkan (Februari, 1958) dengan pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), maka penyerbuan militer yang masif pun dilancarkan. dalam waktu yang teramat singkat sumatra tengah dan sulawesi utara pun bisa merasakan apa artinya dan bagaimana rasanya diperlakukan oleh sebuah negara-bangsa yang telah sedang memulai proses ke arah perubahan landasan konstitusional dari kekuasaannya.

Tidak berapa lama kemudian Presiden Sukarno, yang telah membentuk kabinet tanpa memercayakannya kepada seorang formatir kabinet sebagaimana diharuskan oleh uud (sementara) 1950, menyatakan Indonesia “kembali ke uud 1945” (Juli, 1959). Maka, dinamika baru dalam perpolitikan dan ideologi pun mulai memperlihatkan dirinya. dewan Konstituante, yang sedang merancang uud yang baru, dibubarkan. Bertolak dari argumen ideologis bahwa sistem parlementer yang masih dipakai, sebagaimana yang ditentukan oleh uud (sementara) 1950, adalah sistem liberal, yang berlandaskan pada prinsip “50% tambah satu”, Republik Indonesia pun dibawa “kembali ke kepribadian Nasional”. Republik Indonesia kini telah memasuki periode “demokrasi terpimpin”, sebuah sistem yang dikatakan sebagai pantulan dari “kepribadian

bangsa”.

“Kembali ke uud 1945” bukan saja berarti Presiden telah berfungsi sebagai Kepala negara dan Kepala Pemerintahan, landasan ideologis dari dinamika kehidupan kenegaraan pun mengalami perubahan pula. Kedudukan Pancasila, yang sempat diperdebatkan MPR hasil pemilihan umum, kini telah dipastikan sebagai landasan sakti negara dan bangsa. dalam konteks perubahan landasan kenegaraan inilah Manipol-usdeK (*Manifesto Politik* yang berlandaskan uud 45, Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Nasional), yang bersumber dari pidato-pidato Sukarno, dijadikan sebagai pegangan dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Tan-pa diminta MPr-sementara—dengan anggota yang diangkat Presiden—menabalkan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup. Meskipun dia menerima kedudukan ini, tetapi, katanya, dia lebih merasa terhormat dengan peranannya sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan Penyambung Lidah rakyat—dua kedudukan ideologis yang diciptakannya. Tetapi bagaimanapun juga, kedudukan formal kenegaraan dan peranan ideologis telah terkumpul dalam diri sang Presiden. Maka, bisa jugalah dipahami kalau dalam semangat pengingkaran segala hal yang sempat dianggap sebagai warisan liberalisme yang tidak sesuai dengan “kepribadian bangsa”, pembagian kekuasaan yang diharuskan oleh konstitusi diingkari saja. dalam alam pikiran nonkonstitusional inilah para ketua dan wakil ketua dPr-Gotong royong, MPr-sementara, dan bahkan juga Ketua

Mahkamah agung dijadikan sebagai anggota Kabinet Presidensial. Sementara itu Sukarno, sang Presiden, menempatkan dirinya sebagai Ketua dewan Pertimbangan agung—sebuah lembaga konstitusional yang bertugas memberi nasihat “diminta atau tidak diminta” kepada Presiden. Jadi, bisalah pula dipahami kalau dalam konstelasi struktur dan pemikiran tentang sistem kekuasaan ini, pemikiran akan otonomi pemerintah daerah hanyalah suatu impian kosong belaka. Kini, sentralisme telah menjadi landasan sistem administrasi pemerintahan dari sebuah negara yang mengatakan dirinya sedang berada dalam Revolusi yang tanpa henti.

Dalam suasana perubahan struktural dan konstitusional yang fundamental ini, Presiden Sukarno membubarkan Partai Masyumi, partai pilihan “kaum modernis Islam” yang tampil sebagai partai kedua terbesar dalam Pemilihan umum, meskipun mendapat suara terbanyak di semua provinsi di luar Pulau Jawa, dan PSI (Partai Sosialis Indonesia), yang konon hanya menarik bagi kaum terpelajar. Kedua partai ini dibubarkan karena beberapa tokoh penting mereka dituduh terlibat dalam Peristiwa PRRI. dalam suasana penyingkiran politik inilah pula, dua pilar ideologi dari demokrasi terpimpin diperkenalkan. *Pertama*, Indonesia adalah negara yang bertolak dari “trisakti” (berdaulat, berkepribadian Nasional, dan berdikari), yang didukung oleh semangat dan kerja sama Nasakom (Nasionalisme, agama, komunisme). Tetapi, *kedua*, di atas segala-galanya Indonesia adalah negara-bangsa yang sedang berada

dalam suasana Revolusi—ketika “menghancurkan, membangun, *retooling*”, merupakan irama kehidupan sosial-politik yang tidak terhindarkan. dalam suasana yang dikatakan sebagai “*a summary of many revolutions in one generation*” ini anak bangsa bisa saja terdiri dari golongan “Revolusioner” dan “anti-Revolusioner” seperti halnya dengan negara-negara dunia terdiri dari *New Emerging Forces* (NEFO) dan *Old Established Forces*. Kedua corak kekuatan ini adalah *thesis* dan *anti-thesis* yang tidak akan pernah bisa menemukan *sinthesis*. Meskipun tidak dikatakan secara eksplisit, tetapi tampak juga bahwa “konflik” telah dipakai sebagai landasan dalam perilaku politik. Maka kritik Hatta, yang telah berhenti sebagai Wakil Presiden (Desember, 1958), yang disampaikannya pada saat gerak ke arah semakin terwujudnya sistem diktatorial, bukan dibiarkan saja berlalu, melainkan malah diberangus. Bukankah Hatta sempat juga mengatakan suasana serba-Revolusi yang diperkenalkan Bung Karno, hanya membayangkan *Umwertung Aller Werte*, “penjungkirbalikan semua nilai”, sebagaimana pernah dikatakan seorang filosof Jerman?

Dalam sistem sosial-politik Nasional dan interNasional yang telah terbagi atas dua golongan yang saling bertentangan ini, Presiden Sukarno pun semakin cenderung memakaikan sistem wacana yang bernada hiperbol, yang serba-keras dan serbamembesar. dengan pemakaian gaya hiperbol ini, maka marah tidaklah terdengar sebagai marah, tetapi sangat marah dan demikian pulalah sebaliknya—simpati bukanlah sekadar

simpati, tetapi sangat simpati. dalam situasi politik yang semakin mengeras ini dan didampingi pula oleh pemikiran yang diwarnai

situasi serba-konflik ini anak bangsa pun semakin berkenalan

dengan istilah-istilah asing dan Jawa-ngoko. Bung Karno, sang Pemimpin Besar Revolusi semakin membuktikan dirinya sebagai tokoh yang sangat imajinatif dalam melancarkan serangan ideologis ataupun politiknya kepada kekuatan yang dinilai antiRevolusi.

Gaya hiperbol memang mengasyikkan dan bahkan menggairahkan, tetapi gaya ini teramat mudah mengaburkan maksud dari pemikiran yang hendak dikatakan, karena gaya yang serbamembesar ini telah dengan begitu saja merelatifkan realitas yang sesungguhnya. Tetapi bagaimanapun juga dalam suasana yang serba-hiperbol inilah negara menjalankan program indoktrinasi yang bersifat Nasional. Mula-mula keharusan indoktrinasi ini hanya ditujukan kepada kalangan pelajar dan mahasiswa serta pegawai negeri, tetapi kemudian menyebar ke kalangan buruh dan kaum profesional lain. dengan perluasan sistem indoktrinasi ini, maka negara bukan saja semakin menampilkan diri sebagai pemegang hegemoni wacana—hanya makna yang dikatakan sang pemegang kekuasaan tentang kata dan konsep yang dipakai bisa dianggap benar dan sah—tetapi juga sebagai penentu ingatan kolektif bangsa—manakah peristiwa yang seharusnya diingat dan dipelajari dan mana pula yang sebaiknya dilupakan atau bahkan dinista. Kata akhir

tentang arti yang sesungguhnya dari suatu peristiwa serta pemahaman yang semestinya tentang hal ini atau hal itu berada di tangan sang pemegang hegemoni wacana, yaitu Pemimpin Besar Revolusi.

Tetapi dalam suasana ini pulalah, persahabatan dengan negara-negara asia-afrika—suatu usaha yang telah dirintis sejak Konferensi asia-afrika (1955)—dan negara non-blok semakin digalakkan. dalam suasana ketika dunia sedang dihantui oleh suasana konflik dan pertentangan antara “blok Barat” dan “blok timur”, Bung Karno semakin menampilkan diri sebagai salah seorang pemimpin negara non-Blok yang paling populer. dalam suasana ini pulalah, semangat perjuangan tanpa henti untuk membawa Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi semakin digalakkan. Ketika perjuangan yang tanpa henti ini telah semakin menaik, maka benturan senjata yang tidak jarang menimbulkan korban nyawa, semakin sering terjadi. Pada saat suasana konflik yang telah semakin panas ini Amerika Serikat berhasil juga mendesak PBB untuk turun tangan. dalam proses perundingan yang diselenggarakan PBB inilah, akhirnya Irian Barat (1962) diputuskan sebagai wilayah yang berada di bawah penguasaan sementara PBB, tetapi Indonesia diminta untuk menjalankan administrasi pemerintahan sampai “*the Act Free Choise*” bagi rakyat Irian Barat diselenggarakan. dalam suasana kemenangan atas tuntutan Nasionalisme telah membayang ini, Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah asian Games (1962). Betapapun taiwan dan Israel secara

terbuka menyatakan kemarahan, karena dihalangi untuk ikut serta, dan konflik internal sesama negara peserta terjadi juga, tetapi di lapangan semuanya berjalan lancar. Indonesia pun berhasil mencapai prestasi yang sangat memuaskan—sebuah prestasi yang sampai sekarang tidak pernah bisa terdekati jangkakan terjangkau. Suasana cerah pun mulai membayang—tahun 1962 terasa sebagai awal dari kecerahan ekonomi dan saat ketika cita-cita kesatuan negara-bangsa akan semakin terwujud.

Tetapi dalam suasana penuh harapan ini, pemerintah demokrasi terpimpin telah mengayunkan langkah ke wilayah dunia konflik yang baru. Politik “konfrontasi” telah mulai dijalankan terhadap rencana pembentukan negara federasi Malaysia, sebuah negara yang akan mencakup tanah semenanjung, singapura, serawak, dan sabah—serangkaian wilayah yang sempat dinyatakan Sukarno dan Mr. Mohammad Yamin sebagai bagian integral dari “Indonesia raya” dalam sidang Badan usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPuPKI—akhir Mei-awal Agustus, 1945). Maka seketika “*Ganyang Malaysia*” pun menjadi pekik perjuangan yang dipopulerkan, tetapi dalam situasi yang penuh gairah konflik ini pula Indonesia melibatkan diri dalam konflik bersenjata di wilayah Borneo utara. Maka, mestikah diherankan kalau ada saja pengamat politik asing mengatakan bahwa bagi Indonesia tahun 1962 adalah “*the year of wasted opportunities*”.

Dalam suasana serba-konflik ini pulalah unsur-unsur ketegangan sosial-politik internal semakin menampakkan dirinya pula. Jika dalam Pemilihan umum 1955 apa yang

disebut Geertz, sebagai *variants* dalam tradisi dan orientasi keagamaan Jawa— abangan, priayi, dan santri— mempunyai kecenderungan untuk mewujudkan dirinya dalam pemilihan partai politik. Tetapi, ketika sistem wacana dan kekuasaan politik telah berada ke tangan sang penguasa, maka suasana yang saling mencurigai pun semakin enggan menutupi wajahnya. dalam semangat yang semakin bercorak serba-konflik dengan gaya wacana yang hiperbolik, maka suasana sosial-politik internal pun semakin tegang juga. Maka para peneliti asing tentang politik kontemporer Indonesia pun bisa berkata bahwa ketika itu “KoM” (unisme) dalam kesatuan ideal Nasakom, yang dibayangkan Sukarno sedang teramat menaik, sedangkan “nas” (ionalisme) *stagnant* saja, tetapi “a” (gama) semakin dipencilkan. Ketika undang-undang agraria yang menentukan batas maksimal penguasaan tanah diterbitkan, tetapi tanpa didampingi peraturan pelaksanaan yang jelas. di berbagai tempat apa yang disebut aksi-sepihak pun terjadi—suasana konflik sosial dalam bayangan kepentingan orientasi sosial-kultural keagamaan telah mulai menampakkan diri.

Dalam suasana inilah apa yang telah dikhawatirkan akhirnya terjadi juga. Menjelang matahari pagi menyinari Jakarta—pada waktu subuh tanggal 1 Oktober 1965, rumah tujuh perwira tinggi dari pimpinan Angkatan Darat diserbu. empat dari mereka langsung dibunuh di rumah masing-masing dan dua orang lagi dihabisi kemudian. Tetapi, di rumah perwira tinggi yang lain, rombongan militer, yang ternyata berasal dari pasukan pengawal

Presiden, gagal dalam menjalankan misi mereka. di rumah yang ketujuh ini, mereka membunuh seorang perwira muda dan melukai seorang gadis kecil, yang beberapa hari kemudian mengembuskan napas terakhir.

Seketika—pada pagi yang cerah tanggal 1 Oktober—pemimpin kelompok militer yang menamakan diri “Gerakan Tiga Puluh September” ini mengumumkan kehadiran mereka dan menyebut nama-nama yang dikatakan akan menjalankan roda pemerintahan, tetapi tanpa menyebut nama Sukarno, maka pada waktu itu juga sebuah batas sejarah yang teramat tebal telah ditegakkan. dalam kesadaran sejarah dan bahkan dalam realitas sosial-politik Indonesia “yang kemarin” telah ditinggalkan. Indonesia telah berada dalam “kekinian” yang lain dari yang kemarin. Tetapi, bagaimana kisah selanjutnya? Maka, biarlah sebuah ucapan yang terkenal mengatakannya —“*the rest is history*”.

Lima puluh tahun telah berlalu, tetapi bukan saja teka-teki atau—mungkin lebih tepat—perdebatan di sekitar peristiwa ini seperti enggan saja untuk berhenti. Peristiwa G-30-S, yang sering juga disebut “Gestapu” meskipun Presiden Sukarno lebih suka menamakannya “Gestok” (Gerakan satu Oktober), bukan saja suatu peristiwa konflik yang paling unik dalam sejarah modern Indonesia, tetapi juga yang teramat mencekam dalam struktur kesadaran bangsa. Berbagai corak konflik internal, bahkan pada masa Revolusi Nasional ketika ancaman dari kembalinya kolonialisme masih merupakan hal yang teramat riil berbagai corak konflik internal sempat juga dialami

bangsa, tetapi semuanya hanya teringat atau mungkin ditangisi. Ada peristiwa yang memprihatinkan itu disebut “perang” (seperti “Perang Cumbok” di Aceh), ada yang selamanya tidak terlupakan sebagai “Revolusi sosial” (seperti yang terjadi di sumatra timur), ada juga yang terkenang sebagai “peristiwa” saja (“peristiwa Tiga daerah” di Pantai utara Jawa), tetapi semuanya hanya tercatat dan teramat mungkin disesali oleh keluarga dan daerah yang mengalami. Tetapi, memang harus diakui juga “Peristiwa Madiun” tidak bisa terlupakan karena peristiwa ini dilancarkan oleh tentara dan para pendukung PKI pada saat negara sedang berada di bawah ancaman agresi militer Belanda. Berbagai konflik lokal lain yang terjadi setelah kemerdekaan mendapat pengakuan internasional sempat juga mengguncangkan kesadaran Indonesia sebagai sebuah bangsa, tetapi semuanya terasa tidak lebih dari “penyimpangan sementara” seketika perbandingan dengan Peristiwa “G-30-S” telah dilakukan.

Tidak ada perdebatan apa-apa ketika lapis atas Peristiwa G-30-S direkonstruksi, sebab semuanya jelas terpampang dalam catatan dan kenangan. Jawaban atas pertanyaan elementer dan rutin kesejarahan tentang “apa, siapa, di mana, bila” sudah sejak awal terpampang dengan jelas. Masalah barulah muncul ketika pertanyaan “bagaimana dan mengapa” telah diajukan. Seketika pertanyaan ini telah diajukan, maka sejarah tidak lagi sekadar mendapatkan kepastian historis, tetapi juga ketepatan sistem wacana dan kejujuran intelektual. Kepelikan pemahaman akan peristiwa ini segera terasa

pada saat pertanyaan “siapa di belakang siapa” telah diajukan dan semakin menaik juga ketika berbagai keterkaitannya dengan pertanyaan “mengapa dan bila” ingin diketahui pula. Maka, suatu keanehan dalam usaha rekonstruksi sejarah tidak pula selamanya terhindarkan—sejarah dari pembunuhan massal yang terjadi disesali atau lebih biasa dikutuk saja seakan-akan kejadian itu tidak ada kaitannya dengan suasana konflik yang semakin mengental pada masa Demokrasi terpimpin sedang berada dalam masa kejayaannya. Golongan manakah yang bisa menyaingi wacana sosial-politik Pemimpin Besar Revolusi? Golongan mana pulakah yang merasakan keterpencilan dalam semangat serba-Revolusi demokrasi terpimpin? Bukankah terasa aneh juga kalau pemahaman akan tragedi Nasional dilepaskan begitu saja dengan situasi sosial-politik yang semakin dominan sebelum terjadinya “Gerakan 30 September” .

Arti dari Peristiwa G-30-S semakin penting juga bukan saja karena akibat yang ditimbulkannya telah membukakan pintu bagi terjadinya perubahan rezim—orde Baru menggantikan demokrasi terpimpin, yang disebutnya orde Lama—tetapi juga karena telah menjadikan unsur-unsur konflik lokal yang telah bersemi itu berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang tidak mungkin terlepas dari struktur dan perbendaharaan ingatan kolektif bangsa. Seketika para pelaku utama dari peristiwa yang terjadi pada waktu subuh tanggal 1 Oktober itu dapat “diamankan” (kalau kecenderungan *euphemisme* gaya wacana orde Baru boleh dipakai), maka

pembunuhan massal yang luar biasa dan pengasingan ribuan anak bangsa ke penjara-penjara di seluruh tanah air seperti dengan begitu saja telah menghantui kehidupan bangsa. Kalau mereka yang dianggap hanya termasuk golongan sampingan harus merasakan apa artinya pengasingan hak politik sebagai warga negara, maka bagi mereka yang termasuk “kelas pilihan” belajar hidup di sebuah pulau yang agak terpencil di perairan Maluku harus dilalui—selama bertahun-tahun. Maka, biarlah rasa ingin tahu saja yang menebak-nebak berapa banyak dari mereka yang terbunuh dan teraniaya atau yang sempat diasingkan itu benar-benar “musuh yang ingin disingkirkan”, dan berapa banyak pula yang harus menderita fisik dan mental karena berada di tempat yang salah dan pada waktu yang tidak tepat pula?

Karena itu, mestikah diherankan kalau sampai sekarang pun—setelah sekian puluh tahun berlalu dan pemegang kendali kekuasaan telah pula sekian kali berganti—bukan saja mendapatkan rekonstruksi sejarah yang akurat masih terus saja memancing perdebatan tentang mana yang benar dan yang salah. Maka, bisalah dipahami juga terlalu biasa *claim* yang menggebu-gebu memperkenalkan “pelurusan sejarah” tidak pula jarang hanya berakhir dengan pembelaan atau peneguhan kedudukan seseorang atau suatu golongan dalam ingatan sejarah bangsa.

Dalam suasana inilah, suatu usaha yang segar untuk mengatasi segala corak pergolakan perasaan dan bahkan juga kerancuan pemikiran buku yang dipersembahkan

Prof. dr. Salim Haji Said tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Seketika kalimat pertama dinukilkannya dia menyadari sepenuhnya bahwa dia adalah bagian dari rangkaian kisah yang disampaikan. Baginya, awal dan rangkaian yang sambung-bersambung dari Peristiwa “G-30-S” bukan saja suatu rangkaian kenangan biografis yang teramat mencekam, tetapi juga hasil penggalian dan penelitian yang mendalam tentang situasi sosial-historis dari sebuah episode yang teramat dramatis dalam sejarah modern bangsa. Kalau saja kasus Prof. Salim ini boleh diilmiah-ilmiah

kan, maka buku yang dihasilkannya ini adalah refleksi dari usaha

yang tekun untuk memahami dinamika kehidupan sosial-politik bangsa ketika proses *nation building* sedang berada dalam tahap yang kritis. Bukankah ketika Peristiwa G-30-S terjadi, negarabangsa Indonesia sedang mengalami berbagai corak ujian? Bukankah pula pada saat itu, pertentangan blok timur dan Barat sedang menaik dan bahkan persaingan dua negara komunis terbesar—Uni Soviet dan RRT—tengah menajam pula. G-30-S terjadi ketika negara-negara asia-afrika dan Amerika selatan dan bahkan hubungan sesama mereka sedang mengalami ujian pula.

Awal karier Salim Haji Said adalah kewartawanan politik dan militer yang masih tersipu-sipu dalam keinginan untuk melarutkan diri dalam dunia seni. Tetapi, rangkaian pengalaman yang sempat dilalui dan ketertarikan dalam usaha mendapatkan pengetahuan dan kearifan dari

dinamika sosial-politik semakin membawanya ke dalam dunia ilmu pengetahuan. Melalui tempaan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari dua-tiga Universitas di dalam dan di luar negeri serta keterlibatan dalam penulisan beberapa buku tentang berbagai subjek—mulai dari sejarah perfilman sampai sejarah kemiliteran dan sebagainya Prof. dr. Salim Haji Said pun telah semakin membuktikan dirinya sebagai salah seorang ilmuwan yang paling terkemuka.

Maka, mestikah diherankan kalau karyanya ini membuka pintu yang simpatik untuk memperdalam pemahaman tentang peristiwa yang telah membagi zaman kesejarahan bangsa kita?

Taufik Abdullah

akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

GESTAPU, PKI, AIDIT, SUKARNO, DAN SOEHARTO

Dengan sepeda tua, saya tiba di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jumat pagi satu Oktober itu. Sekolah kami terletak di Jalan Diponegoro, persis di depan Rumah Sakit umum Cipto Mangunkusumo. Jaraknya sekitar hanya dua kilometer dari pondokan saya di Jalan Matraman raya. Gedung yang dipakai oleh Fakultas Psikologi waktu itu adalah milik Persatuan sekolah-sekolah Kristen Jakarta (PSKD). Fakultas sastra terlebih dahulu telah mempergunakan ruangan-ruangan pinjaman tersebut, sebelum fakultas yang kini bernama Fakultas Ilmu Budaya itu dipindahkan ke rawamangun untuk akhirnya menempati lokasi permanennya di Depok (Jawa Barat).

Masa itu adalah hari-hari perpeloncoan bagi mahasiswa baru. tidak ada kuliah, dan para senior umumnya bersenang-senang saja. Sebagai reporter muda, saya tidak punya kesempatan bersenang-senang. harus terus bekerja. Pada 30 September hingga larut malam, misalnya, saya meliput pengajian di kediaman resmi Panglima Angkatan Laut (sekarang bernama Wisma Elang

Laut), Laksamana Madya TNI R. Eddy Martadinata, yang terletak di Jalan Diponegoro. *Dead line* kita malam itu agak terlambat sebab menanti selesainya pidato Presiden pada acara Musyawarah Nasional teknik (Munastek) di Gelora Bung Karno, Senayan.

Seperti biasa, pidato Presiden/Pemimpin Besar Revolusi selalu berlangsung lama. Saya pulang dari kantor lepas tengah malam dan dalam perjalanan pulang masih sempat membeli nasi bungkus untuk makan malam saya pada sebuah restoran Minang di Pasar senen.

Terlambat tidur, esok paginya bangun kesiangan. dan karena tidak punya radio, saya tidak tahu perkembangan politik terakhir sebelum meninggalkan kamar pondokan di Jalan Matraman Raya 51.

Belum lagi turun dari sepeda, seorang teman yang berdiri di halaman depan Fakultas berteriak kepada saya, “Lim, Babenya Rully diculik. Katanya, agen CIA.” Rully adalah putri Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat waktu itu. Putri Jenderal Yani itu adalah mahasiswi yang berada setahun di belakang saya.

Yani diculik dan dituduh agen Cia? Ini segera mengingatkan saya pada desas-desus beberapa waktu sebelumnya tentang “Dewan Jenderal” yang menurut PKI, dengan bantuan CIA akan melakukan kudeta.

Tidak jadi masuk ke halaman tempat para pelonco (“Cama” dan “Cami”, panggilan mereka waktu itu) berkumpul, saya langsung mengayuh sepeda ke rumah Wiratmo Sukito di Jalan Cilosari 37, Cikini. Pondokan Wiratmo itu adalah tempat kami— seniman, cendekiawan,

budayawan, dan aktivis—sering berkumpul dan mendiskusikan perkembangan politik dan budaya.

Sebelum meninggalkan halaman Fakultas, saya berpapasan dengan Imam Waluyo, seorang aktivis yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang sudah dibubarkan Presiden Sukarno pada 1960. “Lim, Sukarno sekarang ada di halim,” kira-kira begitu katanya sambil berlalu. Halim Perdanakusuma adalah nama Pangkalan Angkatan Udara yang terletak di daerah Cililitan, Jakarta timur.

Tiba di rumah Wiratmo Sukito, jam dinding (saya belum punya arloji waktu itu) menunjukkan waktu menjelang pukul 11 siang. Wiratmo bersiap berangkat. Katanya ke gereja. Tidak jelas apakah ada misa Jumat pagi itu. Tapi, sebagai seorang penganut Katolik yang taat—sebelum akhirnya pindah kembali ke Islam ketika kawin dengan seorang hakim agung yang beragama Islam—Wiratmo memang rajin ke gereja. Nanti ketika kembali beragama Islam, Wiratmo juga rajin bersembahyang di masjid. “Ini pekerjaan PKI,” kata Wiratmo, sambil bergegas pergi.

Saya melanjutkan mengayuh sepeda ke Jalan Diponegoro 54, rumah Brigjen TNI Soegandhi. Jenderal yang lama mendampingi Presiden Sukarno sebagai ajudan senior itu adalah direktur Penerangan Staf Angkatan Bersenjata (SAB) yang juga pemimpin umum koran *Angkatan Bersenjata*, tempat saya bekerja sebagai reporter pemula. Jarak antara pondokan Wiratmo dan rumah Soegandhi sekitar satu kilometer. Soegandhi

dikenal sebagai perwira tinggi yang memperkenalkan singkatan **Gestapu** untuk Gerakan September Tiga Puluh.

Sebelum saya datang, beberapa pegawai SAB sudah menunggu di sana. Tidak lama kemudian, tuan rumah muncul. Soegandhi baru saja pulang dari rumah beberapa Jenderal yang jadi korban pembantaian pagi itu. dia bercerita mengenai darah yang masih berceceran di rumah-rumah para koleganya yang dibantai menjelang subuh.

Mengingat ketegangan antara PKI dan kaum anti-Komunis —terutama dengan Angkatan Darat—yang hari-hari itu memang makin memuncak, tidak sulit bagi kami semua pagi hari itu untuk dengan cepat berkesimpulan bahwa PKI yang berada di balik peristiwa berdarah tersebut.

Hari itu Jumat, tapi tidak ada lagi di antara kami yang ingat sembahyang Jumat. Bersama Soegandhi beramai-ramai kami berangkat ke markas Kostrad, di Jalan Merdeka timur. Mengapa ke Kostrad? Pada mulanya saya juga tidak tahu. Pokoknya ikut saja. Tapi, tampaknya Soegandhi sudah dapat informasi tentang kegiatan di Kostrad. di kemudian hari, saya baru berhasil mendapatkan informasi. Pagi itu, Brigjen TNI h.V. Worang — Komandan detasemen Markas—mengeluarkan perintah penutupan sementara kantor staf Angkatan Bersenjata (saB) di Jalan Merdeka Barat dan semua kegiatan dipindahkan di Kostrad tempat Mayjen TNI Soeharto mengendalikan operasi menghadapi Gestapu.





Salim Haji Said bersama Brigjen TNI Soegandhi dalam penerbangan
ke Manado, 1969.

Nama Mayor Jenderal TNI Soeharto, Panglima Kostrad (Pangkostrad) waktu itu, hampir tidak dikenal masyarakat. Tapi karena saya pernah membaca komik tentang serangan umum Yogyakarta yang digambarkan sebagai berada di bawah pimpinan overeste [Letkol, bahasa Belanda] Soeharto, jadi saya tahu siapa Panglima Kostrad tersebut. Soeharto memang pernah menjadi Panglima Mandala pembebasan Irian Barat. Tapi karena penyelesaian pengembalian Irian Barat ke bawah penguasaan Indonesia dilakukan lewat perundingan, artinya tidak ada perang. Soeharto tidak berkesempatan mendapatkan publikasi lewat jabatan Panglima yang berkedudukan di Makassar waktu itu.

Markas Kostrad belum begitu ramai menjelang tengah hari itu ketika kami tiba. usaha menarik tentara yang dikerahkan Gestapu di lapangan Monumen Nasional (Monas) masih sedang dilakukan. Saya melihat banyak perwira yang berseliweran dengan pakaian sipil. Salah seorang yang saya ingat adalah Kolonel Polisi Militer (CPM) Cokropranolo (kelak berpangkat Letnan Jenderal dan sempat menjadi Kepala Intel Hankam, sekretaris Militer Presiden, dan akhirnya Gubernur Jakarta).

Saya jumpa lagi dengan Cokropranolo di departemen Pertahanan dan Keamanan (depHankam) pada 1969. Waktu itu dia sudah berpangkat Brigjen dan menjadi Kepala Intel Hankam. Suatu hari saya harus ikut tes bebas Gestapu sebagai syarat mendapat izin berangkat ke negeri Belanda. Jenderal Cokro melihat saya dan bertanya, “ada apa you di sini?” Ikut tes bebas Gestapu, jawab saya. “ah,

you kan tidak terlibat Gestapu. Tidak usah ikut tes. Sampaikan kepada tukang tes, Pak Nolly, bilang you tidak usah dites.” Begitulah awal ceritanya mengapa sampai orde Baru jatuh, saya tidak pernah ikut tes bebas Gestapu.

Pak Nolly, panggilan akrab Cokropranolo, rupanya melihat saya ikut mondar-mandir di Kostrad pada satu Oktober itu. Sekian tahun kemudian, pada Juni 1970, ketika Bung Karno meninggal dan jasadnya disemayamkan di Wisma Yaso (Museum satria Mandala sekarang), saya terhindar dari kewajiban antre bersama orang banyak yang datang berbelasungkawa sembari menengok jenazah. di sana yang bertugas ialah Pak Nolly, sekretaris Militer Presiden, dan saya dipersilakan masuk lewat jalur VIP. Sebagai wartawan, kesempatan itu saya manfaatkan memotret jenazah Bung Karno dari jarak dekat.

SUASANA DI KOSTRAD TEGANG. Sebagian besar yang ada di sana siang itu hampir sepakat, penculikan dan pembunuhan para Jenderal pimpinan Angkatan Darat adalah pekerjaan PKI. Tapi, bagaimana persisnya? Belum jelas. Yang saya ingat, timbul juga kecurigaan pada Angkatan Udara, yang pimpinannya memang diketahui punya hubungan baik dengan PKI. Pimpinan Angkatan Udara secara terang-terangan mendukung Nasakom serta mengajarkan Marxisme di balai pendidikan tinggi mereka.

Kecurigaan makin menjadi-jadi karena, lewat radio, Panglima Angkatan Udara, Laksamana Madya udara (sekarang Marsekal Madya) Omar Dani, pagi itu mengumumkan dukungannya pada gerakan

“pembersihan Revolusioner” yang dilakukan Gestapu terhadap pimpinan Angkatan Darat.

SAYA BERUMUR 21 TAHUN KETIKA PERISTIWA ITU TERJADI dan sudah dua tahun menjadi penduduk Jakarta. hidup amat sulit waktu itu. Inflasi mengamuk dengan dahsyat (650%) dan barangbarang sulit ditemukan di pasar. harga keperluan sehari-hari berubah dan beranjak mahal setiap harinya. Kualitas barang di pasar amat buruk. Sebagai contoh, mandi dengan sabun *Bris* keluaran unilever—sabun produksi dalam negeri terbaik waktu itu—menyebabkan kulit jadi bersisik segera setelah badan dikeringkan. obat-obatan, terutama anti-biotik, harus diperoleh di pasar gelap. dengan harga mahal, tentu saja.

Saya pernah ikut “ngobjek” jual obat bersama dr. Abdul Gafur (kemudian menjadi Menteri negara urusan Pemuda dan olahraga pada masa orde Baru) dengan keuntungan tipis. Waktu itu untuk *survive*, sebagian besar orang memang terpaksa terlibat “ngobjek”, kata lain dari nyatut. untuk menambah sedikit uang di saku, sebelum bekerja sebagai wartawan, saya juga pernah bekerja paruh waktu di sebuah toko sandang pangan yang menyalurkan beras murah dan minyak tanah kepada penduduk.

Toko-toko sandang pangan bisa ditemukan di mana-mana waktu itu. untuk membeli beberapa liter beras murah dengan kualitas rendah itu, orang harus mendapat kartu dari kelurahan. Sebagai penjaga toko sandang pangan, saya dibayar dengan beberapa liter beras. Pada malam harinya, setiap akan makan, sebagian dari beras

murah itu saya tukarkan dengan nasi uduk yang penjualnya menggunakan pikulan dan mangkal di pinggirpinggir jalan. Penjual nasi uduk dengan pikulan dan mangkal di pinggir jalan kini tidak bisa ditemukan lagi.

Kendati dengan segala kesulitan hidup demikian, saya dan teman-teman selalu dengan saksama mengikuti perkembangan politik dan secara teratur mendiskusikannya di rumah pondokan Wiratmo. Teman-teman yang sering muncul di sana ialah soe hok Jin (pada masa orde Baru berganti menjadi arief Budiman), Goenawan Mohamad, rahman tolleng, ekky syahrudin, dan sejumlah tokoh-tokoh muda Islam serta beberapa perwira TNI.

Selain hampir tiap hari mendengarkan dan kemudian mendiskusikan pidato Presiden Sukarno yang sama sekali tidak berhubungan dengan kondisi ekonomi yang makin memburuk, dengan uang yang amat terbatas kami juga secara bersama selalu mencari dan membeli koran-koran yang pada umumnya sudah dikuasai PKI dan kekuatan kiri lainnya. Sebagai seniman (gambaran diri saya waktu itu), setiap sabtu pagi saya “wajib” membeli koran *Bintang Timur* yang mempunyai rubrik kebudayaan **Lentera** asuhan Pramoedya Ananta Toer.[]

PRAMOEDYA MEMBABAT

Rubrik pada koran milik Partindo (Partai Indonesia) itu adalah lembaran budaya yang mengkhususkan diri “membabat” (istilah yang diperkenalkan Pramoedya) para seniman budayawan serta karya-karya seni dan gagasan-gagasan kebudayaan yang dituduh oleh Pramoedya sebagai “kontraRevolusioner dan antek nekolim”. Anehnya pula serangan ganas kepada musuhmusuh Komunis dan kaum kiri itu tidak selalu mudah ditemukan pada koran serta media-media yang secara resmi diterbitkan PKI sendiri. Saya menduga waktu itu memang ada pembagian tugas. Serangan yang masih agak beradab dilancarkan dari media yang diterbitkan sendiri oleh PKI, sementara yang kasar dan brutal menjadi pekerjaan harian *Bintang Timur* terutama lewat lampiran **Lentera**. Partindo disusupi PKI atau Partindo hanya sejalan dengan PKI? tidak terang buat kami waktu itu. Yang jelas, serangan kasar Pramoedya itu ikut makin menambah kebencian dan ketakutan orang banyak kepada PKI dan Pramoedya sendiri. Setelah **Manifes Kebudayaan**—pernyataan sikap budaya para seniman dan budayawan non-Komunis—dilarang oleh Sukarno pada 1964 dan para pendukungnya jadi sasaran pengganyangan PKI, lampiran kebudayaan di

koran Partindo itu secara teratur juga memuat nama dan alamat para penanda tangan Manifest Kebudayaan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. dengan alamat di tangan, para pemuda Komunis dengan mudah melancarkan teror kepada seniman-seniman yang mereka juluki pengikut “Manikebu” itu. Makin mendekati operasi Gestapu makin ganas saja “pembabatan” yang dipimpin Pramoedya. Tokoh-tokoh seperti Hamka—novelis dan juga ulama besar yang di kemudian hari menjadi Ketua Majelis ulama Indonesia—adalah satu target Pramoedya. Tulisan yang menyerang Hamka yang ditulis dengan sejumlah nama samaran muncul setiap Sabtu di lampiran budaya **Lentera**.

Menarik untuk dicatat, di kemudian hari, pada Desember 1977, ketika saya berkesempatan mewawancarai Pramoedya di Pulau Buru, selain tidak mengaku sebagai Komunis—meski pernah menjadi petinggi Lembaga Kebudayaan rakyat (Lekra) yang merupakan organisasi kebudayaan PKI—kepada saya, Pramoedya juga menjelaskan latar belakang pemakaian bahasa kasar dan brutal kepada lawan-lawan Komunis waktu itu:

Dalam menulis sastra, saya berhadapan dengan diri saya sendiri, dalam menulis artikel saya berhadapan dengan dunia. Berbeda. Saya mengharapkan yang lebih baik dan lebih cepat kepada dunia ini. Mungkin itu yang menyebabkan bahasanya jadi kasar.

Tidak terlalu salah sebenarnya untuk menyimpulkan, Pramoedya punya agenda sendiri dengan memanfaatkan

lampiran sabtu harian *Bintang Timur*. di kalangan sastrawan segenerasinya sejak lama beredar cerita kekecewaan Pramoedya kepada **Sticusa** (Yayasan Kebudayaan Belanda) yang pada awal tahun lima puluhan mengundangnya ke negeri Belanda. Sticusa adalah kegiatan Belanda untuk terus melanggengkan “ikatan budaya” antara Indonesia dan Belanda. Kabarnya perhatian terhadap Pramoedya kurang diperlihatkan pihak tuan rumah kepadanya. Pramoedya kecewa dan marah.

Kemarahan tersebut diketahui secara luas di kalangan seniman dan budayawan Indonesia waktu itu. PKI menemukan peluang, Pramoedya diundang ke Moskow dan Beijing. Belajar dari kekecewaan Pramoedya di Belanda, di negeri-negeri Komunis itu pengarang novel terkemuka itu mendapat perlakuan dan perhatian khusus. Tidak lama kemudian Pramoedya dengan senang hati menjadi petinggi Lekra.





Salim Haji Said mewawancarai Pramoedya Ananta Toer di Pulau Buru,
1977.

Meski tidak mengaku Komunis, kegiatannya membat mereka yang dianggapnya sebagai “kontraRevolusi” dalam bidang budaya, di mata orang yang anti-Komunis waktu itu dipandang sangat sejalan dengan rencana-rencana PKI menghancurkan lawan-lawan politiknya di bidang kebudayaan.

Menurut pengamatan penyair Taufiq Ismail,

Agresi Pram itu searah-seirama dengan geladi resik PKI mencobakan jurus-jurus pukulan politik dan fisik bertarung melawan kekuatan anti-PKI di seluruh bidang politik, ekonomi, buruh, tani, pemuda, mahasiswa, seni budaya, sebagai latihan menuju perebutan kekuasaan Kudeta satu Oktober 1965.

Fenomena Pramodya yang sibuk “membat” dan senantiasa menggunakan bahasa kasar dan keras kepada musuhmusuh politik PKI di samping berbagai aksi politik PKI yang makin lama makin berani, adalah bagian dari latar belakang yang menjadi dasar bagi kami pada satu Oktober 1965, untuk tidak terlalu terkejut dengan kejadian dramatis pagi hari itu. dari bacaan, informasi, dan diskusi kami yang sering berkumpul di pondokan Wiratmo Sukito—punya hubungan luas dengan gerakan-gerakan anti-Komunis di kalangan sipil maupun militer— kami sudah cukup lama berkesimpulan pada akhirnya bakal datang hari ketika PKI akan bentrok dengan Angkatan Darat. Bentrok pasti tak terhindarkan. Tapi, kapan? Cuma itulah pertanyaannya waktu itu. Ya, kapan?

Berita tentang sakitnya Bung Karno sudah kami dengar pada awal Agustus 1965. Pada masa itu secara terbatas beredar cerita sang Presiden akan di rawat di

Rumah Sakit Katolik Carolus yang terletak di Jalan salemba raya. Lebih dramatis lagi disebutkan bahwa Sukarno bakal membacakan pidato 17 Agustus 1965 dari Rumah Sakit tersebut.

Selain ketegangan politik yang makin menjadi-jadi antara PKI dan golongan anti-Komunis menjelang tragedi berdarah itu, seingat saya, ada dua informasi lain yang kemudian ikut mendorong kami lebih cepat mencurigai PKI berada di balik Gestapu. *Pertama* adalah informasi dari teman kami, Zainal Zakse, tentang rencana PKI merayakan ulang tahun Peristiwa Madiun.

Pada perayaan yang PKI rencanakan berlangsung pada 30 September, menurut informasi Zakse, orang-orang Komunis itu “akan mengarak foto-foto para Jenderal yang mereka tuduh sebagai Jenderal korup dan kapitalis birokrat”. Teman kami itu adalah mahasiswa Fakultas sastra Universitas Indonesia dan anggota Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos). dia berasal dari Medan dan rupanya tetap memelihara hubungan baiknya dengan teman-teman sedaerah yang aktif di Lekra, organisasi kebudayaan PKI itu.

Markas Lekra terletak di Jalan Cidurian 19, tidak jauh dari rumah Wiratmo yang terletak di Jalan Cilosari 37, Cikini. Kantor pusat Lekra itu juga berdekatan dengan Mes Cakrabirawa yang terletak di Jalan Cidurian 15. Letkol Untung Samsuri, Komandan Gestapu, kabarnya tinggal di mes tersebut. Kalau orang-orang Lekra itu malam-malam berjalan mencari kopi dan ketan bakar di Gang ampiun, mereka harus melewati jalan di depan pondokan Wiratmo.

Kami sering melihat mereka, bahkan kadang berpapasan, tapi tidak saling menegur.



Para sastrawan Lekra berpose di depan sekretariat Lekra.
Cerita Zakse waktu itu kami tafsirkan sebagai bagian

dari makin meningkatnya ofensif-Revolusioner PKI yang sejak lama memang telah mereka lancarkan. Bertahun-tahun kemudian saya mendapat informasi bahwa kontak Zakse di dalam Lekra ialah Prof. Bakri siregar, sastrawan terkemuka Lekra.

Zakse konon pernah menjadi murid kesayangan Bakri siregar ketika masih belajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Medan. Beberapa waktu setelah Gestapu, saya pernah melihat Bakri berjalan dengan santai melintas di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Waktu itu hampir semua teman-temannya sudah berada dalam tahanan. Sengaja dilepas untuk diikuti atau memang orang yang ditanam militer dalam Lekra? *Wallahu a'lam*.

Yang *kedua* adalah taklimat (*briefing*) dari Brigadir Jenderal TNI Soegandhi, Selaku Direktur Penerangan (SAB). Kepada kami para wartawan dan para stafnya, secara teratur Soegandhi memang selalu memberi taklimat politik. Biasanya dua pekan sekali. Taklimat yang saya anggap paling penting ini ialah yang diadakan beberapa hari sebelum Gestapu beraksi. "PKI sekarang sedang mempropagandakan bahwa ada dewan Jenderal di Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta," kata Soegandhi. "dewan Jenderal ini, menurut PKI, bekerja sama dengan CIA untuk menggulingkan Bung Karno."[]

“KAU SUDAH DICEKOKI NASUTION”

Rada 30 September siang, saya jumpa atasan saya itu di kantornya di Merdeka Barat, kantor Kementerian Pertahanan sekarang. Soegandhi menceritakan dengan nada sedih, beliau pagi itu menemui mantan bosnya di Istana Merdeka untuk menjelaskan dan membantah isu adanya “dewan Jenderal” di dalam Angkatan Darat. Soegandhi juga mencoba meyakinkan Sukarno bahwa Jenderal Yani itu sangat loyal kepadanya, dan Aidit itu sedang merencanakan perebutan kekuasaan. “Gandhi, kau tau apa? Kau itu sudah dicekoki Nasution,” kata Sukarno, dengan marah sambil membentak dan mengusir mantan ajudannya itu. Begitu cerita Soegandhi kepada saya siang itu.

Di kemudian hari baru kami tahu, sebelum mendatangi Sukarno di Istana Merdeka, Soegandhi juga telah mengunjungi Jenderal Yani menyampaikan informasi PKI akan melakukan kudeta. dengan alasan yang berbeda, Sukarno dan Yani menyepelkan informasi Soegandhi. Informasi yang demikian kabarnya memang sudah beberapa kali, oleh beberapa orang, disampaikan kepada Yani.

Bukannya meningkatkan kewaspadaan, Yani malah

memulangkan tambahan pasukan yang diperbantukan kepada pengawal tetap yang menjaga kediamannya. Sampai hari ini belum juga ditemukan penjelasan bagaimana sejumlah penculik bisa dengan mudah memasuki kediaman para petinggi Angkatan Darat, dan membunuh mereka setelah gagal memaksa membawa para Jenderal itu ikut ke Lubang Buaya.

Dalam masa panasnya konfrontasi dengan Malaysia dan makin meningkatnya ketegangan politik domestik (PKI versus Angkatan Darat), tampaknya para Jenderal tidak pernah memperhitungkan kemungkinan operasi pasukan komando melumpuhkan mereka. dan itulah yang terjadi pada satu Oktober pagi hari tersebut. Cuma bukan pasukan komando asing yang menyapu hampir tuntas pimpinan Angkatan Darat, melainkan anak buah mereka sendiri yang digerakkan oleh golongan Komunis, musuh bebuyutan Angkatan Darat.

PADA TAKLIMAT-TAKLIMAT sebelumnya, soal autentik-palsunya dokumen Gilchrist telah pula jadi bahan pembicaraan. dalam dokumen yang menggunakan kertas surat Kedutaan Besar Inggris di Jakarta itu, disebut adanya *our local army friends*, artinya ada kolaborator di dalam Angkatan Darat Indonesia yang merupakan antek Inggris/Barat. di kemudian hari terungkap yang membuat dokumen itu adalah Ladislav Bittman, seorang intel Cekoslowakia yang bekerja untuk dinas rahasia Uni Soviet, KGB. Sebagai protes terhadap penyerbuan tentara rusia ke Cekoslowakia pada 1968, Bittman membelot ke

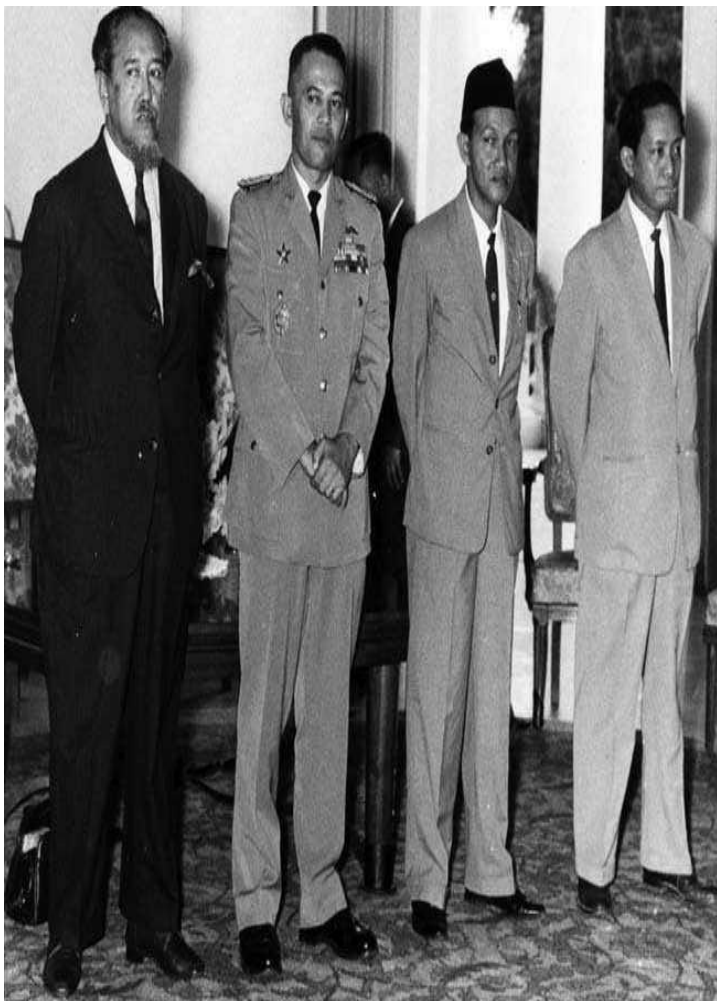
Amerika Serikat dan membongkar semua yang telah dilakukannya untuk KGB. Termasuk memalsukan dokumen yang populer disebut sebagai dokumen Gilchrist itu.

Adapun ketegangan antara Sukarno dan Angkatan Darat, kemudian kita tahu lebih terperinci setelah rosihan anwar menerbitkan bukunya, *Sebelum Prahara*, yang merupakan catatan harian wartawan senior itu selama masa demokrasi terpimpin. Kegiatan menulis catatan harian itu dimulai rosihan tak berselang lama setelah korannya, *Pedoman*, ditutup Sukarno.

Melalui jaringan lama Partai Sosialis Indonesia (PSI) serta pertemanan masa sekolah di Yogyakarta pada tahun-tahun terakhir penjajahan Belanda, rosihan mendapatkan banyak informasi politik pada masa tegang tersebut dari beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Semua dicatatnya dengan rapi setiap harinya. Menurut rosihan kepada saya, salah satu sumber informasinya ialah Brigjen TNI M.t. haryono, mantan teman sekolah rosihan di Yogyakarta. M.t. haryono kemudian terkenal sebagai salah seorang Pahlawan Revolusi setelah dibantai Gestapu pada satu Oktober pagi.

SEMENTARA ITU DARI JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR sejak 1962 makin banyak saja cerita mengenai ketegangan yang melanda hubungan golongan santri dan kaum Marhaenis, di satu pihak, dan PKI di pihak lain. Konflik, bahkan bentrok fisik terjadi sebagai akibat aksi sepihak Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi tani PKI.

Bentrok menyiratkan makin meningkatnya kepercayaan diri yang pada gilirannya memicu agresivitas PKI. Selain pembantaian terhadap Pembantu Letnan satu (Peltu) sudjono di sumatra utara (dikenal sebagai *Peristiwa Bandar Betsy*) oleh anggota-anggota BTI, di Kanigoro, Jawa Timur, suatu acara pelatihan kader Pelajar Islam Indonesia (PII) diserang secara fisik dan brutal oleh pemuda-pemuda Komunis.



MENKOHANKAM KASAB A.H. Nasution bersama tokoh-tokoh Nasakom, Ketua PNI Ali Sastroamidjojo, Ketua NU Idham Chalid, dan Ketua PKI D.N. Aidit, Jakarta, 1963.

Pada pagi buta 15 Januari 1965 tatkala para peserta pelatihan sedang bersiap-siap melakukan sembahyang

subuh di masjid, orang-orang Komunis itu secara mendadak menyerang mereka. Selain secara fisik menganiaya kader-kader PII itu, Kitab Suci Al-Quran juga mereka injak-injak. Aksi yang menistakan al-Quran ini memicu kemarahan para kiai di hampir semua pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nanti setelah Gestapu, para santri dan kiai dari berbagai pesantren tersebut kabarnya banyak yang ikut memainkan peran dalam pembantaian orang-orang Komunis.

Dalam rangka gerakan aksi sepihak oleh Btl, salah satu yang menjadi sasaran ialah tanah-tanah milik pesantren (umumnya tanah wakaf) selain milik tokoh-tokoh Marhaenis. Yang juga jadi sasaran PKI dan ormas-ormasnya ialah Agama pada umumnya. di Jawa Tengah, misalnya, **Bakoksi** (Badan Koordinasi Ketoprak seluruh Indonesia) grup ketoprak yang berafiliasi ke Lekra, berkeliling memainkan lakon “Matine Gusti Allah”, artinya matinya tuhan Allah; “Gusti Allah Manten”, artinya tuhan Allah kawin; “Malaikat Kimpol”, artinya malaikat bersanggama; “Gusti Allah ngunduh Mantu”, artinya tuhan Allah menjemput menantu. orang Katolik juga jadi sasaran. Anggota Bakoksi memainkan lakon “Paus rabi” yang mengisahkan Paus kawin.

Pertunjukan wayang kulit juga menjadi media mereka mengejek Agama Islam. Pada titik inilah barangkali bisa dikatakan terjadinya persinggungan antara visi Komunis terhadap agama, dan sikap orang-orang abangan yang pada dasarnya risi terhadap kaum santri. Sebagai reaksi terhadap pelecehan Agama dan gerakan aksi sepihak yang

dilancarkan oleh PKI, di Jawa Tengah dan Jawa Timur berkali-kali terjadi bentrokan fisik antara golongan Komunis melawan kaum Nasionalis dan orang-orang pesantren.

Di Jakarta hubungan Pni dengan PKI boleh mesra-mesraan, tapi di pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur pengikut mereka, jauh sebelum Gestapu, sudah saling menyerang secara fisik. Menurut pengakuan pimpinan BTI Jawa Timur, sebagaimana yang dikutip Prof. Aminuddin Kasdi dalam bukunya, *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*, antara 17 Agustus 1964 hingga Januari 1965, empat kader PKI/Btl terbunuh, 43 petani “Revolusioner” luka-luka, 409 kader di tahan, 50 hektar tanaman hancur, dan 13 rumah anggota Btl dirusak. Sayang koran yang menjadi sumber tulisan Profesor aminuddin tidak mencatat jumlah korban lawan-lawan PKI waktu itu.

Bersamaan dengan ketegangan di pedalaman tersebut, di Jakarta, surabaya, dan beberapa kota besar lainnya, hampir tiada hari terlewatkan oleh orang-orang Komunis dan golongan kiri lainnya untuk tidak berdemo menuntut pembubaran himpunan Mahasiswa Islam (hMI), pengganyangan Manifes Kebudayaan (disingkat “Manikebu” oleh PKI), pembersihan para kapitalis birokrat (maksudnya para Jenderal Angkatan Darat, terutama yang duduk dalam pimpinan perusahaan negara bekas milik Belanda), di samping pengganyangan Malaysia. Kedutaan Malaya, Kedutaan Amerika, perpustakaan united states Information service (usIs), dan Kedutaan Inggris (berhasil

dibakar pada 18 September 1963), serta apa saja yang mereka anggap sebagai antek-antek neokolonialisme/imperialisme (nekolim), semua jadi sasaran demonstrasi.



Aksi menentang pembubaran HMI.

Pada hari-hari menjelang Gestapu, sasaran terpenting pengganyangan PKI ialah HMI, organisasi mahasiswa terbesar waktu itu. “Kalau tidak bisa membubarkan HMI, pakai sarung saja,” kata Aidit menghasut para anggota

CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia), organisasi mahasiswa Komunis, dalam pidatonya di Istora Senayan beberapa hari sebelum Gestapu.

Kalau HMI berhasil mereka bubarkan, maka organisasi organisasi independen lainnya bukan soal serius lagi bagi PKI menghancurkannya. Menyadari taktik PKI tersebut, tentara dan kekuatan anti-Komunis lainnya secara bersama melindungi HMI. Sukarno tidak sampai membubarkan HMI tampaknya karena tidak ingin melihat rusaknya keseimbangan kekuatan antara PKI dan kekuatan-kekuatan anti-Komunis, terutama Angkatan Darat.

SEMENTARA ITU, HAMPIR SEMUA Koran dan media cetak lainnya sudah dikuasai PKI bersama kekuatan kiri lainnya. Sebagian terbesar berita yang tersaji ialah kabar mengenai kegiatan pengganyangan yang dilakukan PKI terhadap kekuatan-kekuatan yang mereka sebut sebagai kaum “kontraRevolusioner”. Koran-koran yang tidak sejalan dengan garis PKI sebagian besar telah berhasil mereka kuburkan. Tentu saja dengan menggunakan tangan Sukarno. Kantor Berita **Antara** yang memainkan peran sebagai sumber berita bagi media-media yang belum sanggup memelihara koresponden di berbagai tempat, juga berhasil dikuasai PKI setelah menyingkirkan tokoh-tokoh senior yang bersama Adam Malik dulu merintis pembentukan kantor berita tersebut.

Abdul hakim, ayah Marsekal TNI (Purn.) Chappy hakim dan rahmat Nasution, ayah pengacara terkenal Adnan

Buyung Nasution adalah dua dari pimpinan lama **Antara** yang ditendang keluar oleh PKI. Adalah djawoto yang PKI didapuk memimpin kantor berita Nasional tersebut. Memimpin **Antara** untuk waktu singkat, djawoto dikirim Sukarno ke Beijing sebagai duta besar. Kemudian tercatat, djawoto tidak pernah kembali ke Indonesia. Kabarnya dia meninggal dalam pelarian dan berkubur di Paris.[]

MEMBUNUH SUKARNO DENGAN SUKARNOISME

Puncak penghancuran kekuatan anti-Komunis di kalangan media terjadi ketika, atas tekanan PKI dan golongan kiri lainnya, Sukarno membubarkan **Badan Pembela Sukarnoisme** (BPS). Kegiatan BPS ialah menyebarkan Sukarnoisme, yakni ajaran-ajaran Presiden Sukarno sebagai usaha membendung kampanye politik dan ideologi PKI. Sejumlah besar koran memuat seri tulisan Sayuti Melik—dikenal sebagai murid politik Bung Karno sejak zaman Pergerakan Nasional—mengenai ajaran Bung Karno tersebut. BPS dituduh oleh PKI sebagai “membunuh Sukarno dengan Sukarnoisme”. Anehnya, Presiden Sukarno sepakat dengan tuduhan PKI. BPS bukan saja dibubarkan, sebagian besar koran yang secara teratur memuat seri tulisan Sayuti Melik, juga diberangus. Penganggu wartawan secara besar-besaran terjadi.

Pada waktu yang sama, sebagai hasil ofensif-Revolusioner kaum Komunis, sejumlah Universitas juga telah berhasil mereka bersihkan dari para pengajar, dosen, dan profesor yang tidak berhasil mereka “jinakkan”. Para profesor ekonomi di Universitas Gadjah Mada, misalnya, dicap Sukarno sebagai “textbook thinking” yang “tidak mengerti Revolusi”. Mereka bahkan dituduh reaksioner.

dalam posisi demikian, para profesor itu lalu dengan mudah menjadi sasaran empuk pengganggangan para mahasiswa kiri di Universitas Gadjah Mada.

Dalam bidang kebudayaan, sebagai akibat pelarangan **Manifes Kebudayaan**, misalnya, dosen dan kritikus sastra terkemuka Indonesia, dr. H.B. Jassin, terusir dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Yang juga jadi korban ialah penyair Taufiq Ismail. Sebagai dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), rencana keberangkatan Taufiq melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat “ditunda” oleh rektor hanya beberapa hari sebelum keberangkatannya. “Keputusan penundaan saya terima empat hari sebelum kami direncanakan berangkat. Tiket, visa, dan semua dokumen sudah di tangan,” kenang Taufiq Ismail, dokter hewan, penyair terkenal, dan salah seorang penanda tangan Manifes Kebudayaan. Taufiq Ismail akhirnya tidak pernah mendapat kesempatan melanjutkan studinya di Amerika.

Akibat tekanan bahkan pengejaran PKI dan kekuatan kiri lainnya, para seniman penanda tangan Manifes Kebudayaan, di Jakarta maupun di daerah-daerah, tidak bisa mengumumkan karya mereka dengan menggunakan nama sebenarnya.

Saya ingat penyair dan penulis esai Goenawan Mohamad, penyair Taufiq Ismail, kolumnis budaya dan politik Wiratmo Sukito, semua terpaksa menulis dengan menggunakan nama samaran. Buku-buku para seniman yang dituduh PKI sebagai Manikebuis dilarang beredar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang

waktu itu dipimpin Prof. Dr. Priyono. Sejatinya Priyono adalah orang Murba, tapi langkah-langkahnya waktu itu sulit dibedakan dari tingkah laku politik orang-orang Komunis. Mungkin karena itu dia mendapat bintang Stalin dari Moskow.



Aidit dan Sukarno di perayaan ulang tahun PKI.

Masih di sekitar kegiatan budaya, saya tidak pernah lupa malam renungan proklamasi yang diadakan para seniman Jakarta pada 16 Agustus 1965 di gedung Balai

Budaya, Jalan Gereja theresia, Jakarta Pusat.

Karena para seniman selalu menjadi sasaran serangan media-media Komunis dan kiri lainnya, pada acara malam renungan tersebut mereka hadir sebagai peserta pasif saja. Acara pertunjukan diisi dengan suatu sandiwara anak-anak muda dari Menteng dalam yang dibina oleh anak cabang **Lesbumi** (Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia) yang berafiliasi dengan nahdlatul ulama.

Gedung **Balai Budaya**—Jalan Gereja theresia, Menteng, Jakarta Pusat—adalah satu dari hanya beberapa arena kesenian di Jakarta sebelum Gubernur ali sadikin membangun Pusat Kesenian Jakarta, taman Ismail Marzuki, yang diresmikan pada 10 november 1968. Pada malam itu, para seniman senior Jakarta harus “menelan penghinaan” PKI dan kaum kiri lainnya yang memaksa mereka menerima suguhan pertunjukan yang sangat amatiran. Sandiwara yang dimainkan pada sebuah panggung darurat di depan gedung Balai Budaya itu membawakan kisah berjudul “Cengkau”. Cerita mengenai bahaya lintah darat itu dikarang dan dimainkan sendiri oleh anak-anak muda tersebut.

Di sekitar hari-hari itu juga, pelukis senior Zaini dan trisno sumardjo—keduanya penanda tangan Manifes Kebudayaan— memberanikan diri mengadakan pameran lukisan di Balai Budaya. Pameran tidak bisa berlangsung tenang sebab batubatu, yang entah dilemparkan dari arah mana dan oleh siapa, berjatuhan di atap seng gedung pameran. Waktu itu yang dicurigai melemparkan batu-batu tersebut ialah para anggota Pemuda rakyat.

Sebelum pembersihan kaum yang dilecehkan oleh golongan kiri sebagai “Manikebu”, pada 1962 Prof. Mochtar Kusuma atmaja sudah terlebih dahulu disingkirkan oleh Presiden Sukarno. Profesor yang ahli hukum laut itu kelak, beberapa kali, menjadi menteri pada kabinet Presiden Soeharto.

Mochtar dipecat hanya karena tuduhan dan hasutan para mahasiswa kiri di Universitas Padjadjaran (unpad) tempat Prof. Mochtar mengajar. Mochtar dituduh melecehkan Presiden Sukarno dan juru bicara Manipol usdek (ideologi demokrasi terpimpin), dr. Ruslan Abdulgani. Banyak saksi di Fakultas hukum unpad yang membantah Mochtar mengucapkan apa yang difitnahkan kepadanya. Tapi karena tekanan golongan kiri begitu hebat, Sukarno yang waktu itu berada di tokyo, tidak menunggu balik ke Jakarta sebelum memerintahkan pemecatan Prof. Mochtar.

SEMENTARA PENERBITAN LEGAL DARI PIHAK KOMUNIS DAN NONKOMUNIS DILARANG, di dalam masyarakat beredar luas pamflet-pamflet anti-Komunis yang tidak jelas sumbernya. Pamflet-pamflet anti-Komunis itu secara dramatis mengisahkan tindakan kejam penguasa Komunis di Uni Soviet, eropa timur, serta Tiongkok terhadap lawan-lawan politik mereka. Kisah pembantaian oleh Stalin serta pembuangan lawan-lawan politiknya ke siberia digambarkan dengan jelas dalam pamflet-pamflet tersebut.

Bacaan anti-Komunis ini sebenarnya sudah beredar

sejak awal orde Lama, yakni ketika Sukarno sudah terlihat melindungi PKI dengan memperkenalkan doktrin Nasakom. Tapi, arus deras penerbitan anti-Komunis menjadi-jadi sejak awal 1965. Seperti mengantisipasi bakal datangnya gerakan berdarah kaum Komunis, bacaan-bacaan itu berperan besar dan amat berhasil meningkatkan kewaspadaan bahkan ketakutan masyarakat terhadap bahaya dan ancaman Komunisme.[]

PATER BEEK, PASTOR JESUIT

Pada masa menjelang Gestapu itulah juga untuk pertama kalinya saya mendengar nama Pater Beek, seorang pastor Jesuit keturunan Belanda, yang aktif dalam gerakan bawah tanah melawan Komunis. Menjelang Gestapu saya mendengar dari Wiratmo Sukito, Pater Beek melarikan diri ke negeri Belanda karena dikejar oleh agen-agen intel Subandrio dari Badan Pusat Intelijen Indonesia (BPI).

Sebagai seorang Katolik, dan sama-sama melawan Komunis, Wiratmo memang mempunyai hubungan, bahkan besar kemungkinan bagian dari jaringan kegiatan Beek. Nama Pater tersebut beberapa kali saya dengar dari Wiratmo dalam hubungannya dengan kegiatan bawah tanah anti-Komunis waktu itu.

Di kemudian hari, Wiratmo Sukito menjelaskan bahwa Beek punya hubungan erat dengan CIA melalui Pater Laszlo Ladany, seorang pendeta Jesuit asal hongaria yang aktif dan berdomisili di Hong Kong sebagai pengamat Tiongkok (China Watcher).

Pekerjaan mengamati Tiongkok waktu itu adalah

kegiatan penting CIA dalam mengawasi perkembangan negeri tirai bambu tersebut. Pater Ladany adalah pendeta Katolik yang terusir dari Tiongkok ketika kaum Komunis berhasil mengusir rezim Koumintang pimpinan Chiang Kai Sek pada 1949. Fasih berbahasa Mandarin dan kenal Tiongkok dengan baik setelah bertahun-tahun tinggal di sana, Ladany memang berada dalam posisi yang strategis mengamati Cina. Keputusan CIA memanfaatkan Pater Jesuit tersebut adalah suatu kebijakan yang jitu.

Pater Beek ini juga, menurut Wiratmo di kemudian hari, merupakan salah seorang yang aktif membuat dan menyebarkan sejumlah bacaan anti-Komunis yang dananya ditengarai berasal dari Cia. Wiratmo Sukito sendiri, selain berhubungan dengan Pater Beek, juga banyak berhubungan dengan tentara, terutama dengan para perwira di sekitar Jenderal Nasution.

Nama Pater Beek ini kemudian di kalangan elite politik Indonesia sering menjadi bahan percakapan setelah Gestapu, yakni setelah bahaya Komunis berhasil dijauhkan dari Indonesia. Waktu itu Beek konon melihat hari depan Indonesia menghadapi pilihan antara dua setan, setan kecil dan setan besar. Kedua setan berwarna hijau: hijau Islam dan hijau militer. Terhadap “dua bahaya hijau” tersebut, Brian May, wartawan *Agence FrancePresse* dalam bukunya, *The Indonesian Tragedy* (1978) menulis,

Setelah kudeta gagal, elemen-elemen asing dalam kepemimpinan Katolik dengan cepat memutuskan siapa yang harus mereka dukung. Sebagaimana yang dikatakan salah seorang di antara mereka (dalam percakapan dengan penulis): “Dengan Komunis bukan lagi sebuah kekuatan, hanya tersisa dua kemungkinan

pemerintahan, Islam atau militer. Kami memilih tentara.”

Pater Beek [yang diwawancarai Brian May] melancarkan pengaruhnya terutama lewat orang-orang Katolik keturunan Tionghoa. Salah seorang di antara mereka adalah Lim Bian Kie [sekarang Jusuf Wanandi].

Jusuf Wanandi membantah penuturan Brian May. “hubungan kami dengan Islam sangat baik. Ketika HMI terus-menerus diserang PKI, PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) berdiri di garis depan membela organisasi mahasiswa Islam terbesar itu.” tapi, Wanandi mengakui berubahnya sikap Katolik kepada Islam terjadi di sekitar masa sidang MPRS 1968. Sejak waktu itu pihak Katolik cemas melihat gerak sejumlah parpol Islam yang kembali berbicara mengenai “Piagam Jakarta”, artinya ada usaha menjadikan Indonesia sebagai negara berdasarkan syariat Islam. Banyak yang melihat kecemasan warga Katolik tersebut dengan mudah memengaruhi kebijakan Islam pemerintahan Soeharto yang waktu itu sangat dekat dengan CSIS.





Josephus Gerardus Beek, atau lebih dikenal sebagai Pater Beek.

Pada masa itulah, seingat saya, tersebar fitnah terhadap Jenderal Nasution, Ketua MPRs waktu itu. Pendiri TNI dan Jenderal bintang empat pertama Indonesia itu dituduh sebagai anggota di (darul Islam) terselubung yang akan menggunakan kedudukannya di pimpinan MPRs untuk menjadikan Indonesia negara yang berdasarkan syariat Islam.

PULUHAN TAHUN KEMUDIAN, dari sejumlah tokoh Katolik, saya mendapat informasi betapa tidak solidnya golongan Katolik waktu itu. Pater Franz Magnis suseno, dalam wawancaranya dengan saya pada 19 april 2014, menjelaskan mengenai sejumlah petinggi Katolik yang berkeyakinan berbeda dengan Pater Beek dan para pengikutnya di CSIS. “Kelompok kami menyadari bahwa sebagai bagian dari golongan minoritas di Indonesia, Katolik tidak bisa mengambil sikap bermusuhan terhadap Islam.”

Masih mengenai Pater Beek, pada 2008, terbit buku *Pater Beek, SJ: Larut Tetapi Tidak Hanyut*. Penulis buku tersebut ialah J.B. Soedarmanta. Menurut penulis, pada 1961 para pastor dari Ordo Jesuit (Sj) bersepakat mendirikan suatu lembaga yang diberi nama **Biro Dokumentasi**. “Biro dokumentasi diharapkan dapat membantu umat Katolik untuk menghadapi perkembangan sosial dan politik masyarakat.”

Pater Beek adalah pemimpin biro dengan, antara lain, dr. Soedjati dijiwandono dan Kajat hartoyo, sebagai pembantunya. Harry Tjan silalahi dan Lim Bian Kie (kini

Jusuf Wanandi) juga aktif dalam biro tersebut. Lembaga pimpinan Pater Beek itu mengumpulkan bahan untuk menganalisis perkembangan situasi politik. Hasil kajian itu diedarkan ke berbagai kalangan anti-Komunis, seperti aktivis mahasiswa atau partai politik. Tapi, terutama para aktivis Katolik.

Dalam keadaan sibuk dan tegang menjelang dan setelah Gestapu, bisa dimengerti jika tidak banyak aktivis yang sempat berpikir secara sistematis, komprehensif, dan strategis. Di situlah hasil kerja kelompok Pater Beek memainkan peran penting. “Pidato-pidato Cosmas Batubara, sebagian besar disiapkan oleh biro pimpinan Pater Beek itu,” kata seorang mantan aktivis mahasiswa pada masa awal orde Baru. Cosmas adalah pimpinan PMKRI yang juga menonjol sebagai Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) pusat pada bulan-bulan awal pasca-Gestapu.

Lewat Wiratmo Sukito, saya sering membaca, bahkan ikut menyebarkan analisis-analisis dari kubu Pater Beek, yang tentu saja waktu itu saya tidak tahu sumbernya. Sebagai kegiatan rahasia, Wiratmo jelas tidak memberi tahu sumber analisis tersebut. Rahman Tolleng, seorang tokoh mahasiswa Bandung waktu itu, masih ingat Wiratmo Sukito dan Fikri Jufri—di kemudian hari menjadi Pemimpin umum majalah *Tempo*—tidak lama setelah Gestapu, pernah datang ke Bandung membawa bahan-bahan yang ditengarai sebagai bersumber pada Biro dokumentasi tersebut.[]

DARI BIRO DOKUMENTASI KE CSIS

Biro dokumentasi sebenarnya adalah semacam tanki pemikir (*thinktank*) golongan Katolik, jauh sebelum CSIS (Centre for Strategic and International Studies) didirikan. Bahkan, tidak terlalu salah menyimpulkan CSIS, lebih kurang, adalah kelanjutan Biro dokumentasi. Selain soedjati djiwandono, Jusuf Wanandi, dan Harry Tjan silalahi, sejumlah bekas anak buah Pater Beek di Biro dokumentasi kemudian melanjutkan kegiatan mereka di CSIS.

Menurut cerita Jusuf Wanandi dalam memoarnya, *Shades of Greys*, CSIS didirikan pada satu September 1971, setelah orang-orang Pater Beek itu tiba pada kesimpulan tidak akan mudah bagi Soeharto mengajak mereka ke dalam pemerintahan karena latar belakang etnis. Para peneliti dan pimpinan CSIS waktu itu memang kebanyakan terdiri dari keturunan tionghoa.

Lalu, bagaimana kami bisa berguna? Yang lebih dimungkinkan ialah bergiat sebagai tanki pemikir (*think-tank*). Pilihan demikian menempatkan kami dalam posisi terhormat dan mempunyai kebebasan. Kami pikir penting bagi sebuah pemerintahan baru mendapatkan gagasan-gagasan dari luar pemerintahan dalam mengatasi transisi. Kami pikir kelompok kami berada dalam posisi sempurna untuk bergiat sebagai tanki pemikir ... karena bagi Soeharto pada masa itu strategi adalah

melulu strategi militer tanpa masukan dari kalangan sipil. Kami punya pandangan lain. Tapi kami juga mengerti militer harus dilibatkan dalam usaha kami. Untuk patron, kami memilih perwira militer yang sanggup berpikir, seperti Ali Murtopo dan Soedjono Hoemardani. Merekalah yang menjadi pelindung tanki pemikir kami yang kami beri nama CSIS. Mereka bahkan meminta kami menjadi tanki pemikir pemerintah. Dukungan Pak Ali dan Pak Djono berhasil meyakinkan Soeharto menerima CSIS. Soeharto bahkan meminta kami menjadi tanki pemikir kepresidenan, suatu tawaran yang setelah kami pikirkan kami tolak Dukungan Pak Ali juga menjamin dana bukan masalah bagi CSIS. Kalau kami memerlukan dana, Pak Ali dan Pak Djono dengan segera menelepon cukong dan mengatakan kepada mereka, “Tolong Bantu”, ... hanya itulah yang kami perlukan dari mereka. Kami mendapat bantuan dana dan kantor. Kantor pertama kami di Jalan Kesehatan III/13 Jakarta Pusat adalah pemberian dari Pak Ali.

Namun, mantan Pangkopkamtib, Jenderal TNI Sumitro, dalam memoarnya, *Perjalanan Seorang Prajurit Pejuang dan Profesional*, menyebut nama Ali Murtopo sebagai pendiri CSIS. Menurut Jenderal Sumitro,

Dalam rangka mendukung Operasi Khususnya, dia mendirikan suatu lembaga *think-tank*, yang diberi nama Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Sampai sekarang lembaga itu masih ada. Karena aktivitasnya di bidang politik, CSIS mengesankan dirinya sebagai *king maker*, lembaga yang menentukan pejabat negara. Demikian pula *policy* pemerintah dikesankan datang dari CSIS. Entah maksudnya apa, Jenderal Ali saya tegur, karena telah melewati batas wewenangnya.

Cerita lain tentang asal-usul CSIS bersumber dari kubu Sudharmono yang selama belasan tahun dipercayai Soeharto menduduki kursi sekretaris negara, mengetuai Golkar, sebelum akhirnya diangkat menjadi Wakil Presiden. Salah seorang “kader” Sudharmono adalah

Ginandjar Kartasasmita yang di kemudian hari berkali-kali menjadi menteri, dan survive hingga masa reformasi. dalam bukunya *Managing Indonesia's Transformation*, Ginandjar Kartasasmita bercerita,

CSIS didirikan sebagai tanki pemikir (*think-tank*) untuk kelompok Opsus (Operasi Khusus). Pendiri dan pengurusnya sebagian besar adalah intelektual Katolik dan keturunan Tionghoa dengan dukungan keuangan dari para pengusaha Tionghoa yang masa itu sangat bergantung pada proyekproyek pemerintah dan izin usaha. Masa itu Ali Murtopo secara politik sangat dekat dengan Soeharto. Sudharmono lebih dekat Soeharto secara administratif. Ali Murtopo dan Sudjono Humardani, asisten pribadi [*aspri*] Soeharto yang amat dekat dengan sang Presiden. Lewat Murtopo dan Humardani, Wanandi bersaudara—Yusuf dan Sofyan Wanandi—dan pengusaha Tionghoa lainnya menjadi sangat berpengaruh.

Soal siapa yang sebenarnya mendirikan CSIS bagi saya tidak terlalu prinsipil. Yang jelas CSIS tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan Beek sebelumnya, Soeharto pada awal orde Baru dan Ali Murtopo. Sejarah mencatat peran penting CSIS pada awal orde Baru. Maka, pertanyaan yang sebenarnya tidak kurang penting, siapa yang diuntungkan oleh lembaga kajian tersebut?

Harry Tjan, Jusuf Wanandi, dan Pater Beek sudah menjalankan fungsi *thinktank* sejak berdirinya **Biro Dokumentasi Katolik** pimpinan sang Pater. Selepas Gestapu, Ali Murtopo memerlukan *thinktank* untuk membantu Presiden Soeharto, sekalian untuk makin memberdayakan dirinya sebagai seorang Jenderal yang berambisi politik besar. Pada saat yang sama, kelompok tionghoa Katolik yang mulai bergiat pada Biro

dokumentasi juga melihat peluang berperan dengan memanfaatkan Soeharto secara langsung maupun lewat Ali Murtopo dan sudjono humardani. Para pengusaha tionghoa yang memerlukan kontrak-kontrak dan perlindungan kekuasaan juga mendapat keuntungan. Walhasil, berbagai pihak yang punya kepentingan dan berkemungkinan mendapat keuntungan secara bersama menggunakan CSIS.



Dari kiri: Sofyan Wanandi, Ali Murtopo, Jusuf Wanandi, dan Soehardi di Badan Pemenangan Pemilu Golkar, Jakarta, 1971.

Ali Murtopo waktu itu bukan saja memanfaatkan CSIS, melainkan dia juga pemimpin opus, sebuah badan intelijen tidak resmi yang semula dibentuk dalam rangka

mencapai perdamaian dengan Malaysia. Pada masa awal orde Baru, opsus banyak terlibat *black operations*. Kecaman banyak orang waktu itu terhadap CSIS adalah tidak jelasnya garis pemisah antara lembaga *thinktank* itu dan kegiatan *black operations* opsus yang melibatkan sejumlah orang CSIS.

Saya sendiri berpendapat, CSIS waktu itu adalah sebuah lembaga dengan dua bagian. Satu bagian sibuk pada kegiatan penelitian, sibuk membuat konsep-konsep politik untuk orde Baru, sedangkan yang lainnya bergiat dalam operasi politik dan intelijen bekerja sama dengan opsus.

Akan tetapi, dalam wawancaranya dengan saya pada 19 Maret 2014, Jusuf Wanandi membantah adanya hubungan antara opsus dengan CSIS. “opsus bubar setelah soal konfrontasi dengan Malaysia selesai pada 1966, sementara CSIS berdiri pada 1971. Tidak ada hubungannya sama sekali,” kata Jusuf Wanandi. Sumber lain menunjukkan, adalah Jenderal TNI L.B. Moerdani yang kemudian membubarkan opsus pada 1984, yakni setelah setahun Moerdani menduduki kursi Pangkopkamtib dan Panglima ABRI. hampir semua elite politik Jakarta percaya pembubaran opsus dilakukan Moerdani atas perintah Soeharto.

Kegiatan operasi politik orang-orang CSIS menurut Wanandi mereka lakukan dari kedudukan sebagai pembantu Ali Murtopo dalam membangun Golkar yang diputuskan militer untuk dipakai sebagai “partai” dengan tugas utama menduduki kursi-kursi dPr dan Majelis

Permusyawaratan rakyat (MPR).

Pada masa awal rezim Soeharto tidak gampang membedakan orang CSIS yang murni peneliti dan siapa saja di antara mereka yang bergiat sebagai pembantu Ali Murtopo dalam kerja intelijen dan operasi politik. Inilah penjelasannya mengapa ketika Ali Murtopo dan sudjono humardani menjadi sasaran permusuhan di sekitar hari-hari kerusuhan Malari, Januari 1974, CSIS juga sulit menghindari dari serangan.

KEMBALI KEPADA SUASANA MENJELANG GESTAPU, pada empat Februari 1965, pengarang novel Iwan simatupang yang masa itu menetap di hotel salak—terletak di depan Istana Bogor—menggambarkan keadaan masyarakat hari-hari itu kepada temannya, Bambang sularto, seorang pengarang di semarang. Menurut Iwan, dalam sepucuk suratnya kepada sularto,

Suatu psikose menjalar kini di seluruh Nusantara: bila persis PKI mau *coup*? Aidit boleh seribu kali membantah, rakyat dan AB [Angkatan Bersenjata] kita makin teringat kepada Madiun. Dan Aidit secara seratus persen sudah pula menggertak.

Bila pada 1948, PKI dengan anggotanya yang cuma 100.000 orang bisa bikin korban begitu banyak sudah, bagaimana dengan PKI sekarang yang sudah punya anggota Tiga juta (resmi)? Secara aljabar kelas 1 SMP tentu seramnya bakal lebih Tiga puluh kali. Jadi, mayat yang akan bergelempangan akan berjumlah Tiga puluh kali; darah kering di gedung-gedung pembantaian (yang mungkin juga nantinya bakal mereka sebut *Marx House*) tebalnya Tiga puluh kali dari darah kering yang ditemukan di ubin *Marx House* di Madiun tempo dulu.

Semua gambaran seperti ini memang seram, Larto! Dan memang, bukan tak punya alasan rakyat kita untuk mengengankan kembali Madiun di tingkat politik seperti ini di

Tanah Air kita.

BERPERAN PENTING MEMPERPANAS SUHU POLITIK ADALAH SUBANDRIO, Wakil Perdana Menteri (Waperdam), Menteri Luar negeri, dan juga Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI). Pada Januari 1965, pejabat tinggi dan pembantu dekat Sukarno itu dikutip luas oleh pers sebagaimana mengatakan, pada 1965 itu mungkin akan terjadi keadaan yang menyebabkan kawan jadi lawan. “Kita mungkin akan terpaksa berpisah dengan sahabat-sahabat pribadi dan *comrades in arms*.” Pernyataan Subandrio mendapat perhatian publik politik karena posisinya sebagai pemimpin BPI di samping pembesar yang paling dekat dengan Sukarno.

Dari kedudukannya sebagai pemimpin intel itulah, Subandrio memanfaatkan dokumen Gilchrist untuk secara tidak langsung membuat Sukarno makin cemas dan makin takut kepada Angkatan Darat. Adalah Subandrio yang mengumumkan adanya dokumen tersebut di Kairo lewat koran utama Mesir, *Al Akhram*. Sukarno dan Subandrio bersama sejumlah pejabat tinggi Indonesia memang tertahan di Kairo selama beberapa hari karena rencana pertemuan asia-afrika gagal diadakan di aljazair sebagai akibat terjadinya kudeta militer Kolonel Khuari Boumidienne yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Presiden Ben Bella.

Di kemudian hari, yakni setelah Gestapu, beredar analisis bahwa yang jadi sasaran Subandrio sebenarnya adalah pimpinan Angkatan Darat yang waktu itu memang tidak secara serius melaksanakan perintah Sukarno

menjalankan konfrontasi dengan Malaysia. “Ketidakseriusan” itulah, antara lain, yang dijadikan bukti dan alasan Presiden Sukarno menuduh pimpinan Angkatan Darat sebagai “tidak loyal kepada Pemimpin Besar Revolusi”.

Konfrontasi dengan Malaysia diumumkan Indonesia pada 16 September 1963. Menurut Malcolm Caldwell dan Ernst Utrecht dalam buku bersama mereka, *Sejarah Alternatif Indonesia* (1979), pemrakarsa konfrontasi adalah Menteri Luar negeri Subandrio. Tentang tokoh Subandrio, Caldwell dan Utrecht menulis lebih jauh,

Orang tidak dapat menghindari kesimpulan bahwa usaha Soebandrio diilhami keinginan untuk menaikkan gengsi pribadinya. Soebandrio berada di kancah politik bersama Sukarno selama bertahun-tahun dan diketahui secara luas sebagai seorang yang merasa diri sebagai pewaris kepresidenan.

ADAPUN MENGENAL TUDUHAN “tidak loyal” sehubungan dengan soal ganyang Malaysia sebagai pelaksanaan program anti-nekolim Sukarno, Jusuf Wanandi sebagai orang dekat Benny Moerdani [di kemudian hari menjabat Panglima ABRI] dan Ali Murtopo, dalam memoarnya ada bercerita mengenai sebuah pertemuan penting antara Panglima Angkatan Darat, Letjen TNI Yani, dengan Pangkostrad, Mayjen TNI Soeharto pada pertengahan 1965. dikisahkan oleh Wanandi—mengaku mendengarkan cerita itu dari Ali Murtopo dan Benny Moerdani, yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut—Yani menyampaikan kecemasannya mengenai konfrontasi.

Panglima Angkatan Darat itu menjelaskan, sebagian besar pasukan Angkatan Darat berada di Kalimantan utara—dalam rangka konfrontasi—sehingga tidak ada cukup pasukan di Pulau Jawa kalau PKI mengadakan perebutan kekuasaan. untuk tujuan itulah, Yani mengaku mempertahankan pasukan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) di Karang Menjangan, solo, dan Cijantung di Jakarta. “saya tidak ingin RPKAD terlibat dalam konfrontasi,” kata Yani. “saya tidak punya pasukan lain,” tambahnya.

Pada saat itulah, Ali Murtopo, mantan anak buah Yani di Banteng raiders, Komando daerah Militer (Kodam) Diponegoro, angkat bicara. “Pak Yani, saya ingin bertanya, kenapa konfrontasi itu terus dijalankan kalau Bapak sudah tahu itu akan merusak kita? Kenapa Bapak tidak menghentikannya saja?” Jawab Yani, “Kalau tergantung saya, akan segera saya hentikan, tapi Bung Karno yang memulainya.” Ali Murtopo lalu berkata, “Kita harus mencoba mengakhirinya. Kenapa kita harus saling bunuhbunuhan dan nanti berhadapan dengan Cina?” Yani tampaknya sepakat dengan tekad Murtopo. “tapi, siapa yang akan melakukannya?” dengan yakin Murtopo menjawab, “serahkan kepada saya.” Menurut Jusuf Wanandi, dengan restu Yani, Murtopo memulai geraknya dengan membentuk opsus (operasi Khusus) dengan tugas merintis perdamaian dengan Malaysia.

Yang tidak diceritakan Wanandi adalah peran Soeharto dalam pertemuan tersebut. Apakah Murtopo sebagai bawahan Soeharto bisa dibayangkan berbicara

dengan Yani sembari menyepelkan Panglimanya yang hadir di situ? apakah Yani hanya berdialog dengan Murtopo mengenai hal penting itu tanpa melibatkan Soeharto yang ada dalam ruangan? Bahwa kemudian Soeharto berperan penting mengakhiri konfrontasi, hal demikian sudah tercatat dalam sejarah.

Yang kurang masuk akal bagi saya ialah jalannya pembicaraan ketika kesepakatan memboikot konfrontasi itu diputuskan. Terkesan peran Murtopo dilebih-lebihkan oleh Wanandi. Tapi, ada atau tidaknya percakapan Yani dengan Murtopo, keputusan dan adanya kenyataan pemboikotan Angkatan Darat terhadap konfrontasi adalah bukti yang cukup bagi Sukarno untuk berkesimpulan bahwa pimpinan Angkatan Darat “tidak loyal” menjalankan perintah Panglima tertinggi dan Pemimpin Besar Revolusi.

Beberapa hari sebelum operasi Gestapu, pada 13 September, lewat sebuah pidatonya di Istana, Sukarno menyerang tentara tanpa menyebut nama. Pada pidato di depan gubernur se-Indonesia itu, Sukarno, untuk kesekian kalinya, berbicara tentang adanya “anak-anak Revolusi” yang tidak loyal kepada Pemimpin Besar Revolusi.

Menurut kesaksian seorang wartawan senior pada masa itu, selain Sukarno, praktis sepanjang September 1965, PKI juga menyerang secara makin berani lawan-lawan politiknya, tidak terkecuali terhadap Angkatan Darat. untuk menunjukkan dukungannya kepada Pemimpin Besar Revolusi, media-media PKI ikut melancarkan kampanye terhadap kelompok yang dituduh

tidak loyal kepada Sukarno. *Harian Rakjat*, koran resmi PKI edisi empat September bahkan secara terang-terangan menuduh para perwira Angkatan Darat melancarkan taktik “maling teriak maling” dengan memfitnah PKI sebagai sedang merencanakan sebuah kudeta.[]

IBU PERTIWI HAMIL TUA

Tidak kurang penting untuk dicatat ialah pernyataan Anwar Sanusi, seorang tokoh penting PKI, beberapa hari sebelum satu Oktober 1965. Anwar Sanusi menggambarkan dengan baik keadaan waktu itu. Katanya, “Ibu pertiwi sudah hamil tua.” dari perut ibu pertiwi itu, katanya pula, bakal lahir satu kekuatan baru lewat sebuah Revolusi. Pernyataan Anwar Sanusi tersebut kemudian, beberapa hari setelah satu Oktober, dijadikan salah satu bukti yang menunjukkan PKI merencanakan Gestapu.

Yang juga ditafsirkan sebagai salah satu bukti bahwa PKI tahu sebelumnya dan bahkan merencanakan Gestapu ialah pojok edisi akhir pekan *Harian Rakjat* yang beredar sabtu, dua Oktober, dan diperkirakan dicetak sebelum Gestapu. Pada pojok itu terbaca:

Makan tak enak Tidur tidak njenjak Nasi dimakan serasa sekam Air diminum serasa duri Siang djadi angan-angan Malam djadi buah mimpi Teringat tjelaka badan diri, Bukan salah bunda mengandung Salah anak buruk pinta Sudahlah nasib akan digantung Djadi si laknat setan kota

KETIDAKPASTIAN DAN KETIDAKJELASAN POSISI serta

keberadaan Presiden Sukarno pada satu Oktober pagi itu ikut menimbulkan dan menambah kecemasan dan ketidakpastian pada banyak perwira Angkatan Darat, terutama mereka yang dulu pernah mengalami peristiwa berdarah pemberontakan Komunis di Madiun pada 1948 dan reaksi keras serta tegas Sukarno kepada Muso, pimpinan PKI waktu itu. Tapi, sampai menjelang petang tidak terdengar sikap Sukarno terhadap pembantaian para Jenderal. Pemimpin Besar Revolusi malah menyibukkan diri mencari pengganti Panglima Angkatan Darat yang hilang.

Sukarno sama sekali tidak memikirkan nasib Yani dan temantemannya yang jelas telah dibantai oleh kekuatan kiri di kalangan TNI. di Kostrad mulai beredar dua analisis tentang Sukarno, Pemimpin Besar Revolusi itu tidak bebas, menjadi sandera para pembunuh atau justru memihak pembunuh para Jenderal. Jenderal Nasution adalah pembesar TNI yang sejak satu Oktober mencurigai Sukarno sebagai berada dalam kubu Gestapu.

Saking cemas dan paniknya, Kolonel Komar—anak buah Soegandhi yang dulu ikut bertempur merebut kembali Madiun dan bos saya pada media tempat saya bekerja—mengajak saya dan beberapa anggota staf SAB ke rumahnya di Jalan Kemiri, Menteng. Tidak jauh dari markas Kostrad. di sana kami bersama membongkar gudang senjata koleksinya. Kembali ke Kostrad kami sudah dalam keadaan bersenjata.

Meski waktu itu saya belum pernah berlatih menembak, bahkan belum pernah pegang senjata, saya

toh sebagian *jungle rifle*. Senapan bekas Perang dunia II yang bentuknya artistik itu saya sandang sembari mondar-mandir di kompleks Kostrad. Lucunya, tak seorang tentara pun menegur saya. Suasana betulbetul seperti akan ada perang. Setiap orang cemas. Tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Belum ketahuan dengan pasti siapa lawan, siapa kawan. Siap dengan senjata waktu itu tampaknya dianggap cara terbaik menghadapi segala kemungkinan.

Beberapa hari kemudian saya mendapat informasi dipersenjatainya sejumlah mahasiswa anti-Komunis pada sore hari itu. Ini adalah cara menghadapi kemungkinan serangan dari anggota Pemuda rakyat yang dipercayai sebagian cukup banyak memang sudah mengikuti latihan militer di daerah Lubang Buaya. Sejumlah pemuda kiri telah pula dilibatkan dalam operasi pada satu Oktober subuh.

MENJELANG SORE PASUKAN RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo muncul di halaman Kostrad. Sebelum matahari terbenam, pasukan RPKAD di lapangan, lewat radio, sudah melaporkan keberhasilan mereka merebut dan menguasai kembali gedung telkom dan studio pusat radio Republik Indonesia (rri), keduanya terletak di sekitar lapangan Monumen Nasional (Monas), berseberangan dengan markas Kostrad. dua orang Jenderal yang bertanggung jawab urusan penerangan, Brigjen TNI Soegandhi dan Brigjen TNI Ibnu subroto (Kepala Penerangan Angkatan Darat) segera bersiap-siap

berangkat dengan truk RPKAD ke RRI.

Saya diajak ikut oleh Soegandhi sebab dianggap tahu selukbeluk studio RRI. Saya dulu memang pernah magang di sana. Cita-cita saya bekerja di RRI ialah menjadi reporter radio seperti Darmosugondo yang sangat terkenal waktu itu. Tapi kemudian saya dipecat dengan tuduhan ikut Manikebu.

Kesalahan saya sebenarnya bukan karena ikut “Manikebu”. Saya tidak pernah menandatangani dokumen macam apa saja yang PKI sebut sebagai “Manikebu” itu. Para penggagas Manifes Kebudayaan adalah seniman-seniman senior yang semuanya saya kenal baik. Tapi, saya masih sangat junior waktu itu. Kesalahan saya ialah karena dianggap anak buah Wiratmo, Kepala siaran Kata RRI, sponsor saya bekerja di studio milik pemerintah tersebut. Wiratmo memang adalah konseptor utama Manifes Kebudayaan. dan karena Wiratmo dipecat, saya ikut juga ditendang keluar.

Sebelum berangkat, saya usulkan agar rombongan membawa serta Darmosugondo, reporter senior RRI yang selalu melaporkan dan mengomentari acara-acara Presiden Sukarno. Alasan mengajak itu saya jelaskan dan diterima dengan baik. “Kau tahu rumahnya?” tanya Soegandhi kepada saya. “tidak jauh dari rumah Bapak,” jawab saya. “Jemput sana,” kata atasan saya itu. dengan mobil sedan holden milik Kolonel djoko Basuki, asisten III Pangkostrad, saya berangkat menjemput darmosugondo. “eh, itu senjatanya ditinggalkan saja dulu,” kata seorang perwira.

Saya berhasil membawa Darmosugondo ke Kostrad dalam waktu yang singkat. Jarak Kostrad dengan rumah darmosugondo hanya sekitar lima kilometer. Kota sepi, perjalanan lancar tanpa hambatan apa pun. Jakarta memang belum berkenalan dengan penyakit macet masa itu. Sepanjang jalan, wartawan senior itu kelihatan sangat ketakutan. “saya mau diapakan?” tanyanya.

Saya jelaskan, nasib Bung Karno belum diketahui orang banyak. “dengan mendengar suara Pak darmo, yang selalu mengomentari pidato Bung Karno, pendengar akan lebih mudah diyakinkan bahwa Pemimpin Besar Revolusi baik-baik saja.” Penjelasan itu bersumber pada salah satu teori yang baru saja saya pelajari sebagai mahasiswa psikologi. Teori itu, kalau saya tidak salah ingat, dikenal sebagai teori asosiasi. Kalau dengar suara Darmosugondo, orang akan teringat Bung Karno.

Namun, ketika saya tiba kembali di Kostrad rupanya para Jenderal itu sudah punya pertimbangan lain. Mereka tidak lagi perlu Darmosugondo. dan sejak itu, seingat saya, suara reporter senior RRI itu tidak pernah terdengar lagi. di Markas Kostrad, saya menerima kembali senjata panjang saya. Tapi ketika akan naik truk untuk menuju RRI, seorang perwira berteriak kepada saya, “eh, jangan bawa itu,” sambil menunjuk senapan yang saya sandang. dan *jungle* saya lalu ditukar dengan pistol yang saya juga belum tahu bagaimana menggunakannya.

Dari Kostrad, truk RPKAD yang kami tumpangi berjalan perlahan menuju studio pusat RRI dengan memotong lapangan Monas yang masih dalam proses

penyelesaian. di tengah perjalanan, Mayor Jusuf sirath, salah seorang anak buah Soegandhi, meloncat dari truk dan berjalan kaki sembari merunduk bersama pasukan yang mengawal truk. “saya takut peluru nyasar,” katanya menjelaskan keputusannya turun dan memilih berjalan kaki.[]

MENJADI KIRI UNTUK CARI SELAMAT

Di studio RRI ternyata tidak banyak yang masih harus saya lakukan. Pegawai Siaran Angkatan Bersenjata (SIAB), salah satu acara tetap RRI yang dikelola anak buah Brigjen Soegandhi, telah memainkan peran sebagai *guide* bagi tentara yang lebih dahulu telah menduduki studio radio tersebut. Jadi saya jalan-jalan saja sembari mengajak ngobrol pegawai-pegawai RRI yang sebagian besar memang sudah saya kenal. Tidak mudah. Teman-teman lama saya itu pada ketakutan, meski tidak terjadi kekerasan dalam pengambilalihan gedung studio yang terletak di Jalan Merdeka Barat itu.

Salah seorang yang sangat ketakutan ialah Hamid Ismail. Menurut cerita teman-teman ketika saya masih magang, Hamid tadinya adalah orang Masyumi. Tapi untuk mempertahankan kedudukannya di RRI setelah partainya dibubarkan, dia secara berangsur berubah bersikap dan bicara layaknya seorang Revolusioner yang makin lama makin sulit dibedakan dari orang-orang kiri lainnya. Fenomena kiri mendadak seperti itu memang banyak terjadi di penghujung masa orde Lama. orang-orang ini sebenarnya menjadi kiri sekadar untuk cari selamat saja.

Menjadi kiri dan Sukarnois mendadak adalah mode

survival pada masa itu. Karena itu, tidak selalu mudah membedakan mereka yang Revolusioner mendadak, yang Sukarno, dan yang Komunis. Tapi, orang seperti Hamid Ismail dan banyak lagi pencari selamat lainnya, akhirnya jadi korban pembersihan pasca-Gestapu. Saya tidak tahu persis nasib Hamid. Setelah Gestapu, dia hilang begitu saja. Tidak jelas apa dia ditangkap atau “menghilangkan diri” agar terhindar dari pembersihan. Pokoknya, setahu saya, dia tidak beredar lagi di RRI.

KETIKA SOEGANDHI SEDANG memberikan taklimat kepada para petinggi RRI di ruang depan studio, saya kebetulan berdiri di samping Brigjen TNI Ibnu subroto. Saya teringat sesuatu dan spontan saja membisikkan hal itu ke telinga Pak Ibnu. Jenderal Ibnu subroto segera saja menginterupsi Soegandhi. “eh, itu lagu ‘nasakom Bersatu’ tidak usah diperdengarkan lagi.” sejak itu lagu ciptaan komponis Lekra, subronto K. Atmodjo itu, tidak terdengar lagi di Indonesia.

Pasukan RPKAD yang merebut RRI itu berada di bawah komando Letnan dua Sintong Panjaitan, komandan peleton dari Kompi Feisal Tanjung. Saya mengenal secara pribadi perwira para komando tersebut kelak setelah dia berpangkat Mayor Jenderal.

Ketika Sintong dan pasukan Baret Merah tiba di RRI, orang-orang Gestapu memang sudah pada pergi. Itulah penjelasannya mengapa pengambilalihan studio pusat RRI tidak perlu menggunakan kekerasan. Yang lucu, rekaman pengumuman Gestapu ternyata masih terus disiarkan.

Pegawai RRI takut menghentikannya, sementara Sintong dan anak buahnya tidak memperhatikannya. Akibatnya, para Jenderal di Markas Kostrad bingung ketika mendapat laporan dari lapangan, RRI telah dikuasai. “Bagaimana dikuasai? Itu siaran mereka masih terus terdengar.” teriak Kolonel Sarwo Edhie lewat radio, dari halaman Kostrad.

Barulah Sintong sadar dan segera memerintahkan penghentian pemutaran rekaman tersebut. Lain cerita pengambilalihan gedung telkom di Jalan Merdeka selatan. Anggota Pemuda rakyat (Pr)—dipersenjatai untuk ikut menjaga pusat telekomunikasi tersebut—sempat melakukan perlawanan. Tentu saja dengan mudah mereka dilumpuhkan oleh anak buah Sarwo Edhie.

MALAM ITU, SAYA TIDUR di kantor staf Angkatan Bersenjata (SAB) yang terletak hanya beberapa ratus meter dari gedung RRI. Gedung itu sekarang merupakan bagian belakang dari Kementerian Pertahanan, berseberangan dengan kantor Menko Hankam KSAB, Jenderal Nasution waktu itu, dan kini kantor Menteri Pertahanan. Komandan detasemen Markas waktu itu ialah Brigjen TNI H.V. Worang yang di kemudian hari pernah menjadi Gubernur Sulawesi Utara.

Kami nyaris tidak mungkin tidur, sebab selain karena kami hanya bergeletakan di teras depan pintu keluar gedung belakang tanpa alas, para Jenderal dan Kolonel itu juga menghabiskan waktu ngobrol sembari memantau perkembangan dengan menggunakan radio militer.

Sebagai wartawan muda, saya tertarik pada obrolan

berdasar pengalaman para perwira yang berjuang sebagai militer sejak awal zaman Revolusi. dari cerita-cerita mereka itulah, saya dengar lebih jauh tentang pemberontakan PKI di Madiun (1948) serta pengalaman para perwira itu menumpasnya. Juga ada yang bercerita mengenai bagaimana Sukarno yang berjanji memimpin perang gerilya kalau Yogyakarta diserang, akhirnya malah memilih menyerah kepada Belanda pada 19 Desember 1948.

Para perwira yang bergerilya bersama Panglima Besar sudirman pada umumnya anak-anak muda yang sebagian besar berumur di sekitar 20 tahun. Waktu itu mereka terlalu muda untuk mengerti politik. Yang mereka tahu Sukarno dan Hatta pernah berjanji akan ikut bergerilya jika Yogyakarta diserbu Belanda. Mereka juga tahu bahwa ketika pemerintah Prancis menyerah kepada Jerman pada awal Perang dunia II, tentaranya otomatis ikut menyerah. Tapi, TNI menolak menyerah meski Presiden Sukarno dan pemerintahan sipil sudah menyerah. Mereka bahkan telah menyiapkan rencana perang gerilya jika Belanda menyerang dan menduduki Yogyakarta.

Sudirman, Panglima Besar, yang sedang menjalani penyembuhan dari sakitnya secara tegas menolak nasihat Presiden Sukarno untuk tetap berada di dalam kota agar bisa dirawat oleh tentara Belanda. Tindakan menyerah tersebut mereka anggap melanggar sumpah tentara, “tidak mengenal menyerah.” dan karena Sukarno adalah juga Panglima tertinggi (ditandai dengan pakaian militer lengkap dengan bintang empat di pundak), maka

keputusan menyerah itu mereka anggap sebagai suatu pelanggaran sumpah, suatu pengkhianatan. Itulah salah satu akar dan cikal bakal konflik berkepanjangan antara tentara—khususnya Angkatan Darat—dengan Sukarno yang menerobos waktu hingga jatuhnya sang Presiden pertama tersebut.

Yang waktu itu tidak disadari para perwira TNI tersebut, keputusan Sukarno tidak ikut bergerilya bukanlah suatu keputusan pribadi, melainkan hasil rapat kabinet yang menghasilkan keputusan berdasarkan pemungutan suara. Janji Sukarno memimpin gerilya juga seharusnya dilihat sebagai lebih merupakan suatu trik politik menggertak Belanda dan sama sekali tidak dimaksudkan sebagai janji kepada pasukan TNI.

Namun, apa boleh buat, pengertian dan tafsiran para perwira muda usia tersebut terhadap keputusan para pemimpin politik masa itu memasuki sejarah dan mengendap di sana tanpa pernah mengalami re-evaluasi. Akibatnya, sikap merendahkan kekuatan politik sipil kemudian mewarnai dengan pekat pola pikir dan cara pandang militer Indonesia.

Bagi anak muda seusia saya waktu itu, cerita-cerita dari masa lalu tersebut tergolong hal baru yang sebelumnya tidak pernah saya dengar. Sejak kebangkitan kembali PKI ditandai oleh suksesnya sebagai satu dari empat besar partai pemenang Pemilu 1955, wacana mengenai pemberontakan Komunis di Madiun tidak lagi terdengar. Bukan saja menyangkal berontak di Madiun, PKI malah menuduh Bung Hatta sebagai provokator yang

menyebabkan terjadinya pemberontakan Komunis tersebut. PKI makin aman setelah Presiden Sukarno menggunakan doktrin Nasakom melindungi kaum Komunis tersebut.

Tidak berlebihan untuk mengatakan, pengalaman dan informasi yang saya dapatkan malam itu kelak ikut berperan penting mendorong saya menjadi peneliti peran politik militer Indonesia. Terutama ketika di kemudian hari tentara sudah dengan sempurna menguasai panggung politik Indonesia.

DALAM KEADAAN KURANG TIDUR, PAGI HARI dua Oktober saya ikut Brigjen Soegandhi ke kompleks Gelora Bung Karno, senayan. Sejak semalam beberapa gedung di perkampungan atlet interNasional, gelanggang olahraga bekas tempat penyelenggaraan asian Games dan Ganefo (di tempat itu sekarang berdiri Plaza Senayan dan beberapa apartemen) memang difungsikan sebagai markas komando darurat Kostrad.

Pasalnya, pada malam hari ada informasi, Angkatan Udara kemungkinan akan mengebom Kostrad. Menurut Brigjen Supardjo kemudian, dialah yang punya gagasan mengebom Kostrad, dan soal itu dibicarakannya dengan Omar Dani di Pangkalan udara Halim Perdanakusuma. di kemudian hari, Marsekal Muda TNI Suyitno Sukirno, Panglima Komando Pertahanan udara waktu itu, mengungkapkan adanya perintah kepadanya pada malam itu agar menyiapkan dua pesawat MiG 17 untuk “menggempur mereka yang anti-nasakom”.

Ada kemungkinan perintah itu berasal dari Leo Wattimena yang malam itu selama enam jam terbang berkeliling-keliling dengan pesawat hercules bersama Omar Dani sebelum akhirnya mendarat di Madiun pagi harinya. Pangkalan udara Abdurrahman Saleh di Malang juga mendapat perintah mengirim pesawat pengebom ke Jakarta.

Di tengah jalan, sebagian pesawat dari Malang itu dialihkan ke Bandung oleh Kolonel udara Penerbang ashadi Cahyadi, Komandan Pangkalan udara husein sastranegara di Bandung. Yang sempat mendarat di Halim Perdanakusuma menjadi sasaran pengempesan ban oleh para prajurit RPKAD yang memasuki pangkalan udara itu keesokan paginya.

Mendapat laporan pangkalan Halim Perdanakusuma akan diserang oleh Kostrad dan RPKAD, dari pesawat hercules, Leo Wattimena mengirimkan pesan keras kepada Pangkostrad agar jangan menduduki halim. “akan kami hadapi,” ancamnya, kalau Pangkalan Halim Perdanakusuma diganggu. Ancaman itu disesali oleh Omar Dani di kemudian hari sebagaimana yang dikemukakan mantan Pangau itu dalam pembelaannya di depan Mahmillub.

Di bawah perintah Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto, pangkalan Halim Perdanakusuma diserang RPKAD. Karena pimpinan Angkatan Udara yang ada di Halim Perdanakusuma bertekad menghindari korban, pasukan RPKAD dibiarkan masuk begitu saja. Tak terjadi sesuatu yang dramatis selain pengempesan ban pesawat

yang parkir di sana dan seorang bintang Angkatan Udara tertembak karena salah pengertian.[]

“MANFAATKAN PERINTAH PANGTI!”

Merasa kurang aman di Senayan, siangya Markas Kostrad beralih lagi ke kompleks Pusat Pendidikan departemen sosial yang terletak di tepi perkebunan karet di Kelurahan Gandaria selatan. Kompleks itu kini terletak di pertigaan Jalan radio dalam dan Jalan Haji Nawi.

Dari markas darurat itulah Soeharto berangkat ke Bogor, pada dua Oktober memenuhi panggilan Presiden Sukarno. Itu adalah pertemuan pertama Soeharto dengan Sukarno sejak meletusnya Gestapu. Daud sinyal—terakhir wartawan senior koran **Sinar Harapan**—waktu itu anggota tim juru bicara Menko Hankam/KasaB, bertugas di Markas darurat Kostrad tersebut. Berikut ini kutipan dari catatan Daud sinyal mengenai kegiatan di sana hari itu:

Soeharto berangkat ke Bogor dengan pengawalan sejumlah panser, dan baru kembali menjelang malam. Para Jenderal segera berkumpul di sebuah ruangan untuk mendengar laporan tentang pertemuan Bogor itu.

Untuk diketahui, kompleks Pusdik Depsos itu terdiri dari sejumlah bangunan berwujud sekolahan dengan ruang-ruang kelasnya. Jendela-jendelanya dibiarkan terbuka, tapi karena tingkapnya cukup tinggi, orang di luar tidak bisa melongok ke dalam. Percakapan di dalam tidak bisa terdengar, dengungnya saja yang terpantul keluar. Namun, ada satu suara yang cukup jelas terdengar. Bunyinya, “Manfaatkan perintah Pangti!” Itu adalah logat Bataknya Jenderal Nasution.

Perintah kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban memang diberikan Sukarno hanya secara lisan. Beberapa jam setelah pertemuan Bogor itu, Presiden Sukarno merekam sebuah pidato radio yang disiarkan oleh RRI pusat pada Tiga Oktober pukul 1.30 pagi. Lewat pidato singkat itu Sukarno menjelaskan,

Pimpinan Angkatan Darat pada dewasa ini berada langsung dalam tangan saya dan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat sementara saya tunjuk Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra, Asisten III Menpangad. Untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang bersangkutan dengan peristiwa 30 September tersebut telah saya tunjuk Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad sesuai dengan kebijaksanaan yang saya gariskan.



Sukarno dan Soeharto.

Dengan pidato singkat yang disiarkan lewat radio di tengah malam itu, Sukarno sebenarnya menerima kenyataan bahwa Soeharto-lah yang berkuasa. Pranoto

reksoasamodra tidak pernah sempat berfungsi sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian asisten Personil Menteri Panglima Angkatan Darat itu, atas perintah Soeharto, ditahan dengan tuduhan terlibat Gestapu. Bukti yang menjadi dasar penahanan Pranoto adalah sepucuk surat dari Kolonel Latif yang berada dalam persembunyian setelah kegagalan Gestapu.

Dalam memoarnya, *Catatan Jenderal Pranoto Reksoasamodra*, Jenderal Pranoto membela diri dengan menyebut surat Latif sebagai berisi permintaan perlindungan kepada dirinya sebagai pelaksana sehari-hari pimpinan Angkatan Darat. dengan demikian, surat Latif bisa ditafsirkan sebagai pernyataan kesiapan menyerahkan diri kepada pimpinan sementara Angkatan Darat. Menarik untuk diketahui, surat Kolonel Latif tidak pernah diterima oleh Pranoto.

Surat itu diperoleh Soeharto dari unit intelijen yang berhasil menangkap Kolonel Latif hanya sekian puluh jam setelah kegagalan Gestapu. Bahwa Latif bersedia meminta perlindungan kepada Pranoto dan bukan kepada Soeharto, yang secara pribadi lebih lama dikenalnya, menambah kecurigaan Soeharto dan para Jendralnya mengenai adanya sikap simpati Pranoto kepada gerakan para perwira binaan Komunis tersebut.

Kecurigaan para perwira senior Angkatan Darat kepada Pranoto sebenarnya sudah berlangsung lama, yakni sejak bakal Panglima Diponegoro itu menggantikan Kolonel Ahmad Yani memimpin operasi penghancuran

PRRI di sumatra Barat.

sebagai pemimpin militer tertinggi di wilayah operasi tersebut, Pranoto dilaporkan sebagai sangat bersimpati kepada PKI dan bahkan mempersenjatai Pemuda rakyat (organisasi pemuda PKI) dan dipergunakan membantu ABRI mengejar para tokoh PRRI. Pranoto juga satu-satunya pembesar Angkatan Darat yang jumpa dengan D.N. Aidit, Ketua PKI—di rumah Syam— beberapa hari sebelum satu Oktober 1965.



Serah terima Panglima Divisi Diponegoro dari Kolonel Soeharto kepada Kolonel Pranoto Reksosamodra di Semarang, 1959.

Mengenai kegiatan Pranoto sebagai Panglima pengganti Kolonel Yani di sumatra Barat, dalam disertasinya mengenai *Peranan Elite Sipil dan Elite Militer Dalam Dinamika Integrasi Nasional Indonesia, Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatra Barat 1945-1984*, dr.

Saafroedin Bahar menulis mengenai pembentukan organisasi Keamanan rakyat (oKr) yang anggotanya hampir semua direkrut Kolonel Pranoto dari pemuda-pemuda binaan PKI.

diungkapkan juga oleh dr. Saafroedin Bahar, yang membantu Pranoto dalam kegiatannya mendukung kegiatan dan penyebaran PKI di sumatra Barat waktu itu adalah dua perwira menengah yang sekian tahun kemudian ditangkap dan diadili karena terbukti terlibat Gestapu. Mereka ialah Mayor Latif (terakhir Kolonel, Komandan Brigade Jakarta raya) dan Letnan Untung Samsuri (terakhir Letnan Kolonel, Komandan pengawal Presiden Sukarno).

MENGIKUTI PENUGASAN PRESIDEN Sukarno dan petunjuk Nasution, Soeharto memerlukan waktu sepekan sebelum akhirnya membentuk Komando operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan mengangkat dirinya sebagai Panglima.

Dalam wawancaranya dengan Kepala Pusat sejarah ABRI, Brigjen TNI (tituler) dr. Nugroho notosusanto, pada Tiga Maret 1977, Soeharto menjelaskan tentang pembentukan lembaga Kopkamtib itu sebagai inisiatifnya sendiri tanpa surat Perintah dari Presiden Sukarno. “saya hanya berpegang pada perintah lisan bahwa mengenai pemulihan keamanan masih diserahkan kepada saya,” kata Soeharto.

Presiden Sukarno baru mengukuhkan kedudukan Soeharto sebagai Panglima Kopkamtib pada 12 november

1965 setelah sebelumnya Soeharto dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat, menggantikan Jenderal TNI (anumerta) Ahmad Yani.

BAHWA KOSTRAD MEMINDAHKAN markas komando karena takut dibom, waktu itu mudah dimengerti mengingat besarnya kecurigaan para Jenderal itu kepada Angkatan Udara setelah satu Oktober pagi mendengar dari radio pengumuman dukungan Panglima Angkatan Udara kepada Gestapu.

Kecurigaan itu kemudian berdampak pada sikap amat tidak bersahabat para prajurit Angkatan Darat kepada rekan-rekan mereka dari Angkatan Udara. untuk waktu yang cukup lama di tempat umum sulit menemukan perwira Angkatan Udara yang muncul dengan pakaian seragam mereka. dalam pembelaannya di depan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) perlakuan kurang pantas terhadap anak buahnya itu dikisahkan oleh Omar Dani:

Mobil Laksda [Laksamana Muda] Aburachmat, mobil Letnan Udara Satu (LUS) Wara, Chusnul Chotimah, dan lain-lain ditabrak oleh jip-jip RPKAD. Ibu-ibu AURI yang belanja di luar Halim diludahi, juga pasukan karbol yang berdiri di pinggir jalan dalam sikap sempurna dan memberi hormat pada iringiringan jenazah para Jenderal korban G-30-S, mukanya diludahi pasukan Angkatan Darat yang berada di atas panzer.

Kalau kita renungkan sekarang, keputusan mengungsi ke Senayan dan kemudian ke Gandaria itu, memang terasa lucu. Sebab seandainya Angkatan Udara memang berencana melakukan pengeboman, intel

mereka tentu akan segera tahu juga bahwa pimpinan sementara Angkatan Darat sudah mengungsi ke Senayan dan kemudian ke Gandaria. Yang akan mereka bom pastilah Senayan atau Gandaria, bukan markas Kostrad di Jalan Merdeka timur yang sudah ditinggalkan.

Namun, itulah bukti bagaimana tingginya tingkat ketidakjelasan keadaan waktu itu. hal demikian mudah menimbulkan kepanikan. Maka, gampang dimengerti kalau hari-hari itu semua orang mencari informasi, yang selalu diikuti dengan *briefing*. Kata yang terakhir ini waktu itu dimaknai sebagai usaha menyebarkan sembari mencocokkan info.

Begitu membudayanya kata “info” dan “briefing”, beberapa waktu kemudian, yaitu ketika gerakan mahasiswa gencar melakukan demonstrasi anti-Gestapu, anti-PKI, kemudian akhirnya menjadi anti-Sukarno, kata “info” berubah makna menjadi suplai makanan, sedangkan “briefing” berarti kumpul untuk makan.

SEBAGAI REPORTER PEMULA hari-hari itu saya sibuk dengan tugas meliput aksi-aksi demo anti-Komunis yang mendadak melanda Jakarta, setelah sebelumnya PKI dan golongannya merajai demonstrasi di jalan-jalan Jakarta. Mula-mula sporadis dan diikuti oleh sejumlah kecil orang saja. Tapi, setelah pemakaman para Jenderal dan ade Irma suryani Nasution, putri Jenderal Nasution, sebagai korban-korban Gestapu, demo bertransformasi menjadi aksi massa dengan peserta yang makin lama makin membesar. Tema demonstrasi, “Bubarkan PKI”.

Demonstrasi besar pertama berlangsung di taman surapati —terletak di depan Gedung Bappenas sekarang —pada empat Oktober. Suasana amat tegang dan penuh kecurigaan terhadap siapa teman dan siapa yang mungkin lawan. Teman saya, Fachruddin Yahya, yang menyebarkan pamflet anti-PKI, entah bagaimana ceritanya, dikeroyok massa. Saya curiga ada kesalahpahaman di sana. Saya sendiri hampir menjadi korban pemukulan Fahmi Idris yang—menurut pengakuannya sekian puluh tahun kemudian—mencurigai saya anggota CGMI.

Pada masa itu, saya dan Fahmi memang belum saling kenal, tapi ekky syahrudin, juga tokoh HMI, sering jumpa dan ngobrol dengan kami di rumah tempat mondok Wiratmo Sukito. ekky bahkan pernah mengajak saya masuk HMI dan dijanjikan duduk dalam kepengurusan HMI Jakarta. Tapi karena lebih merasa diri sebagai seniman, saya tidak tertarik masuk organisasi apa saja.

Fahmi dan Ekky berjalan bersama memasuki taman surapati pada hari demonstrasi yang panas itu. Saya melihat mereka berjalan bersama dari arah Wisma Yani yang terletak di seberang taman surapati. ekky menghindar ketika Fahmi berjalan ke arah saya. Fahmi menggeledah saya dikelilingi orang-orang yang berwajah garang dan siap menerkam. hanya kesaksian dan pembelaan Winarno Zain, seorang mahasiswa asal Pekalongan dan pengurus HMI pusat, yang sudah saya kenal lama, yang akhirnya menyelamatkan saya.



Salim Haji Said (yang diberi tanda X) sebagai demonstran '66.



Mahasiswa berdemonstrasi menuntut pembubaran PKI dan Sukarno diadili.

Dicurigai sebagai CGMI dan digeledah oleh Fahmi Idris bukan pengalaman dicurigai satu-satunya yang pernah saya alami. di kemudian hari, setelah lulus dari Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (Fisip) saya dicurigai sebagai HMI dan karena itu ditolak menjadi asisten dosen. Saya ingin menjadi asisten dosen karena saya kira itulah satu-satunya jalan untuk mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan di Amerika. Kemudian terbukti ada jalan lain. dan saya akhirnya berhasil juga mendapat Ph.d. di Ohio.

Fisip Universitas Indonesia waktu itu memang dikuasai oleh orang-orang sekuler, anti-hMI. Nanti pada tahun sembilan puluhan oleh para aktivis anti-pemerintah dari berbagai LSM, saya dicurigai lagi. Kali ini sebagai “intel tentara” karena sebagai peneliti peranan politik militer, saya banyak berhubungan dengan para perwira yang merupakan objek penelitian saya. Lagi pula banyak di antara pejabat militer itu mantan murid saya di berbagai lembaga pendidikan militer.

Menjadi diri kita sendiri, bebas dari afiliasi partai dan golongan, memang tidak mudah di Indonesia, sebuah negeri yang hingga kini masih belum menghargai kebebasan, pilihan dan pencapaian pribadi. “Individualisme datang terlambat di Asia tenggara,” tulis Wertheim dalam bukunya *Indonesian Society in Transition*. Akibatnya orang tidak dikenal sebagai siapa dia, tetapi anak buah siapa, dari ormas atau partai mana dia, atau dari golongan mana oknum tersebut.

PADA HARI YANG SAMA, empat Oktober, jenazah para

Jenderal diangkat dari dalam sumur mati yang ditutupi sampah di daerah Lubang Buaya, yang berlokasi tidak jauh dari Pangkalan udara Militer Halim Perdanakusuma. esoknya, pada lima Oktober, hari Angkatan Bersenjata, mereka dimakamkan di taman Makam Pahlawan Kalibata. Suasana sangat emosional, dramatis, dan tragis karena hari itu direncanakan sebuah peringatan hari ulang tahun ke-20 ABRI secara besar-besaran. Ironisnya yang terjadi adalah pemakaman sebagian besar pimpinan Angkatan Darat.



Nasution berpidato di MBad melepas para Pahlawan Revolusi.



Prosesi pemakaman salah seorang Jenderal korban Gestapu.

Jenazah diberangkatkan dari Markas Besar Angkatan Darat. ucapan perpisahan disampaikan oleh Jenderal Nasution yang berdiri dengan dipapah menyampaikan pidato di sela-sela tangisnya yang tak tertahankan. di dalam ruangan tempat para jenazah dibaringkan terdengar isak tangis dari anak dan istri para Jenderal yang hari itu jenazah mereka segera dimakamkan. Yang saya ingat sangat memilukan tangisnya ialah istri Letjen TNI suwondo Parman, Kepala Intel Angkatan Darat. Jenderal Parman adalah suami kedua Ibu Parman. Suami pertamanya juga tewas di tangan kaum Komunis pada Pemberontakan Madiun pada 1948.

Amukan massa anti-Komunis seperti air bah tak tertahankan setelah pemakaman para Jenderal. Tapi lebih menjadi-jadi setelah pemakaman ade Irma Nasution, beberapa hari kemudian. Ade Irma adalah putri bungsu Jenderal Nasution yang tertembak ketika pasukan Gestapu menggerebek rumah Menko Hankam KSAB di Jalan Teuku Umar 40, Menteng, pada subuh satu Oktober. Jenderal Nasution lolos dengan memanjat pagar rumahnya untuk kemudian meloncat ke halaman kantor Kedutaan Besar Irak, tetangganya.

Salah satu kegiatan anti-Komunis yang saya liput—selain serentetan demo—beberapa hari setelah pemakaman-pemakaman tersebut adalah aksi pembakaran kantor Central Comite (CC) PKI di Jalan Kramat raya (terletak di depan kantor Pengurus Besar nahdlatul ulama sekarang). Gedung yang belum selesai dibangun itu sedang terbakar ketika saya

tiba dengan sepeda tua saya. Baru beberapa menit berada di depan kantor PKI yang sedang dilalap api, datang pula berita, rumah D.N. Aidit di Jalan Pegangsaan Barat diserbu massa. Saya bergegas ke sana.

Ketika tiba, massa telah bubar selepas memorakporandakan kediaman resmi Menko (Menteri Koordinator) Aidit tersebut. dengan menunjukkan kartu wartawan yang ditandatangani oleh Brigjen Soegandhi, polisi yang berjaga di sana mengizinkan saya masuk.

Rumah Wakil Ketua MPR Aidit itu (sekarang kantor Golkar DKI) sudah berantakan. Sembari mengamati ruangan demi ruangan yang telah diobrak-ABRIk massa, seorang tua pelanpelan muncul dari arah dalam. Bapak siapa? tanya saya dengan sopan. “Saya Abdullah Aidit, bapaknya D.N. Aidit.”[]

PEMBACA YANG FASIH

AL-QURAN

Saya meninggalkan rumah dinas pemimpin tertinggi Komunis Indonesia dengan mengantongi satu rol kecil pita rekaman. Saya menduga rekaman itu dokumen politik penting. Ketika pita rekaman itu kami putar ternyata isinya pengajian Islam yang dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci al-Quran. di kemudian hari, saya baru mendapatkan informasi, pada masa kecil di kampungnya, D.N. Aidit bukan saja belajar mengaji al-Quran, bahkan beberapa kali menamatkan kitab suci tersebut. Pada masa kecilnya, D.N. Aidit kononnya juga dikenal di lingkungan dekatnya sebagai pembaca al-Quran yang fasih.

SEKITAR SEBULAN SETELAH MELETUSNYA GESTAPU, sebagai reporter muda, pada awal november saya mendapat tugas ke Jawa Tengah. Pada penugasan pertama di luar kota tersebut, saya harus meliput operasi RPKAD membersihkan Gestapu dalam tubuh Kodam Diponegoro. Beratnya tugas Sarwo Edhie itu sebagai Komandan operasi akan mudah disadari kalau kita tahu bahwa dari tujuh batalion Diponegoro yang waktu itu berada di Jawa Tengah, lima sudah dikuasai para perwira beraliran kiri.



Sukarno dan D.N. Aidit menyanyi bersama, 1965.

Juga dua dari Tiga Komando resort Militer (Korem) telah pula mereka pengaruhi. Komandan Korem Yogyakarta, Kolonel Katamso dan wakilnya, Letnan Kolonel sugiono, malah diculik, dan dengan sadis dibantai sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam lubang yang dangkal. Aneh memang, pasukan-pasukan yang tidak berkecenderungan kiri waktu itu justru sedang ditugaskan ke Kalimantan utara dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia.

Dibekali dengan surat pribadi Jenderal Soegandhi kepada Kolonel sarwo, saya berangkat ke solo dengan kereta api. Kolonel Sarwo Edhie sudah berada di solo

waktu itu setelah menyelesaikan tugasnya di Semarang. Apa isi surat tersebut, saya tidak pernah tahu. Tapi sejak itu, saya selalu diminta berada dekat dengan Komandan, dalam perjalanan darat maupun penerbangan dengan helikopter, ke berbagai kota di wilayah Jawa Tengah.

Kesempatan ini memberi peluang kepada saya menjadi akrab dengan Kolonel Sarwo dan sekaligus mengikuti jalannya operasi dari pusat komando. Persahabatan saya dengan Pak Sarwo Edhie itu berlangsung terus hingga beliau jatuh sakit sebelum akhirnya meninggal pada 1989.

Kedekatan saya dengan Komandan RPKAD itu tampaknya menimbulkan perasaan tidak senang seorang asistennya. Mayor Gunawan Wibisono, asisten operasi Komandan RPKAD dan teman sependidikan L.B. Moerdani di Bandung, pernah memperingatkan saya agar menjaga jarak dengan Komandannya. “eh, wartawan, itu Kolonel, kamu harus tahu,” katanya dengan kasar setengah membentak saya ketika kita berada di Purworejo. Tapi kalau saya menjauh, Kolonel Sarwo selalu mencari saya. Akibatnya, Mayor Gunawan selalu memandang saya dengan muka kecut.

Pengalaman dengan Mayor itu kemudian mengajarkan kepada saya, pada umumnya tentara itu memang mengharap kita orang sipil menghormati Komandannya sebagaimana dia sendiri menghormati atasannya. Mayor Gunawan tidak sanggup menyadari, saya bukan anak buah Komandannya, seperti dirinya. Tapi karena untuk waktu lama militer menguasai Indonesia,

pengalaman kurang menyenangkan dengan Mayor Gunawan selalu menjadi pegangan pada diri saya dalam berhubungan dengan para pemimpin tentara, terutama di hadapan para anak buahnya.

BERSAMA PASUKAN RPKAD, kepada pimpinan operasi diperbantukan satu kompi Polisi Militer Angkatan Darat yang berkualifikasi para (Yon Pomad Para). Tugas polisi militer ini memproses anggota tentara yang ditahan karena dicurigai terlibat Gestapu.

Di berbagai kota yang kami kunjungi dalam rangka operasi itu, saya menyaksikan anggota-anggota Yon Pomad Para ini selalu sibuk memeriksa tentara-tentara yang ditahan. Ternyata Biro Khusus PKI cukup sukses dalam membina tentara. Seingat saya kebanyakan yang ditahan adalah perwira yang mengurus intelijen, teritorial, dan personalia. Tiga pos sensitif dalam organisasi militer.

Tentang tentara binaan Biro Khusus PKI itu, dr. Harold Crouch dalam bukunya *Militer dan Politik di Indonesia* (1986), mengungkapkan, Biro Khusus PKI berhasil membina sejumlah perwira di beberapa wilayah Indonesia. Temuan Crouch, yang sudah berhasil dibina, 250 perwira di Jawa Tengah, 200 di Jawa Timur, hampir 100 di Jawa Barat, sekitar 50 di Jakarta, hampir 40 di sumatra utara, 30 di sumatra Barat, dan 30 di Bali. Menurut Crouch, perwira binaan PKI tersebut dipersiapkan memegang peranan setelah Gestapu berhasil di Jakarta.

DALAM PERJALANAN ANTARA KOTA SOLO DAN

BOYOLALI, mobil Komandan mendadak berhenti. Kolonel Sarwo turun dan tentara yang berjaga di sekitar situ itu langsung memberi laporan. Katanya, mayat di tengah jalan yang ditutupi rumput kering itu adalah tokoh PKI tingkat kecamatan yang dicurigai mengorganisasi perlawanan orang-orang PKI beberapa hari sebelumnya di Kecamatan Manisrenggo yang terletak antara solo dan Boyolali. “singkirkan segera mayat itu, jangan menimbulkan kepanikan rakyat,” perintah Sarwo Edhie.



Sarwo Edhie di tengah massa anti-Komunis.

Sebagai orang yang takut melihat darah, saya berdiri jauh dari mayat tersebut. “eh, wartawan, sini, harus lihat ini,” seru Kolonel Sarwo kepada saya. Secara perlahan saya mendekat. Rupanya yang tertembak persis kepalanya. Sebagian tengkoraknya hilang dan otaknya berhamburan di sekitar situ. di dekat mayat, saya lihat selongsong peluru. Kesimpulan saya, korban ditembak dari jarak dekat. harus saya akui itulah satu-satunya pengalaman melihat mayat selama saya meliput operasi pimpinan Sarwo Edhie tersebut.

Nanti ketika berada di Purworejo, kota kelahiran Sarwo Edhie dan Ahmad Yani, tempat pasukan berada beberapa hari, saya sempat bergaul dengan para prajurit yang melakukan pembersihan di Manisrenggo.

Orang-orang Komunis di desa itu, menurut informasi pasukan RPKAD, sudah diindoktrinasi oleh para pejabat partai bahwa pasukan yang berbaret merah itu adalah tentara nekolonialisme dan Imperialisme (nekolim), dan senjata mereka hanya berisi peluru kosong, nyaring suaranya tapi tidak membunuh.

Cerita tentang RPKAD yang dikampanyekan sebagai tentara nekolim tersebut sebenarnya bukan cara baru kaum Komunis dalam menghadapi TNI. Ketika melakukan operasi terhadap para pemberontak Komunis di Madiun pada 1948, siliwangi (sLW singkatannya waktu itu) juga dikampanyekan oleh para pimpinan Komunis sebagai singkatan dari *Stoot Leger Welhelmina*. Artinya, pasukan militer ratu [Belanda] Welhelmina.

Dengan informasi itulah orang-orang desa itu

digalakkan agar berani menantang pasukan siliwangi pada masa pemberontakan Madiun 1948 dahulu dan RPKAD pada masa Gestapu. RPKAD memang berbaret merah, tapi tentu saja beroperasi dengan senjata berpeluru tajam dan siap tempur.

Sambil menari-menari (konon ada yang sambil menyingkap rok atau kain sarungnya dan menghadapkan pantat mereka kepada para prajurit) di tengah jalan, mereka menantang pasukan yang masuk ke wilayah yang sebelumnya telah mereka deklarasikan sebagai desa Soviet. Imbauan tentara dan tembakan ke udara mereka abaikan. Menunggu lama, instruksi tembak dikeluarkan. Banyak yang mati. Salah seorang prajurit berhasil mengumpulkan sejumlah daun kuping mayat-mayat itu dan dijadikan sebagai semacam souvenir yang dirangkai dalam bentuk kalung. “Pak salim mau lihat?” tanya prajurit itu. “tidak, ah, saya takut.”

Rombongan Sarwo Edhie memasuki Surakarta dari Semarang pada 22 Oktober. Ketika konvoi RPKAD tiba di Kartasura, wilayah pinggiran Surakarta, datang perintah dari Panglima Kodam Diponegoro di Semarang, RPKAD sebagian diperintahkan menuju Boyolali. Laporan dari kota kabupaten itu menyebut adanya pembantaian di banyak desa yang dilakukan orang-orang PKI dan Btl terhadap lawan-lawan politiknya, yakni kaum Marhaenis dan pemuka-pemuka Islam.

Catatan di Kabupaten Boyolali pada hari-hari menjelang datangnya RPKAD menunjukkan 117 orang yang dibantai oleh kaum Komunis. Menurut sejarawan

restu Gunawan dalam buku *Malam Bencana 1965*, menghadapi ketakutan rakyat kepada PKI yang masih kuat di kabupaten itu,

Sarwo Edhie mengadakan rapat umum. Dia berkata, “Siapa mau dipotong kepalanya, saya bayar lima ribu.” Karena tidak ada yang tunjuk tangan, dia melanjutkan bertanya, “Siapa yang mau dipotong kepalanya saya bayar seratus ribu.” Karena tetap tidak ada reaksi dia melanjutkan lagi, “Dibayar seratus ribu saja tidak ada yang mau dipotong kepalanya,” dan agar kepala massa pendengar tidak dipotong dengan gratis, “maka PKI harus dilawan.”

Waktu kami di Purworejo, saya menyaksikan sejumlah tokoh masyarakat datang menemui Kolonel Sarwo menyampaikan ketakutan mereka terhadap tetangga sekampung yang Komunis. “Mereka mengasah parang di depan rumah secara mencolok,” kata seorang anggota delegasi itu. Para pemuka masyarakat tersebut meminta RPKAD datang ke desa mereka. “Wah, kalau setiap desa harus kami jaga, pasukan RPKAD tidak cukup,” kata Kolonel Sarwo.

Akhirnya ditemukan jalan keluar, pasukan RPKAD melatih pemuda-pemuda desa mengatasi ancaman PKI. Pelatihan pemuda anti-Komunis itu adalah jalan keluar Sarwo Edhie mengatasi terbatasnya pasukan RPKAD di tengah-tengah kecemasan masyarakat terhadap ancaman fisik PKI. usaha memperoleh tambahan kekuatan tidak bisa dipenuhi oleh Jenderal Soeharto yang di Jakarta masih memerlukan banyak pasukan, antara lain untuk menghadapi Angkatan lain yang belum berhasil dinetralisasikannya.

Kegiatan melatih pemuda sebenarnya sudah terlebih dahulu dipraktikkan di solo. di sana para pemuda Islam dan pemuda Marhaen dilatih secara militer selama Tiga atau empat hari. Setelah itu, mereka dilepas beraksi menghadapi ancaman PKI yang di kota itu mendapat dukungan dari satu batalion pasukan Kodam Diponegoro.

Hasil dari pelatihan yang dilakukan RPKAD terlihat dengan jelas dan cepat. Mereka yang telah dilatih itulah yang menjadi pemimpin berbagai kegiatan penggerebekan kantor-kantor PKI dan tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi persembunyian orang-orang Komunis. Menurut cerita yang saya dengar lama setelah meliput operasi RPKAD itu, sebagian mereka yang telah dilatih itu juga berperan penting dalam pembantaian orang-orang Komunis di daerah masing-masing.

Ada cerita lucu yang muncul di sekitar pengejaran, penangkapan, dan pembantaian anggota PKI waktu itu. Kalau sebelumnya tidak mudah menangkap copet atau pencuri yang dikejar, pada masa itu mudah sekali membekuk pelaku kejahatan tersebut. Teriaki saja mereka “PKI”, copet atau maling itu akan segera berhenti dan tanpa ditanya akan membuat pengakuan, “saya copet, tapi bukan PKI.” artinya, lebih aman mengaku maling atau copet daripada ditangkap sebagai PKI.[]

CORNELL PAPER

Tafsiran alternatif terhadap Gestapu mulai muncul untuk pertama kalinya ketika di Jakarta beredar—secara terbatas dan dari tangan ke tangan—sebuah analisis yang kemudian lebih populer disebut sebagai **Cornell Paper**.

Naskah dari Cornell University itu sebenarnya adalah hasil analisis sementara dua ahli Indonesia (Ben Anderson dan Ruth McVey) pada pusat studi Asia Tenggara di Universitas tersebut.

Kalau penjelasan resmi pemerintah orde Baru menyebut PKI sebagai pelaku tunggal Gestapu, analisis dari Cornell University melihat Gestapu sebagai masalah internal Angkatan Darat. Menurut para peneliti di Cornell University itu, sudah lama berkembang sikap kritis di kalangan para perwira di Kodam Diponegoro, Jawa Tengah, terhadap para perwira Diponegoro di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta.

Syahkan, menurut analisis sementara tersebut, para perwira di Semarang itu melihat senior mereka di Jakarta sebagai sudah terkorup oleh kehidupan metropolitan dan telah mengkhianati prinsip-prinsip kerakyatan dan kesederhanaan yang masih kuat dianut di Jawa Tengah.

Singkatnya, para peneliti dari Cornell University lebih melihat Gestapu sebagai akibat konflik internal Angkatan Darat, lebih khusus lagi internal Kodam Diponegoro. dan PKI dipandang hanya jadi korban. Anehnya memang, PKI pun juga ingin Gestapu dilihat hanya sebagai konflik internal Angkatan Darat saja.

Analisis dari Amerika itu banyak diwarnai oleh keahlian Ben anderson yang sebenarnya lebih menonjol sebagai ahli budaya Jawa. dengan pengetahuannya mengenai budaya Jawa, dia melihat para perwira Diponegoro yang melawan JenderalJenderal mereka di Jakarta itu lebih digerakkan oleh sistem nilai budaya Jawa daripada motivasi politik. Tapi, jika memang demikian halnya, maka para perwira tersebut telah menjadi korban manipulasi Biro Khusus PKI.

Adalah Biro Khusus PKI yang memberi bungkus dan motivasi politik terhadap ketidakpuasan para perwira di Jawa Tengah itu. dengan kata lain, Gestapu merupakan pertemuan kepentingan PKI dan para perwira di Jawa Tengah yang tidak puas kepada para pimpinan Angkatan Darat.

Analisis Ben anderson dan ruth McVey tersebut diterima dengan kemarahan di Jakarta. Beberapa Jenderal bahkan menyebut adanya konspirasi Yahudi di balik naskah tersebut. Ben anderson maupun ruth McVey, penulis-penulis risalah tersebut, jelas bukan Yahudi.

Yang jelas mereka berdua berkecenderungan kiri dan memang mempunyai hubungan baik dengan orang-orang kiri di Indonesia. Ketika ruth McVey berada di Jakarta, PKI

mengundangnya memberi ceramah pada akademi Politik ali archam yang berfungsi mendidik kader-kader PKI. Konon ruth amat bangga dengan undangan tersebut. McVey memang seorang yang khusus mempelajari bangkit dan berkembangnya PKI. Ben anderson berada di Indonesia—melakukan penelitian— beberapa saat sebelum Gestapu. Pada masa itulah, lewat hubungannya dengan pemuda-pemuda kiri. dia mengembangkan jaringannya dengan golongan kiri.



Ben Anderson, salah seorang penulis Cornell Paper.

Saya sendiri secara kecil-kecilan pernah terlibat dalam diskusi mengenai garis pemikiran paper tersebut. dalam sebuah kesempatan jumpa Ben anderson di rumah Soe Hok Gie yang terletak di Jalan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,

pada 1967, saya sempat beradu argumentasi dengannya.

Saya katakan kepada Ben, kalau dia berada di Jakarta dari 1963 hingga Oktober 1965, seperti saya, dan dengan saksama mengikuti perkembangan politik, akan sulit sekali baginya untuk tidak melihat bahwa PKI memainkan peran penting di balik Gestapu.

Tafsiran bahwa PKI secara tunggal berada sepenuhnya di balik Gestapu memang dominan dan satu-satunya tafsiran waktu itu. Bahkan, jauh sebelum mulai bekerjanya secara sistematis mesin kampanye militer dalam menumpahkan semua kesalahan hanya kepada PKI.

Pada 1967 itu, Ben anderson masih bebas masuk Indonesia, antara lain untuk melengkapi bahan bagi penulisan bukunya tentang peran pemuda di Jawa pada masa Revolusi. Tidak lama kemudian, untuk masa hampir 30 tahun dia dicekal masuk ke Indonesia.

Saya jumpa Ben lagi di Amerika ketika saya sudah menjadi mahasiswa pascasarjana di Ohio. Waktu itulah Ben mengisahkan kepada saya hubungan baiknya dengan sejumlah tokoh Pemuda rakyat dan CGMI yang terbina ketika dia melakukan penelitian di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.

Kehadiran dan penelitiannya di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin itu membawanya kepada kesimpulan adanya persamaan aktivitas para pemuda Komunis pada masa itu dengan kegiatan pemuda kiri pada masa Revolusi. Inilah yang tampaknya mendorong Ben bersimpati kepada para pemuda Komunis pada masa demokrasi terpimpin seperti dia bersimpati kepada

pemuda kiri pada masa Revolusi yang menjadi sasaran penelitian bukunya.

Dalam pertemuan di athens, Ohio, pada 1980 itu, Ben anderson menjelaskan, kesedihannya terhadap terbantai dan terbabatnya banyak teman-temannya di kalangan muda PKI yang terjadi pada masa pasca-Gestapu.

Cerita Ben anderson yang punya banyak teman di kalangan anak-anak muda golongan Komunis Indonesia itu, lebih kurang sama dengan kisah yang saya dengar dari Profesor Wertheim di amsterdam pada 1970. Wertheim marah kepada Soeharto yang membasmi Komunis, selain karena sang Profesor memang seorang berhaluan kiri, simpatisan berat PKI, juga karena banyak tokoh Komunis, terutama yang sarjana, adalah bekas murid Wertheim ketika sang Profesor mengajar di Indonesia pada tahun lima puluhan.

Seperti kita ketahui, Wertheim adalah orang yang kemudian memperkenalkan apa yang umum disebut sebagai teori *missing link* yang menuduh Pangkostrad Mayjen TNI Soeharto sebagai orang yang berada di balik Gestapu.[]

NASIHAT IKUT JALAN MAO

Ben anderson dan Wertheim adalah sarjana-sarjana ahli Indonesia yang berpengetahuan luas dan mendalam tentang sejarah, politik, dan budaya Indonesia. Wertheim mengaku amat mencintai Indonesia. dia berada di Indonesia pada masa revolusi dan mengambil posisi sebagai pembela republik. Tapi justru dari cinta itulah, munculnya bahaya bagi objektivitas kesarjanaan mereka.

Karena mereka sangat cinta Indonesia, maka tanpa mereka sadari muncullah tabiat paternalistik mereka yang merasa tahu apa yang harus dilakukan orang Indonesia. Sikap demikian dinilai banyak orang sebagai kelanjutan dari sikap arogansi kaum kolonialis dan imperialis yang merasa membawa misi suci ke negeri-negeri yang mereka jajah.

Pada 1970 itu, misalnya, Wertheim menjelaskan dengan yakin kepada saya, Indonesia harus mengikuti kebijakan pembangunan Mao yang waktu itu berkuasa di Tiongkok. Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan Wertheim mengenai Tiongkok yang makmur sekarang ini justru karena deng Xioping mengambil jalan lain bahkan

bertentangan dari kebijakan Mao. Wertheim meninggal dunia dalam usia amat lanjut beberapa tahun sebelum kisah sukses Cina mencengangkan, bahkan mengubah dunia.

Menarik untuk diketahui, untuk bertemu dengan Wertheim pada 1970 itu tidaklah mudah. dia menolak bertemu orang-orang Indonesia yang punya hubungan dengan orde Baru. Profesor itu mengaku menolak berjumpa dengan nono anwar Makarim, seorang tokoh mahasiswa anti-Komunis dan Adnan Buyung Nasution, seorang pengacara terkemuka Indonesia yang juga anti-Komunis. “tangan mereka berdarah,” katanya kepada saya. Lalu bagaimana saya sebagai wartawan koran tentara, *Angkatan Bersenjata*, berhasil jumpa dan mewawancarainya?

Salah seorang asisten Wertheim waktu itu, dr. Basuki Gunawan, menyarankan agar saya memperkenalkan diri sebagai mahasiswa ilmu sosial saja. Waktu itu saya memang mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (IPK) Universitas Indonesia, setelah pada 1968 meninggalkan Fakultas Psikologi. Nasihat dr. Basuki Gunawan menolong saya masuk ke kantor Wertheim, berdiskusi dan sekalian mewawancarainya. Bahasa Indonesianya masih lancar meski sudah lama tidak berkunjung ke Indonesia.

Berikut ini penggalan wawancara tersebut yang sebagian pernah disiarkan oleh majalah *Ekspres*, edisi 22 Agustus 1970:

Tidak Tidak betul PKI terlibat. Mereka tidak bodoh. Tapi,

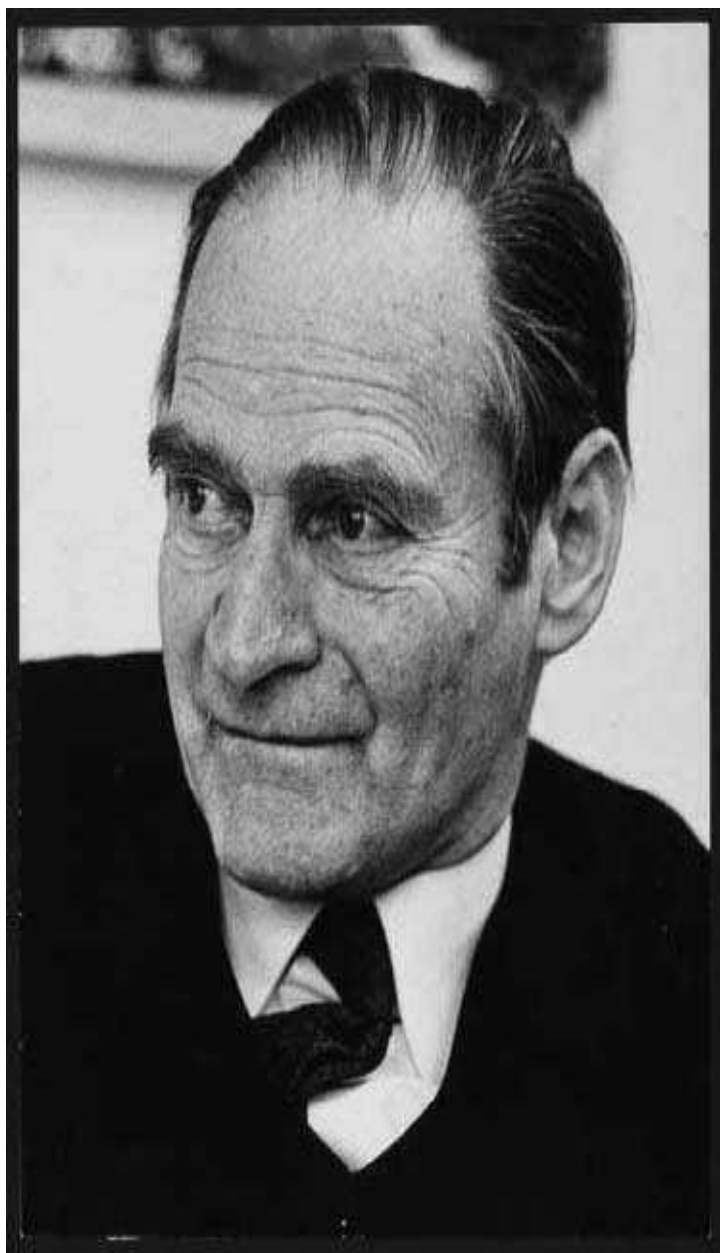
memang ada pimpinan yang terlibat karena diprovokasi oleh agen tentara. Saya tidak yakin Syam dan Pono orang Komunis. Mereka berdua diselundupkan tentara ke dalam PKI.

Memang *Cornell Paper* sekarang sudah tidak benar semua. Tapi, saya punya bukti-bukti bahwa PKI tidak terlibat. Berapa banyak anggota PKI di Indonesia? Saudara tahu?

Mereka memang PKI Indonesia, tapi toh PKI adalah partai modern satu-satunya yang dimiliki Indonesia. Saingannya hanya tentara. Jadi, tidak masuk akal kalau PKI terlibat, sedangkan anggota-anggotanya tidak dipersiapkan

Namun, itu semua akibat kesalahan dan kebobrokan politik Sukarno. Dia itu Raja Jawa saja. Feodal, terlalu kebapakan dan dialah yang [merasa] tahu pasti Indonesia harus ke mana. Orang lain mesti ikut saja dia. Tentara yang dulu punya andil menegakkan Indonesia dan sekarang punya alat dan organisasi modern, memang tidak tahan melihat Sukarno. Mereka mencoba menyingkirkan Sukarno dengan menggunakan tangan lain berkali-kali. Selalu gagal. Lalu, usaha memancing PKI yang berhasil.

Meskipun [berhasil] menyingkirkan Sukarno, saya tidak percaya tentara bisa memperbaiki Indonesia. Tentara fasis, tidak demokratis. Juga mereka korup.



W.F. Wertheim mengajukan teori missing link dan menuduh Soeharto di balik Peristiwa Gestapu.

KESEMPATAN MENJADI MAHASISWA PASCASARJANA di Ohio, Amerika Serikat, belasan tahun setelah Gestapu membuka kesempatan memuaskan hasrat ingin tahu saya mengenai apa dan siapa saja sebenarnya yang berada di balik Gestapu. Bukubuku dan dokumen-dokumen tentang Gestapu, yang sulit ditemukan di Jakarta, hampir semuanya berhasil saya baca di perpustakaan Ohio university, Athens, Ohio.

Dari bacaan itu kesimpulan saya tentang Gestapu berangsur menjadi tidak sesederhana keyakinan kami di Indonesia pada hari-hari dan tahun-tahun pertama setelah tragedi satu Oktober 1965. Meski demikian, saya tetap yakin bahwa PKI terlibat Gestapu—sebagai yang juga diakui sendiri oleh sudisman, anggota Politbiro PKI, di depan Mahmillub pada 21 Juli 1967—serta Brigjen TNI Supardjo dalam testimoninya pada Mahmillub yang menjadi populer lewat buku John roosa, *Pretext for Mass Murder*.

Akan tetapi, saya juga yakin PKI bukan perancang dan pemain tunggal gerakan berdarah itu. Lalu, bagaimana kejadian atau jalan cerita sebenarnya? harus cepat saya jawab, mungkin tidak akan pernah secara persis kita tahu apa sebenarnya yang terjadi dan siapa saja yang bermain. Tapi, berikut ini adalah hasil usaha dari percobaan saya merekonstruksi duduk soal dan latar belakang tragedi berdarah tersebut.[]

ANGKATAN VERSUS PKI

DARAT

Bahwa waktu itu ada konflik yang makin tajam antara PKI dan Angkatan Darat yang mendapat dukungan golongan masyarakat anti-Komunis, itu sudah suatu kenyataan sejarah tak terbantah. Setelah partai-partai anti-Komunis seperti Masyumi dan PSI dibubarkan oleh Presiden Sukarno pada 1960, Angkatan Darat tidak punya pilihan kecuali “bertransformasi” menjadi garda depan kekuatan anti-Komunis. Perkembangan ini makin memperburuk hubungan Angkatan Darat dengan Sukarno yang secara terang-terangan—antara lain dengan menggunakan doktrin nasakom—melindungi PKI.

Bahwa hubungan Angkatan Darat dengan Presiden Sukarno terus makin memburuk, masa itu juga bukan rahasia di Jakarta, terutama menjelang berakhirnya sejarah demokrasi terpimpin.

Bahwa PKI makin meningkatkan ofensif-Revolusioner dan agitasi politiknya di hampir segala sektor, itu juga suatu yang terdokumentasi dengan saksama dalam koran-koran terbitan masa itu dan dianalisis dengan baik dalam buku *Indonesian Communism Under Sukarno* karya sarjana

Australia, Rex Mortimer.

Retorik PKI waktu itu adalah teriakan-teriakan ganas layaknya kekuatan yang sebentar lagi menyerbu dan memusnahkan lawan-lawannya.

Yang barangkali kurang diperhatikan orang di Indonesia waktu itu ialah adanya perbedaan-perbedaan sikap terhadap Sukarno dan PKI di kalangan militer, khususnya dalam Angkatan Darat. Masa itu di dalam Angkatan Darat ada kelompok Nasution yang amat kritis terhadap sikap lunak kelompok Ahmad Yani kepada Sukarno. Juga ada kelompok Kostrad pimpinan Soeharto yang merasa dianggap remeh oleh kelompok Ahmad Yani. Tentu tidak boleh dilupakan kelompok perwira “progressive revolutioner” yang dikenal juga sebagai “perwira berpikiran maju” yang sejak lama telah dibina oleh Biro Khusus PKI.

Di luar Angkatan Darat ada Angkatan Udara—pimpinan Omar Dani—yang sangat loyal kepada Panglima tertinggi ABRI, dan cenderung bersikap antagonistik terhadap Angkatan Darat. Angkatan Kepolisian, meski sibuk menyatakan loyalitasnya kepada Bung Karno, perpecahan dalam tubuhnya merupakan soal yang mempersulit Sukarno mengerahkan polisi menjadi kekuatan anti-Angkatan Darat sebagai yang berhasil dilakukan Pemimpin Besar Revolusi itu kepada Angkatan Udara.

angkatan Laut, di bawah pimpinan Laksamana Madya Martadinata, berhasil menjaga hubungan baiknya dengan Angkatan Darat terutama karena Nasution, antara lain,

adalah teman lama Martadinata di Bandung pada zaman Jepang. Kendati demikian, tugas Martadinata menjaga Angkatan Laut agar tidak diadu dengan Angkatan Darat tidaklah mudah. Seperti di berbagai satuan Angkatan Darat, di Angkatan Laut juga ada banyak pengikut fanatik Sukarno. Yang paling mencolok adalah Letnan Jenderal KKO Hartono, Panglima Korps Komando (nama Marinir waktu itu). Ketika posisi Presiden makin terdesak setelah Gestapu, Jenderal KKO Hartono secara berani menantang dan mengumumkan dukungannya kepada Sukarno, “Putih kata Bung Karno, putih kata KKO, hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO.”



Letjen KKO Hartono.

Pengganti Martadinata sebagai Kepala staf Angkatan Laut, Laksamana Mulyadi, juga seorang Sukarnoïs. Keduanya, Hartono maupun Mulyadi—setelah Soeharto

berhasil mengonsolidasi kekuasaannya—mengakhiri karier militer mereka untuk kemudian didudukkan pada kursi duta besar, masing-masing di Pyongyang (Hartono) dan Moskow (Mulyadi).

Menarik untuk juga dicatat, kematian mendadak dan berdarah dubes Hartono pada 1970 di Jakarta. Sampai hari ini kematian tersebut bagi banyak orang masih tetap sebuah misteri. Nasib buruk yang menimpa Hartono itu seingat saya diumumkan sebagai akibat bunuh diri. Tapi, waktu itu banyak yang percaya sebenarnya dia dibunuh. Yang jadi pertanyaan buat saya, mengapa dia harus “dihabisi” padahal sejak dicopot dari jabatan pemimpin tertinggi KKO, dia tidak lagi punya pengaruh dan kekuatan yang bisa dipandang sebagai potensi ancaman terhadap kekuasaan Soeharto.[]

TERUS KETAKUTAN

DIKEJAR

Secara sederhana bisa dikatakan, di sekitar terjadinya Gestapu tersebut, terdapat paling sedikit empat kelompok dengan kepentingan masing-masing terhadap kekuasaan dan kelanjutan politik Indonesia. *Pertama*, tentu saja Sukarno sendiri. Presiden pertama Indonesia itu berkuasa dan bertahan pada singgasananya—terutama sejak Indonesia memberlakukan kembali UUD 45 pada Juni 1959—selama konflik antara kekuatan Komunis dan anti-Komunis bisa dikelolanya dengan baik. Pengelolaan konflik itu ditopang oleh ideologi yang dipopulerkan Sukarno sebagai Nasakom. dalam rangka ini juga orang bicara mengenai apa yang populer waktu itu disebut sebagai politik menjaga keseimbangan atau *balance of power politics*. tentang kebijakan menjaga keseimbangan ini, Caldwell dan utrecht dalam buku mereka menulis,

Kebijakan Sukarno menampung PKI dalam rumah Nasional Indonesia dan mobilisasi kekuatan-kekuatan Revolusioner, memberikan PKI perlindungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kekuatan politik yang menjadi suatu imbalan berat dan efektif terhadap tentara.

Kedua, PKI. Partai Komunis Indonesia pada puncak masa Perang dingin itu terus-menerus dikejar ketakutan terhadap Angkatan Darat, terutama sejak berita sakitnya Sukarno mulai tersiar pada awal Agustus 1965. Kalau terjadi sesuatu dengan Pemimpin Besar Revolusi itu, PKI terpaksa harus menghadapi sendiri Angkatan Darat tanpa perlindungan siapa pun. Meski mengaku punya pengikut banyak, orang-orang Komunis menyadari, mereka tidak bisa melawan Angkatan Darat yang lewat aparat teritorialnya sudah mengontrol Indonesia hingga semua pelosok republik. Terutama selama Angkatan Darat masih dipimpin oleh para Jenderal anti-Komunis yang oleh PKI disebut sebagai “Jenderal kepala batu”.

PKI sangat sadar kondisi tersebut. oleh sebab itu, mudah dimengerti jika PKI memilih strategi mendukung Nasakom, dan lewat doktrin tersebut memainkan peran sebagai pendukung militan Presiden Sukarno.

Pilihan berlindung di balik Sukarno memang tidak seluruhnya disetujui oleh para petinggi PKI. Mereka yang radikal dan lebih memilih jalan Mao Zedong yang percaya kekuasaan tumbuh dari laras bedil, menolak jalan politik yang dipilih pimpinan partai mereka.

Namun, Aidit sebagai pemimpin tertinggi PKI tidak punya pilihan lain. Meski memilih jalan Mao, Aidit tidak bisa melaksanakan nasihat dan pengalaman Mao yang melakukan hijrah ke pedalaman untuk kemudian masuk kota merebut kekuasaan. Karena itu, jalan yang dipilih Aidit ialah merebut kekuasaan lewat jalan parlementer. Sementara itu—dalam mempersiapkan partai meraih

kemenangan lewat pemilu yang direncanakan bakal dilaksanakan pada 1970—Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi Sukarno adalah satu-satunya kekuatan yang dipandanginya sanggup, berani, dan konsisten melindungi PKI dari ancaman Angkatan Darat.

Bagi Sukarno sendiri PKI bukan hanya salah satu pilar Nasakom, melainkan juga sebuah kekuatan politik yang dimanfaatkannya mengimbangi Angkatan Darat. Sebagai politikus yang canggih, Sukarno sadar tanpa kekuatan pengimbang yang berdiri di belakang dirinya sang Pemimpin Revolusi amat yakin akan mudah menjadi “sandera” para Jenderal. Sukarno dan PKI akhirnya “terpaksa” berdiri berdampingan menghadapi Angkatan Darat.

Ketiga, setelah Psl dan Masyumi—benteng utama kekuatan sipil anti-Komunis—dibubarkan oleh Presiden Sukarno pada 1960, secara perlahan tapi pasti, Angkatan Darat tidak punya pilihan lain kecuali terdorong ke posisi garda depan kekuatan anti-Komunis. di dalam masyarakat kekuatan anti-Komunis juga memang menggantung harapan mereka pada sikap tegas Angkatan Darat menghadapi PKI.

Angkatan Darat merespons positif harapan masyarakat tersebut. untuk golongan Islam, misalnya, Angkatan Darat antara lain mengadakan organisasi Pengajian Dakwah Islam (Padi). Sebagai Ketua Padi, Jenderal Soegandhi secara teratur mengadakan pengajian di rumah para pimpinan tentara dengan penceramah yang didatangkan dari berbagai organisasi Islam. Angkatan

Darat juga membangun Perguruan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) yang diharapkan berfungsi sebagai lembaga dakwah dan pendidikan untuk menghadapi kampanye—kampanye ideologis PKI. Ptdl itu didirikan pada 1960 oleh Mayjen TNI R. Sudirman (mantan Panglima Brawijaya) bersama Mayjen TNI sarbini (mantan Panglima Diponegoro dan Brawijaya). Gagasan awal pendirian Ptdl ialah mengimbangi Universitas rakyat yang didirikan PKI di berbagai kota.

Untuk organisasi massa, Angkatan Darat pada Oktober 1964 memelopori berdirinya sekretariat Bersama Golongan Karya (sekber Golkar). Sekber Golkar adalah tempat berlindung sejumlah besar organisasi massa anti-Komunis yang berusaha menghindari dari “persekusi politik” PKI yang makin bersemangat dalam melancarkan ofensif-Revolusionernya.

Dengan para pimpinan organisasi mahasiswa juga terbina kontak-kontak. Ketika sejumlah organisasi mahasiswa lokal terancam dibubarkan karena bukan organisasi yang bersifat Nasional sesuai dengan ketentuan masa itu, pihak militer mendorong mereka bergabung dalam sebuah sekretariat organisasi Mahasiswa Lokal (somal). dr. Syarif thayeb, Menteri Perguruan tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PtIP) ialah seorang Mayor Jenderal yang berperan penting dalam menggagas pembentukan Kesatuan aksi Mahasiswa Indonesia (KaMI) beberapa saat setelah pecahnya Gestapu.

Para pimpinan HMI—sasaran terpenting untuk dibubarkan oleh PKI—membina hubungan yang baik

dengan Jenderal Ahmad Yani serta sejumlah pimpinan tentara lainnya. dr. Fahmi Idris (beberapa kali menjadi menteri pada masa pasca-orde Baru) menceritakan kepada saya pertemuan-pertemuannya dengan Jenderal Yani membicarakan bahaya PKI. “Yang membuat janji untuk kita jumpa Pak Yani adalah Rully yang anggota kami,” kata Fahmi. Rully Yani, mahasiswi Fakultas Psikologi, adalah anggota HMI yang cukup aktif, meski putri Yani yang lain tercatat sebagai anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berafiliasi kepada Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dekat dengan Presiden Sukarno.

Selain dengan Yani, Fahmi dan teman-temannya juga punya kontak teratur dengan Jenderal Achmad Sukendro, tokoh intel Angkatan Darat, Jenderal Alamsyah yang bertugas di Markas Besar Angkatan Darat dan Jenderal Muchlas rowi yang amat dekat dengan Nasution. “saya dan beberapa teman bahkan pernah diikutkan pada pendidikan *combat intelligence* di Jawa Barat,” cerita Fahmi kepada saya. Salah satu yang diajarkan dalam latihan intelijen itu ialah cara melumpuhkan lawan tanpa menggunakan senjata api.

Setelah Gestapu, dr. Sulastomo, Ketua HMI waktu itu, sibuk menyelamatkan anak-anak HMI yang diselundupkan sebagai petugas intel ke dalam PKI. “Wah, repot, mereka dikira PKI betulan,” kata sulastomo. Menyelundupkan anak-anak HMI ke dalam PKI dimungkinkan oleh adanya kerja sama HMI dengan jaringan intel Angkatan Darat.

Kelompok *keempat* ialah pihak asing dengan

kepentingan masing-masing. dalam hal ini Amerika yang kewalahan di Vietnam dan terus dihantui oleh teori domino, tentu saja tidak ingin melihat Sukarno lebih lama menjadi pelindung PKI yang tumbuh makin subur dalam alam Nasakom. Amerika makin lama makin cemas Indonesia akan jadi negara Komunis, suatu hal yang jelas akan mempersulit usaha mereka membendung perkembangan Komunisme di kawasan Asia tenggara.

Sementara itu, Inggris yang terpaksa menghabiskan dana dan daya mendukung serta melindungi Malaysia yang terus menerus diganyang oleh Sukarno (konfrontasi), tentu juga ingin segera mengakhiri ketegangan politik, bahkan bentrokan bersenjata yang sudah sering terjadi di perbatasan Kalimantan utara waktu itu. Jadi, masuk akal kalau CIA dan MI 6—masing-masing intel Amerika dan Inggris—berusaha dan memanfaatkan segala kesempatan untuk secepatnya mengakhiri kekuasaan Sukarno.

termasuk kelompok keempat ini adalah dinas rahasia Uni Soviet dan Tiongkok. hubungan Beijing-Moskow waktu itu sudah berangsur tegang. PKI memihak Beijing, sesuatu yang sejalan dengan politik luar negeri Sukarno yang membangun poros Jakarta, Phnom Penh, hanoi, Beijing, dan Pyongyang.

Bagaimana KGB dan dinas rahasia Tiongkok menerjemahkan ketegangan Beijing-Moskow itu ke dalam konflik segi Tiga TNI, Sukarno, dan PKI? Itulah yang hingga kini belum terungkap. Tapi, cerita tentang dokumen Gilchrist bisa ditafsirkan sebagai usaha KGB memprovokasi Sukarno agar secepatnya menindak apa yang disebut PKI

sebagai “dewan Jenderal”.

Demikian juga dengan apa yang waktu itu disebut sebagai “dokumen PKI” yang berisi rencana perampasan kekuasaan oleh golongan Komunis yang sempat jadi bahan debat panas antara Chaerul saleh dan D.N. Aidit dalam sebuah sidang kabinet di Istana Bogor pada Desember 1964. Ada kemungkinan “dokumen PKI” itu— seperti halnya dengan dokumen Gilchrist— adalah juga buatan intel asing sebagai bagian dari usaha memprovokasi Angkatan Darat untuk secepatnya bertindak terhadap PKI.



Astronaut Yuri Gagarin, Krushchov, Sukarno, dan Brezhnev di Moskow.

SEKARANG MARI KITA memperhatikan lebih jauh kelompok Angkatan Darat. Seperti sudah saya katakan tadi, pada pihak ini paling sedikit ada empat subkelompok dengan sikap berbeda waktu itu: subkelompok Nasution, Ahmad Yani, Soeharto, dan subkelompok perwira binaan Biro Khusus PKI.

Kendati memiliki perbedaan sikap terhadap Sukarno, ketiga subkelompok pertama itu sepakat dalam menghadapi PKI. Mereka semua anti-Komunis. Terhadap Sukarno, subkelompok Nasution menganut garis lebih keras, sementara pihak Yani mencoba merangkul sang Pemimpin Besar Revolusi dengan alasan dan harapan agar sang Presiden tidak terlalu dekat kepada PKI. Soeharto berdiri di sudut dengan perasaan yang diremehkan oleh kelompok Yani yang berkuasa. Kalau Nasution menilai Soeharto sebagai oportunis sejak zaman Revolusi, Yani atau orang-orang sekitar Panglima Angkatan Darat kabarnya menilai Soeharto sebagai “Jenderal bodoh”.

Yang jelas, menurut Letnan Jenderal TNI (Purn.) sayidiman suryohadiprojo, Soeharto dan perwira-perwira dalam kelompoknya yang duduk di Kostrad memandang kelompok Yani dengan perasaan cemburu. “ada perasaan inferior pada mereka,” kata sayidiman. Subkelompok Yani memang lebih elitis, kosmopolitan, dan umumnya berbahasa Belanda di antara mereka. Tentang hubungan Yani dengan Soeharto, sayidiman— seorang perwira menengah di markas Jenderal Yani waktu itu— selanjutnya bercerita:

Meskipun tidak ada ketentuan resmi tertulis namun Pak Yani

memperlakukan Pak Harto sebagai Orang Kedua di TNI-AD, setelah Menpangad. Mungkin Pak Yani melakukan itu untuk menjaga hubungan baik secara emosional dengan Pak Harto, karena ketika di lingkungan Kodam Diponegoro Pak Harto lebih senior dari Pak Yani. Jadi, Pak Yani selalu menjaga agar tidak ada perasaan kurang kondusif ketika sekarang keadaan terbalik, yaitu Pak Yani sebagai Menpangad dalam posisi senior terhadap Pak Harto yang Panglima Kostrad.

Meskipun Pak Yani selalu menghormati Pak Harto dan menjaga hubungan emosional yang baik itu, namun saya merasa bahwa Pak Harto tidak terlalu “sreg” dalam hubungan beliau dengan SUAD [Staf Umum Angkatan Darat]. Saya merasakan itu acap kali kalau menghadap Pak Harto untuk minta pendapat beliau tentang keadaan dan perkembangan organisasi. Saya merasa bahwa kami sebagai perwira SUAD oleh Pak Harto dianggap kelompok Yani dan sikap Pak Harto terhadap kami terasa “dingin”.

Yang tampaknya luput dari cerita sayidiman ialah kisah kekesalan Soeharto atas terpilihnya Ahmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat, menggantikan Ksda Nasution. Pada tulisannya dalam buku *34 Wartawan Istana Bicara Tentang Pak Harto* (2014), Daud Sinyal antara lain menulis,

Kepada Pak Gatot [Jenderal Gatot Subroto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu] dia [Soeharto] mengungkapkan kekecewaannya tidak jadi Panglima Angkatan Darat, padahal dia lebih senior dari Jenderal Yani Soeharto sudah berpangkat Brigadir Jenderal, sementara Yani masih Kolonel. Tapi, Pak Yani menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat karena adalah pilihan pribadi dari Presiden/Panglima tertinggi, sementara Pak Harto di mata Bung Karno dipandang sebagai perwira tinggi yang *koppig* (keras kepala). Pak Gatot menghibur Soeharto dengan mengatakan, “Waktumu akan sampai, malah akan mencapai kedudukan yang lebih tinggi lagi.”

Sebelum Gestapu, sikap kelompok Soeharto terhadap Sukarno dan PKI tidak mudah tercium. Kendati demikian tidak ada yang meragukan sikap Soeharto terhadap PKI.

Bukankah Pangkostrad itu pernah dimarahi Sukarno, ketika sebagai Panglima Diponegoro, dia berani mengingatkan sang Presiden mengenai bahaya Komunisme? Ini terjadi setelah pemilihan umum daerah yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 1957 dimenangkan oleh PKI.

Akibat perbedaan dalam menghadapi Sukarno itulah memuncaknya konflik antara subkelompok Nasution dan Yani pada awal 1965. Konon waktu itu (Januari 1965) pada suatu hari Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani memerintahkan Mayor Jenderal TNI Suprpto, salah seorang deputinya—kemudian lebih dikenal sebagai salah seorang Pahlawan Revolusi—menangkap Jenderal Nasution. Perintah yang tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan loyalitas Yani kepada Sukarno itu dibatalkan secara mendadak beberapa hari kemudian, sehingga bentrok antara pendukung masing-masing kubu yang nyaris terjadi, berhasil terhindarkan.

Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Abdul Kadir Besar, S.H., seorang anggota kelompok Nasution, mengisahkan kepada saya bagaimana kubu mereka sudah menyiapkan senjata untuk secara fisik melawan jika Menko Hankam Kasab itu ditangkap. Ketegangan kabarnya terhindarkan hanya karena campur tangan sejumlah Jenderal senior seperti Jenderal Sarbini, Jenderal Soeharto, Jenderal R. Sudirman, dan Jenderal Basuki Rahmat. Mereka beramai-ramai menentang rencana Yani tersebut.

Jenderal Abdul Kadir Besar menjelaskan, ketegangan sebenarnya sudah muncul ke permukaan sebelum rencana

penangkapan yang batal itu. Pada bulan-bulan terakhir 1964, Yani memerintahkan penarikan pasukan dari Markas Besar Angkatan Darat yang berjaga di rumah Nasution. Siliwangi merespons tindakan Yani dengan mengirimkan satu peleton tentara mengawal kediaman Panglima pertama mereka. Maka, ketika berita rencana penangkapan itu sampai kepada orang-orang di sekitar Nasution, pasukan pengawal dari siliwangi itu juga siap siaga.

Sebelum konflik yang nyaris menyebabkan “pertempuran” antara kelompok Yani dan kelompok Nasution itu, Jenderal Muchlas rowi—salah seorang Komandan Batalion di Brawijaya semasa Revolusi, mantan Kepala Pusat Perawatan rohani Angkatan Darat (Pusroh ad) dan terakhir duta Besar di turki— pernah dimarahi oleh Jenderal Yani karena menjalankan perintah Nasution tanpa sepengetahuan Pangad. Padahal, waktu itu Jenderal rowi sudah dimutasikan dari Mabes Angkatan Darat ke Kantor Menko Hankam/KSAB Nasution.

Anehnya dalam kemarahan itu, Yani sekalian juga menyatakan sikapnya yang secara pribadi memusuhi Nasution. Menurut penuturan Jenderal Rowi dalam memoarnya, *Catatan Perjalanan Hidup, Pemikiran dan Pemahaman M. Muchlas Rowi* yang terbit pada tahun 2000, Yani dikutip berkata kepadanya:

Asal ye [kamu] tahu saja bahwa saya tidak respek lagi kepada Jenderal Nasution, karena dia berani menentang Presiden Soekarno. Saya tidak akan menginjakkan kaki lagi di kantor Menko Hankam.

Apakah sikap memusuhi Nasution ini menunjukkan Yani telah tunduk tanpa reserve kepada Sukarno? ternyata tidak juga. hubungan sehari-hari Yani dengan Sukarno memang tetap baik, antara lain karena Yani merasa harus memenangi persaingan dengan PKI dalam merangkul Paduka Yang Mulia Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi. Tapi, ketika pada 14 Juni 1965 di Istana olahraga Senayan Jenderal Yani memberi taklimat kepada para perwira sehubungan dengan dibantainya Pembantu Letnan satu (Peltu) sudjono oleh Btl di Bandar Betsy, sumatra utara, Panglima Angkatan Darat tersebut dikutip sebagai berkata,

Als de grote Bung veel vrouwen wil hebben, kan hij zijn gang gaan. Maar als de grote Bung met de PKI will gaan flirten, dan heeft hij met the Angkatan Darat te maken.

Terjemahannya kira-kira, kalau Bung Besar kepingin punya kekasih banyak, biarkan saja. Tapi, bila Bung Besar mau main mata dengan PKI, maka dia akan berurusan dengan Angkatan Darat.

PETER DALE SCOT SEORANG SARJANA Amerika, kemudian melihat pertemuan para Jenderal Angkatan Darat pada Januari 1965 yang menggagalkan rencana penangkapan Nasution itu yang justru meyakinkan Sukarno untuk tidak lagi percaya kepada Yani. dengan kata lain, kesetiaan Yani kepada Pemimpin Besar Revolusi mulai diragukan Sukarno. Tampaknya rencana penyingkiran Yani mulai bersemi di kepala Sukarno sejak itu.

KETIKA MEMBICARAKAN konflik dalam Angkatan Darat waktu itu, faktor para perwira dari Kodam Diponegoro yang dimunculkan secara menarik oleh Cornell Paper tentulah harus dibicarakan. Pengalaman saya di tengah masyarakat Jawa Tengah ketika menjadi pelajar Sekolah Menengah Atas (sMa) di solo selama Tiga tahun dan sebagai wartawan yang meliput operasi militer pembersihan elemen-elemen Gestapu dalam militer di Jawa Tengah pada november 1965, serta bacaan-bacaan tentang masyarakat dan budaya Jawa, membawa saya pada kesimpulan, fenomena yang ditengarai para ahli dari Cornell University itu bukannya tidak ada.

Kendati demikian, tatkala beraksi pada satu Oktober, tindakan para perwira di Jawa Tengah itu adalah hanya bagian dari gerakan besar yang dirancang secara terpusat oleh Biro Khusus PKI di Jakarta. di kemudian hari, setelah penangkapan dan interogasi orang-orang Komunis yang militer maupun sipil, terbongkarlah sebagian besar jaringan Biro Khusus tersebut.

Mengenai jaringan tersebut, menarik untuk menyimak informasi yang saya dapatkan dari Brigjen TNI (Purn.) dr. Saafroedin Bahar yang pernah menjadi hakim militer di Mahkamah Militer Kodam III/17 Agustus di sumatra Barat. Proses pemeriksaannya berhasil membongkar jaringan Biro Khusus PKI di wilayah sumatra Barat dan tengah. “di sumatra Barat, Kepala Biro Khusus ialah Baharuddin Hanafi, dengan wakilnya Jayusman alias Mamak. di riau, Ketua Biro Khususnya ialah Mohammad amin Zein. Mereka ini selalu berusaha secara sistematis

memengaruhi perwira-perwira teras Kodam III/17 Agustus.

“Mereka juga ikut dalam rapat-rapat Biro Khusus yang dipimpin D.N. Aidit,” tulis saafroedin Bahar lewat surat elektroniknya kepada saya pada april 2012. Informasi saafroedin Bahar ini memungkinkan kita menyimpulkan bahwa Biro Khusus PKI bekerja di semua instansi dan daerah militer.

Bahwa perwira-perwira Diponegoro di Jawa Tengah itu mengeluhkan gaya hidup para Jenderal pimpinan Angkatan Darat di Jakarta yang mereka anggap mewah dan jauh dari kesederhanaan, bagi mereka yang kenal budaya Jawa Tengah masa itu, memang tidak sulit dimengerti. Tapi, yang membungkus keluhan itu dengan ideologi dan mengarahkannya menjadi suatu gerakan politik dan akhirnya militer, jelas adalah PKI. dengan kata lain, para perwira di Kodam Diponegoro itu telah berhasil dibina oleh agen-agen Biro Khusus PKI.

Penting untuk dicatat bahwa keluhan itu sama sekali tidak ditujukan kepada Soeharto yang bukan saja tidak termasuk kelompok Yani, melainkan juga tampaknya karena kehidupan ekonominya sebagai Jenderal senior waktu itu kabarnya memang tergolong sederhana. Soeharto dan para anak buahnya di Kostrad juga memang jauh dari gaya kehidupan mewah dan metropolitan.

DAYINO, SEORANG TOKOH PSI Yogyakarta dan mantan pemuda Patuk, teman Soeharto pada masa Revolusi di Yogyakarta, mengungkapkan kepada saya di Yogyakarta pada 1984, menjelang Gestapu Ibu tien Soeharto pernah

menyampaikan kepadanya rencana Soeharto keluar dari tentara. Menurut istrinya, Soeharto merencanakan mencari pekerjaan lain untuk membiayai keluarga yang tidak lagi bisa ditopang oleh penghasilannya sebagai seorang Panglima Kostrad.

Dalam memoarnya, Jusuf Wanandi membenarkan cerita dayino tentang rencana Soeharto keluar dari militer. Tapi, alasannya lain. Menurut Jusuf Wanandi—ceritanya bersumber pada Jenderal sudjono humardani—Soeharto memutuskan akan berhenti dari tentara karena kecewa tidak diangkat menjadi Panglima Kolaga dalam rangka dwikora pengganyangan Malaysia. Jabatan tersebut diberikan Sukarno kepada Laksamana Madya udara Omar Dani, Panglima Angkatan Udara, yang jauh lebih junior dari Soeharto. “dia menulis surat pengunduran dirinya dari Angkatan Darat pada bulan Mei [1965], tapi diintersep oleh Letnan Kolonel sudjono humardani hingga tidak sampai ke tangan Nasution,” tulis Wanandi.

Mayjen Pranoto reksosamodra dalam memoarnya, *Catatan Jenderal Pranoto Reksosamodra*, juga punya cerita menarik tentang Soeharto berencana mundur dari profesi militer. Sebagai mantan Panglima Kodam Diponegoro di semarang [digantikan oleh Pranoto], tulisnya,

Soeharto menjadi sasaran pemeriksaan Inspektur Jenderal Angkatan Darat atas perintah KSAD Nasution. Menurut Pranoto, penyelewengan yang dilakukan [Soeharto] berupa barter liar, monopoli cengkih dari asosiasi PABRIK-PABRIK rokok kretek Jawa Tengah (PPRK), lalu penjualan besi tua (*scrab material*) yang disponsori oleh orang-orang Tionghoa yang bernama Liem Sioe Liong, Oei Tek Young, dan Bob Hasan.

Akibat terbongkarnya bintik noda hitam kasus Finec [Financial and Economy] ini timbul pula niat Kolonel Soeharto untuk mengundurkan diri dari Dinas Angkatan Darat.

Jenderal Nasution, yang mengetahui titik kelemahan psikologis Kolonel Soeharto ini, menolak niatan pengunduran diri Soeharto dari dinas militernya.

KESAN SAYA, PARA PERWIRA Diponegoro yang terlibat Gestapu, sebenarnya tidak semuanya Komunis. Beberapa di antara mereka hanya Sukarnoïs. Tapi, rata-rata mereka menganut ideologi Nasionalisme dengan lapisan xenofobia yang kental (penuh curiga kepada orang asing, terutama orang kulit putih) disertai pandangan kerakyatan yang ditandai kesederhanaan dan keprihatinan hidup. Banyak di antara mereka tergolong penganut kepercayaan (Kebatinan/Kejawen). hal demikian itu umum ditemukan di kalangan kaum abangan di Jawa Tengah pada masa tersebut. Sebagai Sukarnoïs yang kerakyatan, mereka memang tidak sulit dihasut oleh Biro Khusus PKI untuk melawan “dewan Jenderal yang bekerja sama dengan CIA dan tidak loyal kepada Pemimpin Besar Revolusi”.[]

BAYANGAN 1948

MADIUN

Pembantaian besar-besaran di Jawa Tengah dan Jawa Timur pasca-operasi Gestapu, tidak bisa dilepaskan dari persepsi dan trauma golongan Islam dan Nasionalis kepada kaum Komunis yang membantai mereka setelah PKI menguasai Madiun pada September 1948. Itu kesan kuat yang saya peroleh dari banyak tokoh masyarakat Jawa Tengah ketika meliput operasi RPKAD dalam rangka pembasmian Gestapu di kalangan militer. Jangan lupa bahwa Gestapu terjadi hanya 17 tahun setelah peristiwa pemberontakan berdarah Komunis di Madiun tersebut. Ingatan banyak orang di Jawa Timur dan tengah terhadap kekejaman Komunis di Madiun pada 1948 masih sangat segar ketika Gestapu terjadi.

Sebagai reporter muda yang meliput operasi anti-Gestapu pada november 1965 di Jawa Tengah waktu itu, saya banyak berjumpa mereka yang dulu mengalami Peristiwa Madiun. Masih dengan ingatan jernih mereka berbicara mengenai kekejaman PKI waktu itu. Karena itulah, mereka sangat takut jika Gestapu/ PKI menang. Latar belakang seperti inilah yang membuat mereka

umumnya bersikap dan bertekad: “dibunuh atau membunuh duluan”.

Dengan memperhitungkan faktor trauma Madiun itulah, antara lain, kita harus mengerti terjadinya pembantaian besar-besaran pengikut PKI, atau yang dituduh PKI, di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada masa itu.

LALU SIAPA SEBENARNYA yang berada di balik Gestapu? PKI sendiri, kata pemerintahan orde Baru. Akibat pertentangan internal Angkatan Darat, kata PKI dan para ahli Indonesia di Cornell university. Cla, kata Peter dale scott. Soeharto, kata Wertheim. PKI, tentara dan nekolim, kata Presiden Sukarno.[]

SUKARNO, SOEHARTO, DAN TRADISI DAULAT

Aksi pertama Gestapu muncul dalam bentuk penculikan. Sejumlah Jenderal menjadi sasaran penculikan di kediaman masing-masing. oleh karena itu, saya ingin memulai diskusi tentang siapa saja kira-kira yang mungkin berdiri di balik Gestapu dengan menyegarkan ingatan kita semua kepada tradisi **daulat**, **mendaulat**, dan **pendaulatan** yang pada zaman Revolusi sering muncul dalam bentuk penculikan. Yang paling mencolok tentu saja penculikan Sukarno dan Hatta oleh para pemuda Jakarta menjelang Proklamasi 1945. Kedua pemimpin Indonesia itu digiring dengan “setengah dipaksa” oleh para pemuda ke Rengas Dengklok (Jawa Barat) untuk didaulat mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. di kemudian hari juga ada penculikan Perdana Menteri syahrir di solo oleh elemen pemuda dan tentara yang antidiplomasi. dengan penculikan syahrir diharapkan perundingan dengan Belanda bisa dicegah. Setelah didaulat, kabinet syahrir bubar, tapi sang Perdana Menteri selamat. Kabinet yang menggantikannya, dipimpin oleh amir syarifuddin, tetap saja menjalankan perundingan. dengan restu Sukarno, tentu saja. Syahrir, Sukarno, dan Hatta diculik tanpa

dianiaya secara fisik. Tapi, penculikan Dr. Muwardi, pemimpin Barisan Banteng di solo, berakhir dengan kematian. hingga kini belum juga terungkap siapa persisnya yang menculik dan bagaimana tewasnya dr. Muwardi. Tidak pernah jelas apakah memang dr. Muwardi diculik untuk dibunuh atau kematiannya disebabkan oleh sesuatu yang berada di luar rencana. Kasus pendaulatan cukup banyak terjadi pada zaman revolusi, karena pada zaman itu pendaulatan menjadi salah satu modus operandi perubahan/pergantian elite atau kebijakan. dalam organisasi ketentaraan pada awal Revolusi, ketika sistem pergantian komandan belum tercipta, daulat-mendaulat sering ditempuh dalam pergantian pimpinan pasukan. hal demikian dengan menarik dikisahkan oleh Jenderal TNI Abdul haris Nasution dalam bagian awal memoarnya.

Yang ingin saya tekankan sehubungan dengan cerita culikmenculik tersebut ialah kegiatan culik sebagai modus penting dalam perubahan elite di sebuah zaman ketika aturan main yang ada terutama adalah aturan main Revolusi.

Namun, apa pun nama dan ceritanya, culik sebagai cara mendaulat rupanya telah mengendap rapi dalam sejarah dan budaya politik Indonesia. Terutama bagi generasi yang mengalami Revolusi fisik dahulu. Dalam pidatonya pada Rapat Pimpinan ABRI di Pekan Baru pada 1980, misalnya, Presiden Soeharto masih berbicara tentang penculikan anggota sebagai cara mencegah terjadinya kesepakatan di MPR jika muncul usaha

mengubah undang-undang dasar 45.

PRESIDEN SUKARNO YANG MAKIN KEWALAHAN menghadapi Angkatan Darat—terus menolak Nasakom, tidak secara serius melakukan konfrontasi dengan Malaysia dan makin sibuk mengatur barisan kaum anti-Komunis—mendorong sang Presiden tiba pada kesimpulan untuk tidak punya pilihan lain, kecuali mengganti Panglima Angkatan Darat, Letjen Ahmad Yani.

Penggantian pimpinan Angkatan Darat dengan damai telah Sukarno lakukan kepada Nasution pada 1962. Tidak ada ketegangan yang terjadi ketika Nasution digantikan oleh Ahmad Yani waktu itu. Pergantian pimpinan Angkatan Darat terjadi setelah sebelumnya, pada 1960—dengan dukungan para perwira senior Angkatan Darat—Nasution menolak melepaskan jabatan Ksad. Pada Juni 1962 dengan janji akan diangkat menjadi Panglima ABRI, Nasution berhasil dibujuk menyerahkan jabatan Ksad kepada Ahmad Yani.

Namun kemudian, menurut Sukarno, para pimpinan angkatan lain tidak siap berada di bawah pimpinan seorang Jenderal Angkatan Darat. Sukarno memperlihatkan bukti dengan menunjukkan surat Omar Dani yang menyebutkan bahwa Angkatan Udara tidak bersedia berada di bawah seorang Jenderal Angkatan Darat. Nasution yang telah terkecoh itu akhirnya harus puas hanya menjadi Kepala staf Angkatan Bersenjata (KsaB) tanpa garis komando ke pasukan. Sejak saat itu, berakhirilah karier panjang Nasution sebagai komandan yang mengendalikan

pasukan. Tidak terlalu sulit untuk mencurigai surat Omar Dani dibuat atas petunjuk Sukarno.

Sebagai rangkaian dari usahanya menguasai militer, Sukarno menciptakan Komando operasi tertinggi (Koti) pada Juli 1963 dengan dirinya sebagai Panglima Besar. Koti sebenarnya adalah kelanjutan dari Koti Pembebasan Irian Barat (Koti Pemirbar) yang dibentuk pada Januari 1962. Setelah soal Irian Barat selesai dan konfrontasi terhadap Malaysia menjadi kesibukan baru, Koti urusan Irian Barat bertransformasi menjadi Koti urusan konfrontasi dengan Malaysia. Waktu itu, Nasution sudah tersingkirkan sehingga Sukarno—dengan menggunakan posisinya sebagai pemimpin tertinggi militer di Koti—bisa lebih leluasa mengontrol tentara.

LEWAT KOTI VERSI TERAKHIR tersebut, Sukarno praktis telah menjadi Panglima ABRI (Pangti *in function* menurut istilah Sukarno) yang memimpin tentara dengan dibantu oleh seorang Wakil Panglima Besar (A.H. Nasution), seorang Kepala staf (Ahmad Yani), dan empat deputy (Intelijen, operasi, Pengerahan tenaga, Logistik dan Politik sosial ekonomi).

Perlu diingat bahwa deputy Intelijen ialah dr. Subandrio yang waktu itu mendapat pangkat kehormatan sebagai Laksamana udara. dari posisi itulah, Subandrio kemudian juga menjadi Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI). dengan Koti versi konfrontasi Malaysia tersebut, Istana secara otomatis telah menjadi Mabes ABRI, jauh sebelum di kemudian hari (1969) Soeharto, mengintegrasikan

tentara dan membangun Mabes ABRI yang kini berkantor di Cilangkap, Jakarta timur.



Bambang Widjanarko, ajudan Presiden Sukarno pada 1965.

Pada 1965, suhu politik domestik, regional, dan internasional (Perang dingin) makin mendidih. Keengganan Angkatan Darat melaksanakan perintah konfrontasi, kesibukan mereka melindungi musuh-musuh PKI dan menggagalkan agenda nasakomisasi, di mata Pemimpin Besar Revolusi tersisa hanya ada satu jalan untuk menyingkirkan Jenderal Yani dan para pembantunya. Jalan itu adalah **daulat** dalam bentuk penculikan ala Rengas Dengklok atau ala penculikan

syahrir di solo. Artinya, diculik untuk didaulat melepaskan posisi pimpinan Angkatan Darat. Cara melengserkan Nasution Tiga tahun sebelumnya tidak bisa lagi dipakai Sukarno.

Dari titik inilah, kita sebaiknya mengerti bahwa keputusan Sukarno—sebagai yang dikisahkan Kolonel Bambang Widjanarko, dalam buku *The Devious Dalang*—menggantikan Yani dengan cara daulat . Menurut penuturan Widjanarko, pada empat Agustus 1965 Presiden Sukarno memanggil komandan pengawalnya, Letnan Kolonel Untung, untuk menerima perintah melaksanakan rencana sang Presiden.

Saya sangat sadar bahwa kesaksian Bambang Widjanarko—ajudan senior yang “melekat” pada Sukarno—itu disangsikan sejumlah orang, terutama para pengikut dan pembela Sukarno. Tapi, saya juga yakin bahwa Kolonel (KKo) Bambang Widjanarko dan para interogatornya bukan orang-orang yang kreatif dan canggih serta terampil mengarang cerita berbau detektif yang berkisah tentang seorang Presiden merancang menculik pemimpin tentaranya dengan menggunakan pengawal pribadi sang Presiden sendiri.

Dengan kata lain, mempertimbangkan konteks dan situasi politik masa itu, saya melihat banyak kebenaran dalam kesaksian Kolonel Bambang tersebut. Lagi pula kesaksian itu diberikan setelah Sukarno meninggal pada Juni 1970. hasil interogasi tim Pemeriksa Pusat (teperpu) atas diri Bambang itu secara resmi tidak pernah diumumkan, tidak pernah dipakai untuk menuduh

Sukarno terlibat Gestapu, bahkan sama sekali tidak pernah dipergunakan di pengadilan. Kita tahu mengenai adanya dokumen itu setelah bocor atau sengaja dibocorkan ke luar negeri kemudian diterbitkan di negeri Belanda.

Sumber-sumber yang dekat dengan Soeharto dan Nasution pada hari-hari pertama pasca-Gestapu yakin bahwa sejak Untung ditangkap dalam pelariannya, Soeharto, Nasution, dan orang-orang di sekitar mereka sebenarnya sudah mencium keterlibatan Sukarno dalam Gestapu. Salah satu sumber kecurigaan ialah desakan Untung kepada para penangkapnya untuk memperhadapkan dirinya langsung kepada Sukarno, artinya tidak ke Kostrad. Cerita mengenai ini waktu itu tidak begitu mendapat publikasi di dalam negeri, tapi dilaporkan oleh John Hughes, wartawan *The Christian Science Monitor*, dalam korannya yang terbit di Boston, Amerika Serikat. Soal tertangkapnya Untung ditulis kembali dalam buku John Hughes, *Indonesian Upheaval* (1967),

... Letnan Kolonel Untung berharap kemurahan hati Presiden kepada dirinya. Seperti telah kami katakan bahwa setelah tertangkap Untung minta diperhadapkan langsung kepada Sukarno dengan kepercayaan dan harapan Presiden akan mengerti dan memaafkan dirinya.

MEGAWATI, BAYI PEREMPUAN SUKARNO

Sehubungan dengan ini juga menarik mendengar kesaksian Patnaik yang diceritakannya kepada sejarahwan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), a.B. Lopian di hotel oberoy, Bali, pada 31 Januari 1993. Shri Biju Patnaik adalah seorang pilot dari India yang pernah diutus Perdana Menteri Nehru ke Yogyakarta pada zaman Revolusi dengan menerobos Blokade Belanda. Patnaik berada di Yogyakarta ketika Megawati lahir. Waktu itu Yogyakarta dilanda angin ribut, dan Sukarno bertanya kepada Patnaik bahasa sansekerta buat fenomena alam tersebut. “Mega,” kata Patnaik. Maka bayi perempuan Sukarno, yang kelak menjadi Presiden kelima Republik Indonesia itu, diberi nama Megawati oleh ayahandanya. Patnaik adalah sahabat banyak pembesar Indonesia. dengan pesawat terbangnya dia menerbangkan sejumlah pejabat republik dari Yogyakarta ke sumatra dan juga ke India. Patnaik jumpa Bung Karno untuk terakhir kalinya pada 30 September 1965 tengah malam di Istana Merdeka. Patnaik menunggu lama sebelum Sukarno selesai memberi pidato di Istora Senayan. Pertemuan terjadi hanya beberapa jam sebelum Gestapu bergerak. Setelah pembicaraan penting mengenai konflik India-

Pakistan selesai, dengan janji Sukarno tidak akan membantu Pakistan menyerang India, Patnaik diminta Sukarno agar meninggalkan Jakarta sebelum subuh. “sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang,” kata Sukarno. Pertanyaannya, mengapa dan buat apa lapangan terbang Kemayoran akan ditutup oleh Sukarno setelah subuh esok harinya?

Masih di sekitar kemungkinan terlibat-tidaknya Sukarno, Jenderal Yoga sugomo, Kepala Intel Kostrad pada saat Gestapu, adalah perwira yang pada pagi hari satu Oktober yang meyakinkan Pangkostrad Soeharto bahwa PKI ada di balik Gestapu. Indikator Yoga—sebagaimana yang diceritakan dalam buku *Memori Jenderal Yoga*—ialah Letkol Untung yang dikenalnya secara pribadi ketika bertugas di sumatra Barat dalam operasi penumpasan PRRI. Menurut Yoga bahkan jauh sebelumnya, semasa masih di Jawa Tengah, Untung sudah dikenal sebagai perwira beraliran kiri.

Mendengar siaran radio yang menyebut nama Untung sebagai pemimpin Gestapu, Yoga tidak ragu lagi, ini pekerjaan PKI. Pertanyaan Soeharto selanjutnya pada taklimat di Kostrad pagi itu, apakah kira-kira Presiden Sukarno terlibat dalam gerakan tersebut? Jawab Yoga dengan yakin, “ya.” Kepala Intel Kostrad itu—orang Indonesia satu-satunya yang pada masa pendudukan bala tentara Jepang mendapat pendidikan tinggi intel di Jepang—berpegang pada keyakinan Pangad Jenderal TNI Ahmad Yani bahwa PKI tidak akan berani melawan Angkatan Darat karena Presiden ada di belakang Angkatan

Darat. “dengan demikian, PKI baru akan berani bergerak kalau Presiden berada di belakang mereka.”



Jenderal Yoga sugomo, Kepala Intel Kostrad.
Laporan John hughes dan kesaksian Patnaik makin

memperkuat kecurigaan bahwa Sukarno tahu Gestapu akan melakukan operasi. dalam laporan Pengembalian Supersemar kepada Ketua MPRS pada satu Februari 1967, Soeharto antara lain menyampaikan

[K]epada Presiden Sukarno dirasakan perlu diminta pertanggungjawaban baik dalam rangka ketatanegaraan maupun pidana.

Tidak dijelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan “pidana” oleh Soeharto. Apakah itu berarti Soeharto mempunyai bukti keterlibatan Sukarno dalam Gestapu? Lalu, tindakan apa yang harus dilakukan terhadap Pemimpin Besar Revolusi tersebut?

Menghadapi pertanyaan itulah kabarnya, untuk pertama kalinya setelah Gestapu, terjadi perbedaan antara Jenderal Nasution dan Mayjen Soeharto. Nasution ingin Sukarno diadili, sementara Soeharto bertekad menyelesaikannya secara politis, bukan melalui jalan hukum. Kalkulasi Soeharto, pengaruh Presiden Sukarno dalam ABRI dan masyarakat waktu itu masih sangat kuat. Kalau Sukarno diadili, perang saudara hampir pasti bakal sulit dihindari. “untuk tujuan itulah pengadilan atas diri Untung diarahkan agar tidak mengungkap keterlibatan Sukarno,” kata seorang pensiunan hakim Mahmillub kepada saya sekian tahun silam di Makkah, ketika kami sedang melakukan ibadah umrah bersama.

sementara Itu, Menjelang Gestapu memang beredar cerita yang menyebut Yani akan dicopot dari posisi Pangad untuk didudukkan pada tempat yang lebih tinggi, tapi tanpa kontrol terhadap tentara. Trik seperti ini telah

dilakukan Sukarno kepada Nasution sebelumnya. untuk Jenderal Yani kabarnya Sukarno merencanakan menciptakan jabatan Wakil Perdana Menteri IV di samping Tiga Wakil Perdana Menteri yang sudah ada.

Tidak pernah diperoleh informasi mengapa rencana Sukarno itu—kalau memang pernah ada—tidak terlaksana. Apakah Yani, dengan dukungan para Jenderal senior Angkatan Darat, menolak “ditendang ke atas”? Mungkinkah karena penolakan itu Sukarno tidak punya pilihan lain, kecuali melakukan penggantian dengan cara daulat?

Yang kita tahu, menurut rencana pada satu Oktober, Jumat pagi, Yani diagendakan menghadap Presiden. Kepada seorang stafnya, Yani konon sudah bercerita bahwa mungkin di Istana dia akan diminta melepaskan jabatan Panglima Angkatan Darat. Apakah Yani akan menerima atau menolak perintah Sukarno tersebut? tidak tersedia informasi mengenai itu.

NAH, SEKARANG TENTANG Untung. Mengingat bahwa salah seorang komandan batalion pengawal Presiden ini sudah lama berada dalam pembinaan Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI, rencana daulat gubahan Sukarno itu tentu saja mudah bocor. Menjadi tentara binaan Biro Khusus PKI sebenarnya bukan pengalaman baru bagi Untung. Menurut Soeharto, Untung sudah dekat dengan PKI sejak sebelum bertugas di resimen solo, pada 1950. Soeharto yang Komandan resimen solo tahu bahwa Untung, jauh sebelum dibina

Syam, sudah merupakan perwira binaan alimin, seorang tokoh senior PKI. Sumber lain bahkan tahu Untung terlibat Peristiwa Madiun.

Dan kalau benar bahwa Syam juga agen tentara (surat senjatanya sebagai Intel Kodam di Jakarta, kononnya, ditandatangani sendiri oleh Pangdam Jaya waktu itu, Mayjen TNI Umar Wirahadikusuma) dan juga mungkin agen intel asing—paling sedikit menurut cerita dr. Subandrio dan keyakinan Prof. Wertheim di amsterdam—maka bisa dibayangkan dinamika macam apa yang dihasilkan oleh bocornya rencana Sukarno ke PKI dan mungkin juga ke berbagai jaringan dinas rahasia asing.[]

DAULAT, PEMBANTAIAN

BUKAN

Setelah membaca hampir semua proses Mahmillub, analisis sejumlah pakar serta sejumlah buku catatan pengalaman para pelaku, saya hampir yakin bahwa pengertian Sukarno dan Soeharto, demikian juga Kolonel Latif, Brigjen Supardjo, Untung, D.N. Aidit, dan juga Omar Dani mengenai penculikan, semua sama. Yang direncanakan bukan pembantaian seperti yang kemudian terjadi, melainkan penculikan untuk pendaulatan. Jika kesimpulan saya ini benar, maka masuk akal kalau Soeharto mengetahui, tapi membiarkan gerakan daulat terse-but. Alasan Soeharto, kegiatan yang digagas Sukarno dan dilaksanakan Untung adalah keputusan dan tindakan politik yang tidak bisa dihalangi olehnya. Lagi pula perintah Sukarno itu juga tidak merugikan Panglima Kostrad tersebut. Juga harus diingat, seandainya pun Soeharto berkeputusan mencegah Gestapu, Kostrad waktu itu tidak punya pasukan tetap yang selalu siap melaksanakan perintah Panglima Kostrad seperti sekarang ini. Yani dan para pembantunya di Markas Besar Angkatan Darat akan diculik untuk dihadapkan kepada Sukarno. Mungkin dengan tuduhan tidak loyal menjalankan kebijakan Panglima tertinggi, terutama dalam soal

konfrontasi dengan Malaysia dan soal pembangkangannya terhadap Nasakom dan penolakannya kepada rencana pembentukan Angkatan Kelima. Lebih kurang begitulah mungkin skenario Sukarno. dengan cara dan alasan itu, Jenderal Yani akan didaulat untuk selanjutnya digantikan oleh Jenderal pilihan Sukarno. Itulah menurut dugaan saya yang paling mungkin ada di kepala Sukarno waktu itu. Itu pula yang kemungkinan besar disampaikan Untung kepada teman-teman berkomplotnya, Syam, Kolonel Latif, dan Brigjen TNI Supardjo. dan itu jugalah yang kemungkinan besar disampaikan Latif kepada Soeharto di Rumah Sakit Gatot subroto, beberapa jam sebelum operasi dilancarkan.

Saya hampir yakin D.N. Aidit juga mengerti Gestapu sebagai hanya pendaulatan atas pimpinan Angkatan Darat. Aidit dan PKI pasti berharap pimpinan Angkatan Darat pasca-Yani akan lebih mudah diatur oleh Sukarno. dengan cara itu diharapkan Angkatan Darat akan mendukung gagasan Nasakom dan lebih bersahabat kepada PKI, seperti sikap Angkatan Udara di bawah Omar Dani.

Inilah yang saya yakini penjelasannya mengapa Aidit memerintahkan Kepala Biro Khususnya, Syam Kamaruzaman, membantu para perwira “berpikiran maju” yang telah lama mereka bina itu. Pada tingkat ini, pertanyaan yang mahapenting ialah bagaimana rencana pendaulatan yang digagas Sukarno dan “didukung” Biro Khusus PKI itu kemudian berubah menjadi “pesta” pembantaian para Jenderal?[]

TEGO LARANE ORA TEGO PATINE

Tentang Soeharto, Jenderal Nasution punya komentar yang menarik. “Soeharto bukan Komunis, tapi dari sejak di Yogyakarta dulu adalah seorang oportunis,” kata Nasution kepada saya pada november 1984. Tidak berapa lama sebelum jatuh sakit menjelang akhir hidupnya, yang juga merupakan pertemuan terakhir saya dengan Jenderal Besar tersebut, penegasan bahwa Soeharto hanya seorang oportunis, diulanginya sekali lagi.

Sebagai Jenderal paling senior di lapangan dalam jajaran Angkatan Darat, kesempatan Soeharto menduduki posisi puncak angkatannya bakal terbuka setelah Yani tersingkir. Psikologi inilah menurut dugaan saya yang dimanfaatkan Kolonel Latif ketika menemui Soeharto di Rumah Sakit Gatot subroto beberapa jam sebelum operasi penculikan dimulai. Tentang pertemuannya dengan Soeharto malam tersebut, dalam pembelaan dirinya di depan Mahkamah Militer tinggi (Mahmilti) yang mengadilinya di Bandung pada Mei 1978, Kolonel Latif menjelaskan:

... saya pada malam itu di samping memang menengok putranda [Tommy Soeharto] yang sedang terkena musibah [tersiram sup panas] sekaligus untuk melaporkan akan adanya

gerakan pada esok paginya untuk menggagalkan rencana *Coup D'Etat* dari Dewan Jenderal di mana beliau sudah tahu sebelumnya.

Memang saya berpendapat bahwa satu-satunya adalah beliaulah yang saya anggap loyal terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno dan saya kenal semenjak dari Yogyakarta siapa sebenarnya Bapak Jenderal Soeharto itu Saya memercayai kepemimpinan beliau seandainya berhasil dapat menggagalkan usaha *coup* Dewan Jenderal beliaulah yang terpilih sebagai tampuk pimpinan sebagai pembantu setia Presiden.

Dari cerita Latif di depan Mahmilti itu bisa diduga, yang mereka, para pelaku makar itu, harapkan dari pertemuan sang Kolonel dengan Soeharto bukan bantuan untuk operasi malam itu, melainkan pengertian dan sikap lunak setelah operasi Gestapu berhasil “menggagalkan *Coup D'Etat* dewan Jenderal”. Latif dan teman-temannya pastilah tahu adanya ketidakserasian antara Soeharto dan Yani, dan karena itu mereka berharap Soeharto sebagai Pangad pengganti Yani nantinya tidak akan bereaksi keras kepada Gestapu sebagai kegiatan pendaulatan. Yang rupanya kurang dimaklumi Kolonel Latif, Sukarno tidak menyenangi Soeharto. Sukarno lebih senang kepada Jenderal Pranoto reksosamodra yang berkecenderungan kiri dan loyalitasnya kepada Pemimpin Besar Revolusi dijamin sang Presiden.

Tentang sikap Soeharto malam itu masih ada dua hal yang juga harus dipertimbangkan: *Pertama*, dari percakapan singkatnya dengan Latif, hampir bisa dipastikan Soeharto tidak tahu bahwa di balik Gestapu ada Biro Khusus PKI yang berperan penting.

Kedua, mengingat terbatasnya waktu pertemuan Latif

dan Soeharto, kemungkinan besar Panglima Kostrad itu bahkan tidak sempat mendapatkan informasi mengenai nama-nama pemimpin gerakan yang memudahkan baginya menduga siapa saja yang sebenarnya berdiri di balik gerakan malam itu.

Yang dilaporkan Kolonel Latif, menurut pengakuannya, hanyalah bahwa mereka, para perwira Angkatan Darat, akan bertindak menyelamatkan Presiden Sukarno. Bukankah beberapa hari sebelumnya di rumah kediaman pribadi sang Jenderal, Latif sudah melaporkan kepada Soeharto mengenai adanya “dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta?” dari informasi Latif, Soeharto tahu dirinya tidak akan jadi sasaran. Jadi aman. Kalau pasti aman dan dibayangkan oleh Latif ada kemungkinan mendapat jabatan yang lebih tinggi, buat apa juga Soeharto harus repot-repot di tengah malam, bukan?



Kolonel a. Latif.

Dengan menyembunyikan informasi dari Kolonel Latif tentang rencana penculikan Panglima Angkatan Darat, atasan langsungnya, Soeharto sebenarnya bisa didakwa sebagai terlibat dalam permufakatan jahat yang berakibat fatal tersebut. Satusatunya penjelasan masuk akal atas sikap dan tindakan Soeharto tersebut—membiarkan Yani disingkirkan—adalah agar terbuka kesempatan bagi dirinya untuk naik menjadi Panglima Angkatan Darat.

Di kemudian hari muncul juga pertanyaan mengenai dua batalion, masing-masing dari Jawa Tengah (454) dan Jawa Timur (530) yang dipakai Gestapu. Kedua batalion yang didatangkan Soeharto—sebagai Ketua Panitia

pelaksana upacara ulang tahun ke-20 ABRI—diperintahkan datang dengan perlengkapan siap tempur. Sementara Batalion 328/Kujang siliwangi dari Jawa Barat mendapat perintah yang berbeda. Mereka yang dari Bandung itu tidak mendapat perintah siap tempur. Apakah ini bisa ditafsirkan sebagai bantuan tidak langsung Soeharto kepada Gestapu? tentang dua batalion tersebut, dalam memoarnya Pranoto reksosamodra menulis,

Terdapat dua pasukan yang dipersiapkan dan bersiaga di Jakarta dalam perayaan Hari ABRI, lima Oktober 1965, yaitu Batalion 530 Brawijaya dan Batalion 454 Diponegoro. Keduanya secara khusus diundang Pangkostrad Mayjen Soeharto. Atas perintah Pangkostrad yang diteruskan oleh Dan Brigif [Komandan Brigade] III, semua anggota pasukan diperintahkan untuk mengisi peluru secara penuh, seperti akan berperang, disebutkan dengan istilah, “perlengkapan garis pertama, garis tempur”. Perintah ini disampaikan lewat radiogram pada 15 September 1965 No. T. 220/9 dan diulangi pada 21 September 1965 No. 239/9. Pasukan diberangkatkan dalam Tiga gelombang, tanggal 25, 26, 27 September 1965, dengan kendaraan organik dan kereta api.

Sampai hari ini peran dua batalion siap tempur dan terlibat Gestapu itu tidak pernah terungkap. hilang begitu saja. Selama 30 tahun mantan Pangkostrad itu berkuasa, jelas tidak ada yang berani mempertanyakan peran dua batalion tersebut dan keterlibatannya dalam Gestapu.

Menarik untuk diketahui, Mayjen TNI Pranoto reksosamodra, yang mengungkapkan secara terbuka soal dua batalion tersebut, adalah asisten Personalia Pangad yang tahu selukbeluk personalia dan pergerakan pasukan. dia mempunyai hubungan akrab dan lama dengan Sukarno. Tapi dengan Soeharto, Pranoto punya konflik

lama yang bermula ketika mereka bersama-sama bertugas pada Kodam Diponegoro di Jawa Tengah. Pranoto menggantikan Soeharto yang “disekolahkan” ke seskoad, setelah muncul heboh keterlibatan Soeharto dalam berbagai bisnis, barter, dan penyelundupan.

Tak lama kemudian, Presiden Sukarno memindahkan Pranoto dari Semarang ke Markas Besar Angkatan Darat (MBad) dan memberinya kedudukan asisten Personalia Menpangad. Maka, tidak mengherankan jika pada satu Oktober, Sukarno menunjuk Pranoto sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat sebelum pada akhirnya menjadikannya Panglima Angkatan Darat, seandainya Pranoto tidak keburu ditangkap oleh Soeharto.

Adalah Pranoto yang berinisiatif merekrut Letnan Kolonel Untung ke dalam resimen Cakrabirawa. Waktu itu sebenarnya Presiden Sukarno menginginkan Mayor Infantri L.B. Moerdani menjadi pengawalnya, tapi karena Benny memilih tetap di RPKAD, masuklah Untung. Kedua perwira menengah tersebut memang sama-sama pemegang Bintang sakti sebagai penghormatan atas keberanian mereka di Palagan Irian Barat. Karena prestasinya itu jugalah yang mendorong Soeharto untuk menarik Untung ke Kostrad.

Tentang Untung masuk resimen Cakrabirawa, dalam memoarnya, Pranoto menulis,

... [P]roses penempatan Letkol Untung sebagai Komandan Resimen Cakrabirawa (*sic*), walaupun jabatan Dan Yon itu tidak atau belum termasuk jabatan teras AD [Angkatan Darat], namun keputusan itu diberikan oleh Men/Pangad sendiri sewaktu Brigjen Sabur, Kol. Saelan dan saya sendiri menghadap

Men/Pangad. Pada saat itu, kebetulan Pangkostrad Mayjen Soeharto juga mengharapkan Letkol Untung dapat ditempatkan di Kostrad. Jadi, ada dua permintaan yang menginginkan Letkol Untung. Akhirnya, Men/Pangad memutuskan untuk menempatkannya di Cakrabirawa sebagai penghargaan atas jasanya dalam penugasan Trikora di Irian Barat.

SOEHARTO TIDAK MELIHAT ATAU TERCATAT memainkan peran dalam operasi Gestapu. Dari Rumah Sakit, dia pulang tidur setelah mendapat laporan dari Kolonel Latif. dan seperti juga para perwira dan petinggi Gestapu, Pangkostrad itu jelas tidak membayangkan kegiatan penculikan akan berakhir sebagai pembantaian para Jenderal pimpinan Angkatan Darat.

Nah, ketika para pimpinan Angkatan Darat ternyata bukan cuma diculik, melainkan malah dibantai, sebagai orang Jawa Soeharto langsung saja mengamalkan filsafat leluhurnya: "*Tega larane, ora tega patine,*" maksudnya, sampai hati melihat temanteman Jenderal didaulat, tapi tidak rela menerima pembunuhan mereka. Sampai hati melihat Yani disingkirkan, tapi tidak tega melihat Yani dibantai. Bisa diduga bahwa pada saat yang sama Soeharto tentu juga sangat marah kepada Kolonel Latif karena merasa telah dibohongi oleh Kolonel yang mantan anak buah yang diselamatkannya setelah Latif terlibat Peristiwa Madiun 1948. Kemarahan itu kemudian tecermin pada siksaan keras yang diterima Latif dalam tahanan orde Baru.

Maka, setelah pagi harinya berkesimpulan bahwa PKI berada di balik Gestapu, Soeharto lantas saja mengamuk dengan bertindak keras kepada para pengikut partai

tersebut. Para pengikut Sukarno dalam politik dan militer kemudian juga terimbas pembersihan. Tindakan yang terakhir ini terpaksa dilakukan karena Sukarno terus-menerus mempertahankan, bahkan membela PKI.

Secara tidak langsung sikap Sukarno yang demikian itu ikut berperan memperhebat kegiatan pembantaian orang-orang PKI atau mereka yang hanya dicurigai sebagai PKI. Kecemasan akan bertahannya PKI, artinya tidak dibubarkan, menimbulkan ketakutan yang menghantui banyak orang-orang anti-Komunis waktu itu. Seandainya Sukarno cepat mengutuk dan membubarkan PKI, ada kemungkinan pembantaian dan pembersihan tidak sedramatis dan setragis seperti yang kemudian terjadi.

Mengapa Sukarno menolak membubarkan PKI meski secara terang-terangan sudah menyebut tindakan D.N. Aidit—dalam percakapannya dengan a.M. hanafi—sebagai “keblinger”? apakah Sukarno seorang Komunis? suatu kali soal ini saya bicarakan dengan dr. Ruslan Abdulgani, mantan juru bicara Manipol usdek dan orang dekat Sukarno sejak zaman Revolusi. Menurut ruslan,

Bung Karno seorang Nasionalis sejati, tapi terlalu *over confidence*, terlalu percaya diri. Dia kira dia bisa mengontrol PKI. Lagi pula pengetahuan Bung Karno tentang Komunisme dasarnya adalah Komunisme pada masa mudanya, yakni yang mendorongnya merumuskan ideologi Nasakom. Komunisme waktu itu adalah alat melawan kolonialisme, bukan Komunisme dalam zaman Perang Dingin seperti sekarang. Pada zaman perjuangan Nasional dulu, semua kekuatan dan golongan bisa diajak bersatu melawan kolonialisme. Sekarang ceritanya lain lagi, tapi Bung Karno masih tetap gandrung pada persatuan berdasarkan Nasakom.

Menurut catatan Pusat sejarah TNI, ketegangan antara Jenderal TNI Soeharto dan Presiden Sukarno bersumber pada sikap mereka yang bertentangan terhadap PKI dan Komunisme. dalam salah satu dokumen Pusat sejarah TNI tertulis bahwa,

Mengenai kedudukan PKI dalam masyarakat Indonesia, Presiden Sukarno berpendapat bahwa PKI harus dan dapat diPancasila-kan. Jenderal Soeharto menganggap hal itu tidak mungkin karena PKI itu pasti berpegang pada doktrin Marxisme-Komunisme. Presiden Sukarno menganggap PKI melakukan ekses, jadi tidak perlu diambil tindakan pembubaran seperti yang diusulkan oleh Jenderal Soeharto. Menurut Soeharto, PKI sudah dua kali mencoba merebut kekuasaan negara, karena itu jangan sampai diberi kesempatan lagi.



Salim Haji Said mewawancarai dr. Ruslan Abdulgani, 1988.

SAYA SENDIRI KEMUDIAN BERPENDAPAT, yang sebenarnya dipertahankan Presiden Sukarno bukanlah PKI, melainkan ideologi Nasakom yang sudah

dikampanyekannya ke seluruh dunia. Maka, masuk akal kalau Sukarno sebenarnya marah dan ingin membubarkan PKI, tapi itu hanya akan dilakukannya setelah berdiri satu partai baru yang menggantikan tempat PKI dalam komposisi Nasakom. dengan kata lain, Sukarno bukan Komunis dan tidak mencintai PKI.

Bagi Sukarno, PKI terutama hanya alat pengimbang yang dia perlukan untuk menghadapi Angkatan Darat. Pemimpin Besar Revolusi itu sebenarnya lebih mencintai diri dan gagasan nasakom ciptaannya yang telah dipasarkannya ke seluruh dunia. dengan gagasan yang kontroversial pada zaman Perang dingin itu Sukarno berharap diterima sebagai tokoh pemersatu dunia yang bisa mengatasi konflik Barat dan Timur pada masa itu.

Pada bulan-bulan pertama setelah Gestapu, di Jakarta memang beredar cerita bakal berdirinya sebuah partai beraliran kiri dengan Nyoto—tokoh PKI yang sudah sangat dekat kepada Sukarno dan berangsur menjauh dari Aidit—sebagai pemimpinnya. Karena tahu rencana Sukarno itulah barangkali kekuatan anti-Komunis segera bertindak. Akibatnya, nyoto dengan segera hilang. Bahkan, tidak pernah ketahuan di mana kuburnya.[]

ANGKATAN UDARA DAN GESTAPU

A pabila kita berbicara mengenai Angkatan Bersenjata sehubungan dengan Gestapu, faktor Angkatan Udara terlalu penting untuk dilupakan. Seperti diketahui luas waktu itu, Panglima Angkatan Udara, Omar Dani, mempunyai hubungan khusus dengan Presiden Sukarno sejak beliau diangkat menggantikan Ksau suryadi suryadharma. Omar Dani naik ke posisi pemimpin tertinggi Angkatan Udara setelah insiden tenggelamnya Motor Torpedo Boat (MTB) **Macan Tutul** di Laut arafuru pada 15 Januari 1962. Angkatan Udara dipersalahkan karena tidak memberi perlindungan udara kepada kapal perang yang bertugas menyelundupkan tentara ke daratan Irian Barat (Papua sekarang). Suryadharma membayar mahal “kesalahan” yang dituduhkan kepadanya. dia dicopot dari kepemimpinan Angkatan Udara yang didudukinya sejak Indonesia memiliki Angkatan Udara, hampir 20 tahun sebelumnya. Kemudian, karena menolak jabatan duta Besar di Kuba, Suryadharma diangkat menjadi penasihat militer Presiden yang praktis tidak pernah dimintai pendapat atau saran oleh Sukarno.



Sukarno dan Omar Dani, 1965.

Di kemudian hari terungkap, sebenarnya Suryadharma telah diperlakukan secara tidak adil. operasi penyelundupan pasukan ke Irian Barat lebih merupakan keputusan politik Sukarno sebagai Panglima Koti tanpa melibatkan pimpinan tentara. Angkatan Udara waktu itu bukan saja tidak tahu adanya operasi rahasia tersebut, mereka juga memang belum siap memberi perlindungan udara (*air cover*) dalam pelaksanaan perintah Sukarno itu.

Ini adalah contoh sempurna bagaimana sebuah

operasi militer dikelola oleh politisi sipil yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman militer. Kesalahan yang sama sebelumnya juga dilakukan Hitler yang menyerang Uni Soviet tanpa memperhatikan pendapat dan pertimbangan para Jenderal dan para marsekalnya. Akibatnya, kehancuran tragis beberapa divisi tentara Jerman.

KETIKA DIANGKAT MENJADI PANGLIMA Angkatan Udara, Omar Dani baru sekitar sepuluh tahun menjalani dinas militer. Menurut Nasution kepada saya, dialah yang menyarankan kepada Sukarno mengangkat Omar Dani sebagai pengganti Suryadharma. Menko Hankam/KsaB itu berjumpa dengan Dani untuk pertama kalinya di lapangan terbang Morotai, pada masa persiapan operasi Trikora.

Sebagai perwira yang masih sangat muda ketika menduduki jabatan pimpinan Angkatan Udara, Dani melangkahi sejumlah perwira senior dalamangkatannya. Dengan latar belakang demikian, maka bisa dimengerti kalau pimpinan baru Angkatan Udara itu menjadi sangat bergantung pada wibawa dan dukungan Sukarno yang mengangkatnya.

Pada masa Revolusi, sebagai anak priayi berpendidikan bagus, Dani bekerja sebagai penyiar radio siaran bahasa Inggris di Solo. Selanjutnya pindah ke Jakarta dan bekerja pada sebuah bank. Bersama sejumlah pemuda pada 1950, Dani mendaftar untuk dikirim ke Taloa, California. Di sana dia dididik menjadi penerbang. Sepulang dari Amerika itulah, dia mengucapkan sumpah sebagai

perwira Angkatan Udara. di mata para Jenderal senior di Angkatan Darat, Omar Dani adalah anak muda yang tidak punya pengalaman tempur masa Revolusi.

Dengan latar belakang yang demikian, Sukarno mengangkat Panglima Angkatan Udara itu menjadi Panglima Kolaga (Komando Mandala siaga) dalam rangka konfrontasi. Jenderal Soeharto, yang amat senior dan mantan Panglima Mandala pembebasan Irian Barat, beberapa waktu kemudian ditunjuk Presiden sebagai wakilnya. Keputusan Sukarno yang kurang bijaksana ini hanya membuat para perwira tinggi Angkatan Darat makin dongkol kepada Bapak Presiden dan Omar Dani. dalam memoarnya, mantan Pangkoptamtib, Jenderal TNI (Purn.) Sumitro menulis:

Di Komando Mandala Siaga (Kolaga) Panglimanya dari Angkatan Udara yang tidak punya pengalaman perang, tentara kemarin sore, Omar Dani. Anak kemarin sore itu belum punya pengalaman perang, tapi disuruh memimpin kami yang sudah bongkel-bongkel sejak zaman Revolusi sampai tua perang terus. Dia membawahi Pak Harto yang waktu itu wakilnya Omar Dani, sebagai Wakil Panglima Komando Mandala Siaga (Wapang Kolaga). Dalam hati kami mangkel dipimpin anak *wingi sore*, anak kemarin sore.

Di samping itu, Omar Dani mewarisi Angkatan Udara yang sejak awal tahun lima puluhan memang sudah diposisikan suryadharma, sadar atau tidak, sebagai Angkatan yang bersikap antagonis kepada Angkatan Darat. dengan latar belakang itulah juga kita harus melihat kedekatan Angkatan Udara dengan Presiden Sukarno. untuk mengimbangi Angkatan Darat yang sudah lama

terlibat politik, di bawah Omar Dani untuk pertama kalinya Presiden Sukarno melibatkan Angkatan Udara ke dalam kegiatan politik. Mengenai soal ini, para Purnawirawan Angkatan Udara dalam buku *Menyingkap Kabut Halim* 1965 menjelaskan:

Untuk memberikan makna Angkatan Udara sebagai alat Revolusi sebagaimana yang sering dikemukakan Bung Karno, Laksdya [Laksamana Madya] Udara Omar Dani dalam kedudukannya sebagai Men/Pangau [Menteri Panglima Angkatan Udara], mencoba ikut memainkan peran politik di tengah-tengah retorika Revolusi PBR (Pemimpin Besar Revolusi). Misalnya, berbicara tentang Angkatan V yang sebetulnya bukan gagasannya sendiri, melainkan hasil pembicaraan sepintas antara PM RRT [Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok] Chou En Lai dan Presiden Sukarno. Karena Bung Karno tertarik, Omar Dani pun membawanya dalam suatu pembahasan dengan rekan-rekan menteri/panglima Angkatan lainnya.

Tak disadari [oleh Dani] bahwa membahas gagasan itu, sangat paralel dengan keinginan PKI, yaitu terciptanya suatu militansi dan radikalisme di kalangan rakyat. Militansi rakyat yang terlihat melalui pelatihan sukarelawan pada masa operasi pengembalian Irian Barat dan perjuangan Dwikora, sangat menguntungkan PKI.

PERSOALAN TERPENTING yang melatarbelakangi konflik antara Angkatan Udara dan Angkatan Darat, terutama pada masa demokrasi terpimpin, pada dasarnya adalah sikap kedua Angkatan yang berbeda terhadap kebijakan Presiden Sukarno. Angkatan Darat menolak Nasakom, sangat waspada kepada PKI, sementara Angkatan Udara mendukung Nasakom dan hampir apa saja kebijakan politik Sukarno, termasuk gagasan pembentukan Angkatan V. Berbeda dengan pihak Angkatan Darat, Pimpinan Angkatan Udara waktu itu tidak melihat PKI

sebagai potensi ancaman.

Jauh sebelum itu Suryadharma sebagai pribadi sudah pula merupakan persoalan bagi Angkatan Darat. Perwira lulusan Akademi Militer Breda, Negeri Belanda, ini tidak ikut perang gerilya setelah Yogyakarta diserbu dan diduduki Belanda pada 19 Desember 1948. Ketika tentara di bawah pimpinan sudirman dan Nasution menjalankan perang gerilya, Suryadharma bersama Sukarno dan Hatta menyerah kepada Belanda. Mengenai ketidakikutan Suryadharma bergerilya itu, dari memoar Bung Hatta kemudian bisa diketahui, beberapa hari sebelum Yogyakarta diserang dan diduduki tentara Kolonial Belanda, Suryadharma sebagai pimpinan Angkatan Udara sudah tidak lagi menduduki posisi penting dalam ketentaraan. untuk sementara, dia dibebastugaskan dari kedudukan pimpinan Angkatan Udara karena diperintahkan mengikuti perjalanan Presiden Sukarno ke India atas undangan Perdana Menteri Nehru.

Dalam keadaan menanti datangnya pesawat yang akan membawa rombongan ke India itulah, Yogyakarta diserang. Suryadharma ditangkap di rumah kediaman Wakil Presiden dan kemudian diasingkan ke Bangka bersama Bung Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah pengakuan kedaulatan, Sukarno mengangkat kembali Suryadharma menjadi pemimpin Angkatan Udara (KSAU). Keputusan ini yang mengecewakan para perwira senior Angkatan Darat yang baru saja keluar dari hutan setelah masa bergerilya usai.

Sikap para perwira Angkatan Darat yang menyalahkan

keputusan Suryadharma menyerah bersama Sukarno dipertanyakan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara. “Lho, Suryadharma itu mengikuti jejak Panglima tertinggi. Yang mestinya disalahkan ialah sudirman. Panglima Besar itu yang justru menolak menaati perintah Panglima tertingginya.”

Debat dengan tema Suryadharma yang taat pada Panglima tertinggi, sementara sudirman dianggap melakukan insubordinasi adalah debat yang muncul kembali ketika Omar Dani menunjukkan loyalitas penuhnya kepada Sukarno. “apakah salah kalau kita taat kepada Panglima tertinggi?” tanya Laksamana Muda Udara Sri Mulyono herlangang kepada saya dalam sebuah pertemuan dengan para mantan pejabat senior Angkatan Udara pada awal masa reformasi. Ini soal, menurut saya, akhirnya terpulang pada bagaimana tempat tentara dalam masyarakat, persepsi diri mereka serta hubungan sipil dan militer macam apa yang berlaku dalam masyarakat.

Tentara (Angkatan Darat) di kemudian hari mempertegas posisinya dalam masyarakat dengan menempatkan diri sebagai suatu kekuatan politik di antara kekuatan politik lainnya. Posisi demikian itu mendapatkan legitimasi dari keputusan Presiden Sukarno pada rapat dewan Nasional pada november 1958. Tentara pada masa sudirman memang lebih melihat diri sebagai pejuang daripada hanya sekadar alat pemerintah. Sebagai pejuang di bidang militer, sudirman juga telah mengikat dirinya dengan sebuah sumpah tentara: “tidak kenal menyerah.” Suryadharma dan Sukarno yang menyerah kepada tentara

kolonial Belanda mereka dianggap mengkhianati sumpah tersebut.[]

MENGGANYANG FILM- FILM AMERIKA

Hubungan Angkatan Darat dengan Angkatan Udara menjadi lebih memburuk oleh sikap Suryadharma yang dianggap bersimpati kepada PKI. Utami Suryadharma, istri Suryadharma, adalah aktivis kiri yang memimpin sebuah proyek PKI mengganyang film-film Amerika (Papfias) pada zaman orde Lama. Kakak utami, utomo ramelan, adalah tokoh PKI Jawa Tengah yang menduduki kursi Wali Kota solo ketika Gestapu terjadi.

Waktu masuk di solo pada november 1965, saya sempat melihat utomo ramelan berada dalam tahanan di Balai Kota solo. Yang menjaga tahanan adalah para mantan tentara Pelajar yang sebagian di antara mereka pada 1948 ikut menggempur PKI di Madiun.

Omar Dani memang bukan pemimpin Angkatan Udara yang memulai kedekatan angkatannya dengan Sukarno. Tapi, Panglima Angkatan Udara itu dan beberapa teman-temannya yang memimpin Angkatan Udara di sekitar meletusnya Gestapu itu sudah amat sulit menghindari konflik historis, politis, dan ideologis yang sejak lama mengganggu hubungan Angkatan Darat dengan Angkatan Udara. Lagi pula konflik itu memang juga dipelihara oleh Sukarno.

Omar Dani dan teman-temannya di Angkatan Udara waktu itu pada dasarnya adalah perwira-perwira muda usia pengagum berat Sukarno. Marsekal Madya TNI (Purn.) Budiarjo, mantan deputi Panglima Angkatan Udara, Omar Dani, dan Menteri Penerangan pada awal tahun tujuh puluhan, menulis dalam memoarnya, “Omar Dani yakin benar bahwa Bung Karno sungguh-sungguh pemimpin besar dan dia telan mentah-mentah indoktrinasi Nasakom [Nasional-Agama-Komunis].” Para perwira Angkatan Udara yang umumnya berusia muda itu merumuskan loyalitasnya kepada Panglima tertinggi sebagai loyalitas dan dukungan kepada kebijakan politik apa saja yang dijalankan Sukarno.

Khusus mengenai Omar Dani, menurut cerita para purnawirawan Angkatan Udara yang berada di sekitar dani menjelang Gestapu, Panglima Angkatan Udara itu memang sangat percaya bahwa dalam tubuh Angkatan Darat terdapat “beberapa orang Jenderal dan perwira yang menilai kebijaksanaan Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi, dan tidak melaksanakan ajaran Bung Karno secara konsekuen.” Omar Dani juga yakin bahwa para Jenderal Angkatan Darat itu bukan saja tidak setuju dengan kebijaksanaan Bung Karno, melainkan mereka juga bekerja sama dengan nekolim. dasar yang digunakan Omar Dani mencurigai adanya kerja sama dengan nekolim itu adalah dokumen Gilchrist. Seperti diketahui kemudian, dokumen itu ternyata hasil rekayasa KGB, dinas rahasia Uni Soviet.[]

HANYA MENGIKUTI JEJAK SYAM

Yang tampaknya tidak disadari oleh dani dan beberapa perwira tinggi pimpinan Angkatan Udara waktu itu, Bung Karno terutama adalah seorang politikus dengan ideologi kiri/ Nasakom, di samping kedudukannya sebagai Panglima tertinggi (Pangti) ABRI. dengan Nasakom itulah Sukarno melindungi PKI, hal yang menjadi akar tunjang konflik Sukarno dengan Angkatan Darat sejak awal masa demokrasi terpimpin. Loyalitas yang tidak bisa membedakan antara Sukarno sebagai Panglima tertinggi dan Sukarno sebagai politikus secara otomatis membawa Omar Dani dan sejumlah pimpinan tertinggi Angkatan Udara masa itu ke tataran konfrontasi dengan Angkatan Darat.

Dengan latar belakang seperti inilah, kita harus mengerti keputusan Omar Dani yang dengan segera mendukung Gestapu beberapa saat setelah gerakan tersebut memulai langkah mereka “membersihkan kekuatan kontraRevolusioner” di dalam Angkatan Darat. dukungan tergesa-gesa itu akibatnya fatal. Beberapa hari kemudian dukungan tersebut diralat. Tapi, langkah itu tidak berhasil menyelamatkan Omar Dani. Mantan pemimpin Angkatan Udara itu akhirnya harus dihadapkan

ke Mahmillub. dani menghabiskan sebagian besar dari sisa hidupnya dalam penjara orde Baru.

Sebelum Omar Dani memberikan dukungan kepada Gestapu, pada 30 September malam, beberapa jam sebelum operasi Gestapu bergerak, Letnan Kolonel udara Penerbang Heru Atmodjo sebagai pejabat senior intel Angkatan Udara telah melaporkan kepada Omar Dani mengenai apa yang akan terjadi beberapa jam lagi. Mengingat amat dramatisnya Gestapu— penculikan para Jenderal pimpinan Angkatan Darat—dan keterlibatan Mayor udara suyono, tokoh Gestapu dari Angkatan Udara, memang patut menjadi pertanyaan, mengapa Omar Dani memilih berdiam diri saja dan membiarkan Mayor udara suyono menggunakan fasilitas Angkatan Udara?

Pada pagi harinya, satu Oktober, dani bahkan berusaha memfasilitasi Brigjen TNI Supardjo agar secepatnya datang ke Halim Perdanakusuma melapor kepada Panglima tertinggi yang sudah ada di pangkalan udara itu. Supardjo yang bertugas di Kalimantan, memang ada di Jakarta waktu itu. dia meninggalkan posnya setelah menerima telegram rahasia dari Syam, sebagai Kepala Biro Khusus PKI.

Heru Atmodjo diperintahkan oleh Omar Dani menjemput Panglima Komando tempur (Kopur) Kalimantan itu dengan helikopter. Pagi hari itu, Brigjen Supardjo berusaha, tapi gagal, menemui Presiden Sukarno yang memang tidak berada di Istana Merdeka. Sukarno malam itu tidur di rumah dewi, istri kesekian, yang berasal dari Jepang.

Menurut KesaKslan Heru Atmodjo tidak ada tanda-tanda terkejut pada diri dani ketika bersama para pimpinan Angkatan Udara menerima taklimat intelijen beberapa jam sebelum operasi Gestapu dilancarkan. Mengingat kedekatan dani dengan Sukarno, tidak sulit menduga Panglima Angkatan Udara itu tahu tentang rencana Gestapu dan sikap Sukarno terhadap kegiatan penculikan tersebut. Itulah rupanya penjelasan mengapa dani tidak berbuat sesuatu malam itu dan bahkan dengan cepat mengumumkan dukungannya kepada Gestapu pagi hari esoknya. seperti gagasan semula sebagai yang ditugaskan Sukarno kepada Untung, yang diketahui dani tentulah hanya penculikan untuk pendaulatan, bukan pembantaian. Jadi, informasi Omar Dani malam itu lebih kurang sama dengan pengetahuan Soeharto—yang diterimanya dari Kolonel Latif di Rumah Sakit Gatot subroto—pada waktu yang nyaris tak berjarak lama. Kesalahan Omar Dani terutama terjadi pagi harinya. Ketika Soeharto di Kostrad sedang sibuk berkonsolidasi menghadapi Gestapu yang membantai para Jenderal, di Pangkalan udara Halim Perdanakusuma, Panglima Angkatan Udara mengumumkan dukungannya kepada Gestapu.



Brigjen Mustafa syarif Supardjo, salah seorang tokoh Gestapu.

Dalam buku *Menyingkap Kabut Halim*, Omar Dani mengaku bahwa pada 30 September 1965, di Wisma angkasa, kediaman resminya sebagai Pangau, bersama hampir semua pimpinan tertinggi Angkatan Udara, dia telah menerima taklimat lengkap dari Letnan Kolonel Heru Atmodjo, mengenai rencana penculikan para Jenderal Angkatan Darat.

Nama semua Jenderal yang akan diculik dilaporkan dalam taklimat amat penting tersebut. Juga dilaporkan keterlibatan Mayor udara suyono. Tapi, Omar Dani tidak berbuat sesuatu kepada perwira Angkatan udara itu karena menganggap Gestapu adalah masalah

internal Angkatan Darat.

Sulit dimengerti sikap dan keputusan dari membiarkan para Jenderal itu menjadi sasaran Gestapu dengan alasan soal “internal Angkatan Darat”, sementara dia tahu Mayor udara suyono ikut berperan aktif serta memanfaatkan fasilitas dan senjata-senjata milik Angkatan Udara. Lebih masuk akal untuk menafsirkan sikap Omar Dani itu sebagai bukti dari pengetahuannya mengenai Gestapu yang diperolehnya dari komunikasinya dengan Presiden Sukarno beberapa waktu sebelum 30 September.



Omar Dani pada masa tua.

Heru Atmodjo kesal Panglimanya tidak berbuat apa-apa meski telah mendapat laporan lengkap tentang rencana Gestapu dan keterlibatan seorang perwira Angkatan Udara. Kesimpulan Heru Atmodjo:

Pimpinan AURI [Angkatan Udara Republik Indonesia] mengambil sikap jalan setengah-setengah. Setengah membiarkan, tidak melarang secara tegas Mayor Suyono ambil peran, walau sudah dilaporkan sebelumnya. Mengapa jalan ini ditempuh? Karena kuatnya loyalitas Laksamana Omar Dani kepada Bung Karno, yang tanpa reserve, tanpa memikirkan akibat-akibatnya.

Heru Atmodjo pantas marah. Akibat sikap loyal mutlak dani kepada Sukarno, Angkatan Udara jadi korban. Karier heru sendiri akhirnya hancur berantakan. Perwira intel itu mendekam lama dalam penjara orde Baru. Ketika meninggal—berapa tahun setelah bebas dari penjara—dia mula-mula dimakamkan di taman Makam Pahlawan. Tapi, kuburnya kemudian dibongkar dan jenazahnya dipindahkan ke pemakaman umum. “telah terjadi kekeliruan, Pak heru tidak memenuhi syarat dimakamkan di taman Makam Pahlawan,” kata seorang juru bicara TNI sebagai yang dikutip koran-koran.

Dengan mengumumkan dukungannya kepada Gestapu setelah sebelumnya membiarkan keterlibatan Mayor udara suyono, Omar Dani bukan saja mencelakakan diri, Angkatan Udara dan banyak temannya, tapi sebenarnya juga secara tidak langsung ikut mempersulit posisi PKI, dan Bung Karno. dengan tidak menghalangi keterlibatan suyono, klaim PKI yang menyebut “Gestapu sebagai hanya persoalan internal Angkatan Darat” telah

diporakporandakan Omar Dani.

Namun, dalam urusan ini, tanpa disadarinya, Omar Dani sebenarnya hanya mengikuti jejak Syam Kamaruzaman yang sudah lebih awal melibatkan perwira Angkatan Laut, Angkatan Udara, perwira Polisi, bahkan Pemuda rakyat. dengan kata lain, Syam dan dani secara bersama, meski secara terpisah, membantah klaim dan rencana Aidit serta analisis Cornell Paper yang ingin Gestapu dipandang semata-mata sebagai urusan “internal Angkatan Darat”. Keadaan yang diakibatkan oleh tindakan dani dan Syam itu juga akhirnya ikut mempersulit usaha Presiden Sukarno menyelamatkan PKI, Omar Dani, dan tentu saja diri sang Pemimpin Besar Revolusi itu sendiri.

Cerita di sekitar keputusan dan tindakan Panglima Angkatan Udara itu sebenarnya hanya menunjukkan bahwa Omar Dani— seorang priayi Jawa yang terdidik baik —pada dasarnya buta politik. “Angkatan Udara itu Angkatan teknis, berbeda dengan Angkatan Darat,” kata Laksamana udara rusmin nuryadin yang menjadi Panglima Angkatan Udara pada awal orde Baru. Secara tidak langsung rusmin sebenarnya mengkritik dani dan para pemimpin Angkatan Udara lainnya yang ikut-ikutan bermain politik.

Tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa Omar Dani dan teman-temannya masa itu hanyalah Sukarnois yang menyerahkan semua pekerjaan berpikir politik kepada Sukarno. Panglima Angkatan Udara tersebut— serta banyak perwira tinggi di sekitarnya—hanya ikut petunjuk Sukarno tanpa reserve. Semacam sikap “Pejah

Gesang nderek Bung Karno” (hidup atau mati, pokoknya ikut Bung Karno) yang populer di kalangan pendukung Sukarno di Jawa Tengah setelah Gestapu.

Omar Dani adalah contoh sempurna seorang Sukarnoisme yang waktu itu bisa ditemukan di mana-mana, tapi terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Bung Karno itu seorang sufi,” kata Dani dengan yakin kepada saya, sekian tahun setelah mantan Pangau itu dibebaskan dari penjara.[]

SUSLOV DAN AGEN-AGEN ASING

Sampai sekarang belum cukup bukti berkesimpulan, Agenagen asing memainkan peran langsung pada malam tragedi berdarah tersebut. Tapi cukup alasan mencurigai mereka ikut memainkan peran mempercepat proses dalam rangka memperpendek beban ketegangan yang mereka pikul. Masuk akal jika CIA dan MI 6 ingin tentara secepatnya menumpas PKI dan mengakhiri rezim Sukarno yang menakutkan, mencemaskan, dan merupakan beban berat bagi mereka.

Sebaliknya agen Blok timur, terutama Tiongkok, bisa diduga, juga ingin secepatnya melihat Sukarno bertindak mengakhiri “pembangkangan” Angkatan Darat terhadap Nasakom, ajaran yang dipergunakan Sukarno melindungi PKI. dalam rangka inilah, saya kira kita harus mengerti munculnya dokumen Gilchrist serta sejumlah “dokumen” lainnya yang beredar pada bulan-bulan menjelang Gestapu. dokumen Gilchrist buatan intel Cekoslowakia itu, misalnya, jelas memainkan peran menaikkan tensi politik yang antara lain membuat Sukarno merasa makin cemas dan berangsur tidak merasa aman menghadapi Angkatan Darat.

Subandrio memainkan peran besar dalam menjadikan

dokumen Gilchrist itu suatu yang menakutkan Sukarno. Tanpa mengecek autentisitas dokumen (yang autentik terbukti hanya kertasnya yang memang berasal dari Kedubes Inggris) yang katanya diterimanya lewat pos (Bagaimana menjelaskan informasi sepenting itu diterima lewat pos tanpa alamat pengirim dan lantas dipercaya sebagai autentik?), Subandrio menyebarkan salinan dokumen itu sampai kepada para pemimpin Asia Afrika yang bertemu di Kairo beberapa bulan sebelum Gestapu. Rasa tidak aman itulah yang hampir bisa dipastikan berperan besar yang ikut mendorong Sukarno merencanakan jalan daulat agar secepatnya menetralisasi Angkatan Darat dengan cara menyingkirkan Jenderal Yani dan kelompoknya yang anti-Komunis.

Keterlibatan langsung intel asing dalam merancang, apalagi melaksanakan operasi Gestapu, hingga kini, setengah abad kemudian, masih belum ditemukan buktinya. Informasi terbaru dan menarik sehubungan dengan kemungkinan adanya peran agen asing ini, saya peroleh dari asahan alham Aidit, adik Ketua PKI D.N. Aidit yang jumpa abangnya di Beijing pada Agustus 1965.

Waktu itu D.N. Aidit dalam perjalanan pulang dari Moskow ke Jakarta memenuhi panggilan Presiden Sukarno yang dikabarkan sakit. Menurut cerita D.N. Aidit kepada adiknya, di Moskow pemimpin Komunis Indonesia itu terlibat debat keras dengan Suslov, ahli ideologi dan teori Komunis (ideolog) Politbiro Partai Komunis Uni Soviet (PKUS).



Mikhail Suslov (memegang topi), ideolog utama Partai Komunis Soviet.

PERDEBATAN ITU, MENURUT CERITA D.N. AIDIT menyangkut perbedaan prinsipil antara Sosialisme dan Revisionisme yang ketika itu sedang hangat-hangatnya diperdebatkan di kalangan Gerakan Komunis interNasional. Perbedaan prinsipil itu terjadi antara Tiongkok dan Uni Soviet. “PKI menyetujui sepenuhnya pandangan PKT [Partai Komunis Tiongkok] yang mempertahankan Marxisme-Leninisme (ML) dan mengkritik PKus yang merevisi ML,” tulis asahan dalam surat elektroniknya dari negeri Belanda kepada saya pada 25 april 2012.

Akibat sikap pro-Tiongkok PKI tersebut, Suslov

dengan sangat marah mengeluarkan ancaman kepada D.N. Aidit. “Kalau PKI tidak berubah, Uni Soviet akan turut menghancurkan PKI bersama dengan musuh-musuh Komunis di Indonesia.” apakah akhirnya Uni Soviet melaksanakan ancaman Suslov?

Bukti-buktinya memang masih harus dicari. Tapi bahwa hubungan Moskow dengan Jakarta tetap terpelihara dengan baik setelah Gestapu, sementara kontak Jakarta-Beijing beku untuk waktu lama, barangkali bisa menjadi salah satu petunjuk untuk curiga Uni Soviet memang, paling sedikit, membiarkan PKI dihancurkan.

Di Moskow sendiri, sikap pemerintah kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mula-mula sangat berhati-hati. “Mungkin [karena] mengharapkan kaum Komunis Indonesia yang selama ini berorientasi ke Peking, dapat melepaskan keterikatannya dengan RRT. Minimal mereka mengharapkan orang-orang Komunis Indonesia bersikap netral dalam sengketa Soviet-RRT,” tulis Manai sophiaan, duta Besar Indonesia di Moskow waktu itu, dalam memoarnya, *Apa yang Masih Teringat* (1991).

Akan tetapi, setelah gerakan anti-G-30-S/PKI meluas, di mana anggota-anggota PKI dan simpatisannya dikejar-kejar dan diamankan, maka Uni Soviet mulai menyatakan “concerned”, artinya bagaimanapun tetap prihatin karena ada kaitan ideologis antara PKUS dan PKI. Mereka takut kalau seluruh gerakan Komunis di Indonesia akan dihancurkan sama sekali.

Maka, keluarlah berbagai *statement* dari pimpinan Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) dan Serikat Buruh. Diikuti oleh negara-negara Sosialis Eropa Timur lain yang menunjukkan solidaritas terhadap PKI dengan puncaknya *appeal* dari Ketua

Presidium Tertinggi Uni Soviet, *Podgorny*, kepada Presiden Sukarno untuk membatalkan hukuman mati terhadap pelaku G-30-S/PKI, Nyoto.

DI BEIJING, Aidit memerlukan menemui Mao Zedong. Tidak sulit menduga topik apa yang dibicarakan kedua pembesar Komunis itu pada hari-hari ketika Aidit dipanggil pulang ke Jakarta karena Sukarno mendadak jatuh sakit. Apa yang PKI akan lakukan jika Sukarno meninggal? Begitu kira-kira pertanyaan Mao. Jawaban Aidit tercatat dalam arsip Partai Komunis tiongkok. dalam pertemuan lima Agustus 1965 di Beijing, menurut catatan di arsip, D.N. Aidit menjawab pertanyaan Mao sebagai berikut:

Kami merencanakan membentuk sebuah Komite Militer. Mayoritas anggota Komite Militer adalah orang-orang sayap kiri, tapi juga harus melibatkan elemen Golongan Tengah. Dengan cara begini, kita akan membingungkan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita akan jadi sulit menebak corak dan kecenderungan Komite buatan kami itu. Dengan cara demikian, pimpinan militer golongan kanan tidak bisa dengan cepat bertindak menyerang kekuatan militer kita. Kalau kita langsung menunjukkan bendera kita, mereka akan segera menyerang bendera merah kita. Kepala Komite militer kita adalah anggota bawah tanah partai kita. Tapi, dia akan tampil sebagai tokoh netral. Komite Militer ini tidak boleh bertahan lama. Kalau terlalu lama, orang baik-baik dalam Komite itu akan berubah menjadi orang-orang jahat. Untuk itu secepatnya kita mempersenjatai para pekerja dan petani.



Aidit dan Mao di Tiongkok.

Rencana Aidit sebagai yang dikemukakannya kepada Mao itu, pada satu Oktober 1965 ternyata dengan tekun dijalankan oleh Ketua PKI. Letkol Untung, Brigjen

Supardjo, dan Kolonel Latif adalah orang-orang binaan lama PKI yang berhasil dengan aman bersembunyi di dalam TNI, sementara di antara para anggota dewan Revolusi cukup banyak yang bisa digolongkan sebagai bukan Komunis, melainkan hanya apa yang disebut Aidit sebagai golongan tengah.

Sebelum sempat menjalankan semua rencana Ketua PKI Aidit, Panglima Kostrad, Mayjen TNI Soeharto sudah berhasil melumpuhkan Gestapu. Tapi, dengan dokumen dari Beijing ini menjadi makin jelas bahwa PKI, paling sedikit D.N. Aidit, jelas berada di balik Gestapu. Yang dijalankan gerakan Komunis itu—sebelum PKI secara hampir tuntas dihancurkan tnl—adalah rencana yang dijelaskan Aidit kepada Mao di Beijing.[]

SERING DITERIAKI AGEN CIA

Selain peran-peran agen asing, yang juga amat penting, bahkan mutlak diteliti lebih jauh, adalah peran Syam Kamaruzaman bin ahmad Mubaidah. Sebagai intel dan Kepala Biro Khusus PKI, Syam dicurigai beberapa kalangan sebagai bekerja untuk beberapa pihak sekaligus. Ketika berada dalam tahanan militer, teman-temannya sesama tawanan politik menjauhinya bahkan menurut cerita mereka yang saya temui setelah bebas, di dalam tahanan Syam sering mereka teriaki sebagai “agen Cia”. Menurut penuturan anak Marhaen (a.M.) Hanafi, salah seorang tokoh angkatan 45 dan anak angkat Presiden Sukarno, dalam bukunya yang berjudul *Menggugat Kudeta Soeharto: Dari Gestapu ke Supersemar*, pada zaman Revolusi, Syam Kamaruzaman—lahir pada 30 april 1924 di tuban, Jawa Timur—bekerja sebagai intel polisi di Pati, Jawa Tengah. Atasannya adalah pembesar polisi Kota Pati yang bernama Mudigdo, seorang yang berasal dari keluarga ningrat yang juga kelahiran tuban. dokter tanti yang kemudian menjadi istri D.N. Aidit adalah putri Mudigdo dari perkawinannya dengan perempuan

Minangkabau yang bernama Siti Aminah.



Syam Kamaruzaman.

JACQUES LECLERC, SEORANG SEJARAHWAN PRANCIS yang meneliti gerakan Komunisme di Indonesia, menyebut Mudigdo sebagai seorang pengikut setia amir syarifuddin—mantan Perdana Menteri yang kemudian terlibat pemberontakan Komunis di Madiun—dan berusaha mendirikan Polisi Merah di daerah Pati setelah pecahnya pemberontakan PKI di Madiun.

Mudigdo dan pengikutnya ditangkap TNI dan ditembak mati pada 21 november 1948. Leclerc juga menuturkan, istri Mudigdo melanjutkan kegiatannya

sebagai aktivis Komunis sampai ditahan setelah pecahnya Gestapu, 1965. Siti aminah pernah duduk di dewan Perwakilan rakyat Gotong royong (dPrGr) dan posisi tertingginya di dalam kubu PKI adalah sebagai Wakil Ketua Gerwani, organisasi wanita PKI.

Di kemudian hari berseliweran informasi mengenai berbagai kegiatan intel yang pernah dikerjakan Syam. Yang paling banyak mendapat perhatian ialah kegiatannya sebagai intel tentara. disebutkan bahwa di Jakarta Syam pernah menjadi intel Kodam Jaya, di Jawa Barat pernah menjadi intel untuk Kolonel suwarto, waktu itu Wakil Komandan sekolah staf dan Komando Angkatan Darat (seskoad). Yang tetap menjadi pertanyaan, apakah Syam bekerja di kalangan militer sebagai orang PKI atau dia adalah agen tentara yang disusupkan ke dalam PKI.

Mengingat bahwa Syam sudah menjadi orang kiri pada zaman Revolusi, dan hubungan dekatnya dengan keluarga istri D.N. Aidit dan Aidit sendiri, buat sementara saya lebih cenderung menyimpulkan, Syam sebagai agen Komunis dalam tentara. Bukan sebaliknya.

Sebagai pimpinan Biro Khusus PKI yang langsung berada di bawah D.N. Aidit, posisi Syam sebagai intel di kalangan tentara sangat menguntungkan kegiatannya dalam membina para perwira yang kemudian dikenal sebagai “perwira berpikiran maju”. Selain Syam, sejumlah anak buahnya di dalam Biro Khusus juga berhasil “disusupkan” ke dalam tentara di berbagai Komando dan instalasi militer. hal yang demikian ini memang tidak sulit karena jauh sebelum Biro Khusus terbentuk, dalam

tentara memang sudah cukup banyak perwira-perwira berhaluan kiri. Perwira-perwira seperti Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, Brigjen TNI Supardjo, dan Jenderal rukman dari siliwangi dan banyak lagi lainnya, sudah kiri dan dekat dengan PKI sejak zaman Revolusi.

Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang dulu terlibat pemberontakan di Madiun, 1948. Mereka selamat dan lolos dari pembersihan karena tentara kolonial Belanda menyerang dan menduduki wilayah republik tidak berselang lama setelah pemberontakan PKI di Madiun. Perwira-perwira beraliran kiri dalam tentara seperti itulah yang berperan memfasilitasi terjadinya penyusupan agen-agen PKI ke dalam tubuh tentara di kemudian hari.

UNTUK MENGETahui GESTAPU, Peran Syam amat penting diungkapkan. Menurut penuturan Letnan Kolonel Penerbang Heru Atmodjo dalam bukunya, *Gerakan 30 September: Kesaksian Letkol (Pnb) Heru Atmodjo*, adalah Syam yang sebenarnya langsung memimpin operasi militer Gestapu pada satu Oktober pagi itu.

Dalam penuturannya mengenai Gestapu, Heru Atmodjo— yang atas perintah Omar Dani berada di senko (sentral komando), pusat kegiatan Gestapu pada pagi hari satu Oktober— merasa heran melihat bagaimana Syam, seorang sipil, memimpin langsung operasi militer, sementara di sekitarnya ada Brigadir Jenderal TNI Supardjo, Letnan Kolonel Untung, dan Kolonel Latif. Menurut penuturan Supardjo, ketika kemudian berjumpa Heru Atmodjo di rumah tahanan militer, Syam waktu itu

mengaku pernah mendapat latihan militer di Tiongkok.

Bahwa secara resmi Untung yang ditunjuk memimpin Gestapu, sumber-sumber CIA menyebutkan soal itu berdasar pada keputusan Syam memanfaatkan kedudukan Untung sebagai pengawal Sukarno. dengan cara demikian, Syam akan berharap lebih mudah meyakinkan publik, Gestapu memang dilancarkan untuk menyelamatkan Presiden dari rencana kudeta para Jenderal. Singkatnya Untung didapuk sebagai pemimpin karena posisinya di Istana, dan sama sekali bukan karena kepemimpinannya. Para perwira lain dalam kelompok Gestapu secara pribadi pernah mempertanyakan pilihan Syam atas Untung.



Heru Atmodjo di masa tua.

Di depan para hakim dan jaksa Mahmillub yang mengadilinya, Untung membenarkan pengamatan Heru Atmodjo.

Dari hati saya yang paling dalam, saya betul-betul menyesalkan apa yang terjadi pada satu Oktober itu. Saya tidak tahu apa-apa dan juga sama sekali tidak diberi tahu oleh para pejabat militer tentang gerakan itu maupun oleh pejabat partai yang merencanakan gerakan tersebut.

MASIH TENTANG PERAN SYAM pada operasi militer Gestapu, dalam kesaksiannya pada pengadilan tokoh PKI, nyoto, Maret 1966, Untung menyebut Syam dan juga Pono, keduanya anggota Biro Khusus PKI, sebagai bagian inti Gestapu yang mewakili Aidit. Pada pengadilan yang sama, saksi Mayor udara suyono menyebutkan bahwa Syam sebagai orang yang menentukan dalam rapat-rapat perencanaan operasi militer Gestapu. dalam Mahmillub yang mengadilinya pada 1968, Syam menyebut Aidit yang memerintahkan dirinya melaksanakan Gestapu dalam kedudukannya sebagai Kepala Biro Khusus. Tidak dijelaskan bagaimana, menurut Aidit, cara Syam harus melaksanakan Gestapu.

Kenyataan yang disaksikan Heru Atmodjo itu berbeda dengan kesaksian dan pengakuan sudisman di depan Mahmillub. Sudisman menjelaskan, Gestapu adalah gerakan para “perwira maju” untuk mencegah perampasan kekuasaan yang menurut PKI telah dirancang oleh “dewan Jenderal”. dan pemimpin perwira maju itu ialah Letnan Kolonel Untung dari Cakrabirawa, komandan pasukan pengawal Presiden. Tapi, menurut kesaksian

Heru Atmodjo, yang dilihatnya memimpin operasi militer Gestapu ternyata Syam, bukan Untung. Kenyataan yang dikemukakan Heru Atmodjo itu diperkuat oleh kesaksian Supardjo dan Untung di depan Mahmillub maupun penuturannya kepada Heru Atmodjo tatkala keduanya jumpa di rumah tahanan militer.



Letkol Untung.

Sementara itu dari semua catatan yang ada mengenai Syam, belum kunjung ditemukan informasi yang menunjukkan Syam pernah mendapat latihan militer di Tiongkok sebagai yang disampaikan kepada Brigjen Supardjo. Lalu, bagaimana kita harus menjelaskan seorang Jenderal, seorang Kolonel, seorang Letnan Kolonel,

sejumlah Mayor, Kapten, dan Letnan, secara berjamaah menjadikan diri mereka anak buah seorang sipil dalam sebuah operasi militer yang begitu penting dan rumit?

apakah keputusan PKI mendukung gerakan para “perwira maju” yang sejatinya di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung diubah oleh Syam di lapangan, dari posisi hanya sebagai “pendukung” berubah menjadikan dirinya pemimpin operasi? Pada sidang Mahmillub, sudisman tidak membicarakan penyimpangan yang dilakukan Syam itu. Sudisman hanya menegaskan, Syam berhubungan langsung dengan D.N. Aidit. Artinya, sudisman tidak tahu apa persisnya perintah Aidit kepada Syam.

Maka, kalau Syam mengubah perintah Aidit, sudisman juga tidak mungkin tahu. Perintah Aidit juga tidak mungkin diketahui secara terperinci oleh Untung, Supardjo, dan Latif. Para perwira “berpikiran maju” itu memang tidak tercatat sebagai pernah jumpa Aidit menjelang operasi Gestapu.

KEKACAUAN DAN KEGAGALAN OPERASI GESTAPU pimpinan Syam itulah yang mendorong Heru Atmodjo mencurigai operasi Gestapu itu sebagai gerakan militer yang memang dirancang untuk gagal. Tidak terlalu sulit sebenarnya mengerti dasar kecurigaan Heru Atmodjo itu. Lihat saja bagaimana pasukan yang ditugaskan di lapangan Monumen Nasional (Monas) tidak disiapkan logistiknya. Akibatnya, mereka kelaparan. Sebagian dari mereka (Batalion 530 dari Brawijaya) dengan mudah siang itu ditarik masuk ke Kostrad untuk disuguhi makan siang.

Batalion 454 dari Diponegoro yang dalam keadaan kelaparan mundur ke wilayah Pangkalan udara militer halim, mendapatkan makan yang secara tergesa-gesa disiapkan oleh Komandan Pangkalan udara Halim Perdanakusuma, Kolonel udara Wisnu djajengminardo. Menarik untuk diketahui, Batalion 454 pernah dipimpin oleh Letkol Untung dan para prajuritnya sebagian besar berasal dari laskar kiri di masa Revolusi.[]

KOMISARIS POLITIK

Perhatikan pula kekacauan yang terjadi di rumah Jenderal Nasution. Bukan saja para penculik gagal membawa Nasution, mereka bahkan tidak bisa membedakan antara Letnan Pierre Tendean, ajudan Nasution, dan Jenderal Nasution. Maka, yang dibawa ke Lubang Buaya untuk akhirnya dibantai, adalah Tendean.

Penjelasan dari kesalahan mendasar ini bersumber pada para penculik yang, kemungkinan besar, selain kurang kenal liku-liku Kota Jakarta, mereka juga tidak kenal Nasution dari dekat. Bukan mustahil mereka juga tidak punya waktu cukup mempelajari foto-foto Jenderal Nasution dan denah rumah Menko Hankam/KsaB itu sebelum operasi militer dimulai.

Lebih mendasar menjadi alasan bagi timbulnya kecurigaan tentu saja kenyataan operasi Gestapu yang begitu penting tidak dipercayakan kepada perwira militer dengan pangkat tinggi serta berpengalaman tempur panjang (Supardjo, Latif, dan untung), tapi dikerjakan sendiri oleh Syam, yang ternyata sama sekali tidak punya pengalaman memimpin operasi militer.

YANG TIDAK KURANG MENARIK, sikap para “perwira

berpikiran maju itu” membiarkan Syam memimpin operasi militer serumit Gestapu tersebut. Pertanyaan menarik di sini ialah bukankah sikap *nrimo* (menerima saja) para perwira itu merupakan bukti bahwa mereka sebenarnya adalah anggota partai yang harus selalu taat pada garis partai dan tunduk pada perintah pembinanya? dari fakta-fakta ini saya sangat cenderung percaya bahwa Syam, Ketua Biro Khusus, adalah **Komisaris Politik** bagi anggota partai yang disebut oleh PKI sebagai “perwira berpikiran maju” itu.

Apa pun penjelasannya, juga tidak mudah dimengerti Aidit yang ingin Gestapu dilihat hanya sebagai persoalan internal Angkatan Darat, memerintahkan seorang pemimpin Biro Khusus PKI, seorang sipil, memimpin sendiri suatu operasi militer yang rumit, padahal PKI memiliki sejumlah “perwira berpikiran maju” yang telah mereka bina lama, memenuhi syarat dan bersedia memimpin gerakan militer tersebut.

Kecurigaan adanya skenario kegagalan itu lebih diperkuat oleh susunan anggota dewan Revolusi yang diumumkan siang hari itu. di situ nama Presiden Sukarno sama sekali tidak disebut, bahkan kabinetnya dinyatakan demisioner. Kasarnya, bubar. Kebijakan seperti ini hanya berhasil menjadikan Gestapu dan tentu saja PKI secara serentak menjadi musuh bersama kaum anti-Komunis, Angkatan Darat, dan para pengikut Sukarno.

BERTAHUN-TAHUN SETELAH GESTAPU, dalam banyak percakapan saya dengan orang yang dulu kenal Syam—

pada zaman Revolusi di Yogyakarta maupun di Jakarta pada tahun lima puluhan dan enam puluhan—umumnya mereka cenderung melihat Syam Kamaruzaman bin ahmad Mubaidah sebagai pada dasarnya seorang avonturir. dan dalam PKI, dia lebih merupakan seorang *apparatchik* (aparap) partai yang tidak tertarik pada teori-teori Marxisme dan literatur partai yang memang rumit dan banyak macamnya. Sebagai contoh mengenai watak dan karakter Syam, seorang mantan wartawan senior *Harian Rakjat*, koran resmi PKI, menceritakan pengalamannya kepada saya setelah dipulangkan dari pembuangan di Pulau Buru:

Menjelang ulang tahun PKI ke-45, saya ikut hadir dalam sebuah rapat panitia yang dipimpin Ketua Partai. Berdasarkan pengalaman di Beijing meliput perayaan ulang tahun RRT saya menyatakan perbedaan pendapat saya kepada D.N. Aidit mengenai rencananya mengadakan sendratari untuk merayakan pesta ulang tahun PKI pada Mei 1965. Tiongkok punya ballet Nasional, kita tidak punya. Dasar apa yang akan kita pakai untuk membuat sendratari itu? Aidit marah kepada saya. Dia berdiri, saya juga berdiri. Aidit waktu itu sudah biasa menempeleng orang. Saya berdiri bukan untuk menantang sang Ketua, melainkan agar mudah lari kalau dia mendekati saya.

Setelah rapat, ketika berjalan ke luar halaman kantor partai, seseorang mendekati kami, “Eh, anak buahmu ini sudah berani, ya, menantang Ketua,” kata orang itu kepada senior saya yang berjalan bersama saya. Lalu dengan nada mengancam, orang itu berkata singkat kepada saya. “Hatihati, ya.”

Saya tanya senior saya, siapa orang itu? “Itu Syam,” jawabnya.

Akan tetapi bagaimana bisa, dengan watak demikian, Syam untuk waktu yang cukup lama mendapat kepercayaan D.N. Aidit? Jawabannya barangkali adalah:

Aidit yang makin diktatorial dalam memimpin partai lebih membutuhkan seorang pekerja partai yang menjalankan perintahnya dengan loyal tanpa banyak diskusi lagi. Mungkin jasa Syam menyelamatkan Aidit pada 1950 dari pengejaran aparat keamanan Kabinet Sukiman dan hubungan lamanya dengan keluarga istri sang Ketua, juga ikut dipertimbangkan Aidit dalam memercayai Kepala Biro Khusus tersebut.

Menurut asahan alham Aidit, kelemahan abangnya, “cepat memercayai kawan-kawannya meskipun langgam hidupnya cukup waspada terhadap musuh.” asahan, kini menetap di Belanda, dalam memoarnya juga menilai abangnya sebagai, “mudah dikhianati teman-temannya karena sifat mudah percaya dan kurang waspada terhadap kawan sendiri.”

Mengikuti dengan saksama kisahnya, membaca dan mendengar dari berbagai sumber, saya kurang percaya tuduhan yang menyebut Syam mengkhianati Aidit. Soalnya bukan pengkhianatan, melainkan kegagalan Gestapu lebih meyakinkan saya sebagai akibat keteledoran dan kecerobohan sang Ketua dan Kepala Biro Khususnya.

KaLaU KiTa KeMBaLi MeMBiCaRaKan soal pembantaian para Jenderal, sulit membayangkan Sukarno memberi perintah atau bahkan mendiamkan atau menyetujui pembasmian para Jenderal. Seperti sudah saya katakan berkali-kali, yang diinginkan Sukarno hanyalah mengganti pimpinan Angkatan Darat dengan Jenderal yang tunduk kepada Pemimpin Besar Revolusi hingga

mudah dikendalikannya. Membantai para Jenderal Angkatan Darat hanya akan menimbulkan kesulitan bagi Sukarno sebagai yang terbukti setelah Gestapu.

Dalam rangka inilah, kita sebaiknya mengerti penunjukan Mayjen TNI Pranoto reksozamodra—asisten Personalia Panglima Angkatan Darat—menjadi pejabat sementara pimpinan Angkatan Darat, menggantikan Ahmad Yani, hanya beberapa jam setelah para pimpinan Angkatan Darat tewas dibantai Gestapu.

Jenderal Pranoto adalah seorang perwira dari Kodam Diponegoro yang terkenal Sukarno, penganut taat ajaran kebatinan, hidup sederhana, dan berkecenderungan kiri. Reksozamodra menggunakan posisinya sebagai Panglima operasi penumpasan PRRI (sebagai pengganti Kolonel a. Yani) untuk membantu kegiatan PKI di sumatra tengah. Latar belakang demikian itulah yang menjelaskan mengapa Pranoto tidak masuk dalam lingkaran Yani di Markas Besar Angkatan Darat. Kemudian terbukti di kemudian hari, Pranoto adalah satu-satunya pimpinan Angkatan Darat yang jumpa D.N. Aidit di rumah Syam beberapa hari sebelum Gestapu.

Singkat kata, lewat jalan daulat, Sukarno hanya berniat menempatkan di Angkatan Darat seorang pimpinan semacam Omar Dani yang loyal tanpa reserve pada Panglima tertinggi. Jenderal Pranoto memenuhi syarat demikian, karena itu diangkat Presiden Sukarno menggantikan Jenderal Yani, bahkan beberapa hari sebelum jasad Yani ditemukan.

Aidit, hampir bisa dipastikan adalah konseptor

Gestapu sebagai soal internal Angkatan Darat. Penjelasan nya? PKI tidak siap secara fisik dan terbuka menghadapi Angkatan Darat yang merupakan kekuatan anti-Komunis paling berbahaya bagi partai tersebut. Itulah sebabnya ketika ada info dari Syam mengenai perintah Sukarno kepada Untung, Aidit cepat membuat rencana menumpang.

Aidit sangat sadar Angkatan Darat dan semua orang-orang anti-Komunis di Indonesia selalu mengintai PKI, dan karena itu Partai Komunis tersebut harus ekstra hati-hati. Membunuh para Jenderal, seperti terbukti kemudian, hanya akan menjadi alasan (*pretext*) bagi tentara dan kekuatan anti-Komunis lainnya untuk secara beramai-ramai mengeroyok dan menghancurkan PKI. oleh sebab itu, hampir bisa dipastikan bukan Aidit yang menggagas pembunuhan para Jenderal.

Soeharto juga bukan orang yang patut dicurigai membantai teman-temannya sendiri. Sudah saya katakan bahwa yang masuk akal ialah Soeharto memang tahu akan terjadi sesuatu atas teman-temannya di Markas Besar Angkatan Darat. Tapi, sesuatu itu adalah rencana Sukarno mengganti pimpinan Angkatan Darat. Soeharto tidak mudah menghalangi rencana Sukarno. Pangkostrad itu tidak punya keberanian dan kekuatan militer menghalangi rencana Pemimpin Besar Revolusi. Lagi pula bukan tidak mungkin Soeharto membayangkan bakal mendapatkan keuntungan besar—posisi sebagai Panglima Angkatan Darat—setelah Yani didaulat dan disingkirkan. dan kalau memang ada bayangan dan harapan demikian, kemudian

terbukti menjadi kenyataan, Yani terbunuh, Sukarno akhirnya tersingkir, Soeharto berkuasa 30 tahun lamanya.

Masih berbicara tentang pembantaian tersebut, mari kita kembali ke senko [sentral komando], pusat kegiatan Gestapu di kawasan yang berada di sekitar lapangan terbang Halim Perdanakusuma. harus dicatat, sebagai yang disaksikan beberapa tokoh Gestapu yang berada di sekitar Syam pada pagi hari pertama bulan Oktober di senko, adalah Syam yang memerintahkan pembunuhan dua Jenderal yang tiba dengan selamat di Lubang Buaya, ketika yang lainnya sudah terlebih dahulu terbunuh di rumah masing-masing. Juga perlu dicatat, Brigjen Supardjo, Kolonel Latif, maupun Letnan Kolonel Untung, semua mengaku terkejut ketika tahu terjadinya pembantaian tersebut. Supardjo, Latif, dan Untung memang tidak punya akses langsung kepada pasukan yang bertugas di lapangan hari itu. Ini juga fenomena yang aneh.

Kemungkinan *pertama*, kenyataan tersebut bisa diterangkan sebagai berikut: terbunuhnya lima Jenderal sebelum tiba di Lubang Buaya bukan atas perintah Syam yang memimpin operasi. Tapi, terbantainya kelima pimpinan Angkatan Darat tersebut kemudian disadari oleh Syam sebagai tanda Gestapu sudah gagal. Karena itu, sisa dua Jenderal yang selamat tiba di Lubang Buaya diperintahkan oleh Syam untuk sekalian saja dihabisi. Mereka berdua toh sudah tidak berguna lagi. Keduanya tidak mungkin lagi dihadapkan kepada Presiden Sukarno.

Kemungkinan *kedua*, bertolak belakang dari

kemungkinan pertama, tetap terbuka kemungkinan— meski amat kecil— pembunuhan keenam Jenderal adalah justru atas perintah Syam yang bertindak sesuai dengan arahan agen asing. Lewat pembantaian tersebut, agen asing, seperti telah saya uraikan— bermaksud melakukan provokasi kepada Angkatan Darat agar secepatnya bertindak melikuidasi Sukarno dan PKI. Kemungkinan yang amat kecil ini hingga sekarang belum menemukan dukungan data dan fakta pembenarannya.

Kemungkinan *ketiga*, yang jauh lebih masuk akal, pembantaian atas lima Jenderal di rumah masing-masing terjadi karena kepanikan prajurit di lapangan. Perintah yang harus mereka laksanakan adalah “para Jenderal itu diambil hidup atau mati”. dalam keadaan terjadi perlawanan seperti yang dilakukan Jenderal Yani, misalnya, maka kekerasan sulit mereka hindarkan. dan Jenderal Yani serta beberapa Jenderal yang melawan, akhirnya semua memang terbantai.

Pembunuhan memang tak terhindarkan karena persiapan penculikan tidak dilakukan dengan perencanaan yang teliti dan saksama. Keadaan yang demikian ini hampir bisa dipastikan disebabkan oleh kepemimpinan Syam yang tidak ditopang oleh pengalaman militer dalam memimpin sebuah operasi yang rumit dan sensitif.

Sebagian besar pasukan yang melakukan penculikan adalah orang baru di Jakarta. Mereka kemungkinan besar bukan hanya tidak kenal Jakarta, juga tidak kenal dengan baik mereka yang akan diculiknya. Bagi saya, faktor persiapan operasi yang tidak rapi yang menyebabkan

terjadinya kepanikan di lapangan ini lebih meyakinkan sebagai penjelasan terbantainya para Jenderal tersebut.

Juga boleh dipertimbangkan kemungkinan di antara tentara yang bertugas menculik itu ada kader PKI yang tidak tahu skenario penculikan hanya sebagai langkah ke arah pendaulatan. Bukan tidak mungkin—meski kemungkinannya juga tidak besar —tentara yang kader PKI itulah yang memainkan peran penting dalam pembantaian para Jenderal tersebut. Kader PKI, menurut Brigjen Supardjo, terutama ada dalam kompi yang berasal dari pasukan Pengawal Presiden, bagian dari Batalion Cakrabirawa yang berada di bawah pimpinan Untung.

YANG PALING MUNGKIN saya simpulkan sekarang dari kisah tragedi berdarah Gestapu ini, pembantaian para Jenderal bukan berdasarkan perintah Presiden Sukarno, tidak dari D.N. Aidit, juga bukan dari Soeharto. Sukarno cuma mau menyingkirkan Yani dan kawan-kawannya dari Markas Besar Angkatan Darat. Aidit memanfaatkan rencana Sukarno tersebut. Ini berarti bahwa gagasan awal yang kemudian muncul dalam bentuk Gestapu, bukan berasal dari Aidit, melainkan justru berasal dari Sukarno sendiri. Pemimpin PKI itu hanya menumpang dengan memanfaatkan gagasan sang Presiden.

Apakah dengan demikian PKI bisa dianggap terlibat Gestapu? Pilihan Aidit untuk ikut bermain dalam skenario karya Sukarno tersebut, bagi saya cukup masuk akal untuk mendorong kita berkesimpulan bahwa PKI terlibat Gestapu. Memang tidak semua pimpinan PKI tahu

keputusan Aidit yang ternyata berisiko amat fatal itu. Tapi, PKI tidak bisa terhindar dari bertanggung jawab atas langkah-langkah Aidit sebab mereka memang sudah lama membiarkan sang Ketua memimpin partai secara diktatorial dan sentralistik.

Tradisi partai Komunis yang dipimpin dengan cara diktatorial —Stalin di Moskow, Mao di Tiongkok, Kim Il sung dan anak serta cucunya di Korea utara, Castro di Cuba—di Indonesia diperkuat oleh tradisi kultus individu yang juga dinikmati Sukarno waktu itu. Berdasarkan keputusan Aidit melibatkan Biro Khusus ke dalam Gestapu, alasan untuk membubarkan PKI tersedia lebih dari cukup. Bahkan, jauh lebih cukup dan lebih meyakinkan juga jika dibandingkan dengan alasan yang dipakai Sukarno membubarkan Masyumi dan PSI (1960) yang dituduh sang Presiden sebagai terlibat PRRI/Permesta.

Dan bahwa Sukarno bertahan untuk terus menolak membubarkan PKI, bahkan secara terbuka memuji PKI, akibatnya parah bagi anggota partai dan para simpatisannya. Selain menjadi korban pembantaian massal, sebagian cukup besar dari mereka terkurung bertahun-tahun dalam sejumlah penjara atau hidup terisolasi di Pulau Buru, sementara banyak lainnya hidup terasing sebagai eksil di berbagai penjuru dunia.

Sembari tetap bertahan pada sikap bersikeras tidak membubarkan PKI, Sukarno sibuk menjanjikan akan datangnya komando terakhir penyelesaian Gestapu. Besar dugaan Sukarno menunda penyelesaian sembari mencari

kesempatan memukul balik Soeharto.

untuk maksud itulah, sang Pemimpin Besar Revolusi berusaha tahu siapa saja di antara para petinggi militer yang masih loyal kepadanya. Tugas terakhir ini dibebankan ke pundak Menteri negara Oei Tjoe Tat. "... saya tugaskan kamu untuk meraba-raba siapa di antara para Jenderal yang masih setia dan siapa yang mengguncang-guncang kursi kepresidenan," perintah Sukarno kepada Menteri oei.

Di antara Jenderal yang ditemui Menteri oei adalah Soeharto. Berikut ini catatan Oei Tjoe Tat dalam memoarnya, *Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno* mengenai pertemuan tersebut.

... Jenderal Soeharto mengomel: "PKI beberapa kali menusuk kita? Waktu kita berkelahi melawan Belanda kita ditusuk, sekarang semua pemimpin kita dibantai. Apa lagi yang meski kita tunggu? Kenapa tidak dibubarkan saja? Tunggu apa lagi? Pada 1955, ketika saya menjadi Panglima di Jawa Tengah, saya kasih tahu, 'Pak, hati-hati Pemilu di Jawa Tengah, jadi merah nanti kalau tidak diambil tindakan tertentu. Merah semua, Komunis.' Jawab Presiden, 'Merah kek, coklat kek, hijau kek, biru kek, terserah rakyat. Namanya saja Pemilu.'"

"Itu apa? Bukan pemimpin namanya."

Selain dengan Jenderal Soeharto, Menteri oei juga menemui seorang petinggi Angkatan Udara. Yang terakhir ini mengeluh kepada utusan Presiden. Katanya,

Kita ini kecewa sama Bapak. Sudah siapkan roket di Maospati [Madiun], diarahkan ke Jakarta. Dilaporkan kepada Bung Karno, malah dimarahi. Mau merusak Indonesia? Mau merusak ibu kota? Masak Bung Karno dituduh membunuh tujuh Jenderal. Lha, membunuh nyamuk saja tidak berani. Saya lihat

sendiri. *Wong* melihat darah saja tidak berani.



Oei Tjoe Tat, Menteri negara yang ditugasi Sukarno untuk menyelidiki siapa jenderal yang masih setia.

Dengan bersikeras tetap membela PKI sampai akhirnya Soeharto—sebagai Pangkopkamtib dan pemegang surat Perintah 11 Maret (Supersemar)—membubarkan Partai Komunis tersebut, Sukarno hanya makin mempersulit orang-orang Komunis dan juga para pengikut Sukarno dan akhirnya Sukarno sendiri.

Gubernur Jawa Barat, Brigjen TNI Mashudi, dan Panglima siliwangi, Mayjen TNI Ibrahim adjie—waktu itu diketahui sebagai bersimpati kepada Sukarno—bersama-sama membujuk sang Presiden membubarkan PKI. Menurut sejarawan Nina Herlina dalam buku *Malam Bencana 1965*, “Ibrahim adjie dan Mashudi berpikir bahwa

kalau saja Bung Karno mau membubarkan PKI waktu itu, maka pembersihan tanpa proses pengadilan itu akan terhenti”

BERDASARKAN INFORMASI yang ada saat saya mengetik tulisan ini, sekali lagi, saya berkesimpulan, pembantaian para Jenderal itu lebih meyakinkan sebagai akibat kepanikan prajurit di lapangan yang bersumber pada perencanaan Gestapu yang kacau. Kendati demikian saya tetap tidak menutup kemungkinan—jika kemudian ditemukan bukti—bahwa agen asing memegang peran penting di balik pembantaian para Jenderal tersebut.

Kalau kemudian terbukti ada peran agen asing di balik pembantaian tersebut, maka itu mungkin bisa menjadi dasar memperkuat kesimpulan Heru Atmodjo terhadap Syam yang dicurigainya memimpin sebuah operasi militer yang dirancang untuk gagal.

Kecuali kita mendapatkan bukti itu, maka operasi Gestapu tidak bisa disebut sebagai dirancang untuk gagal. untuk waktu sekarang ini, kegagalan operasi militer Gestapu pimpinan Syam, bagi saya, lebih merupakan akibat petualangan dan kecerobohan Kepala Biro Khusus PKI yang memimpin operasi Gestapu tanpa pengetahuan dan pengalaman memimpin operasi militer.

Namun, sebaiknya saya katakan juga bahwa kisah berdarah yang amat tragis ini mungkin bisa dihindarkan jika sekiranya Presiden Sukarno tidak merasa terpaksa harus menyingkirkan Jenderal Ahmad Yani dengan cara daulat, yang ternyata dengan mudah ditumpangi PKI.

Informasi yang saya kumpulkan menunjukkan bahwa Sukarno waktu itu memang sudah sangat kehilangan kepercayaan kepada Yani, di satu pihak, di pihak lain sang Presiden juga tidak cukup kuat dan yakin untuk begitu saja dengan cara normal menyingkirkan Panglima Angkatan Darat itu.

Situasi politik sudah amat berbeda dari keadaan saat Sukarno dengan mudah menyingkirkan Nasution pada 1962. Konflik sudah amat tajam, masyarakat sudah sangat terbelah, dan Perang dingin sudah amat memuncak. Nah, di tengah-tengah ketegangan politik seperti itu, Sukarno yang tetap ingin berkuasa sambil melindungi PKI (mempertahankan Nasakom), tidak lagi melihat jalan lain kecuali kembali pada cara tradisional, daulat. dengan cara yang yang dipilihnya itu rencana Presiden Sukarno itu—sebagaimana yang dikisahkan Kolonel Bambang Widjanarko dalam buku *The Devious Dalang*—memang gampang bocor ke berbagai pihak.

Lewat kebocoran itulah terjadinya pemboncengan kepentingan lain. Yang jelas dan telah terbukti, rencana daulat itu telah ditumpangi PKI lewat Biro Khusus pimpinan Syam—pembina para perwira “berpikiran maju”—yang berada langsung di bawah kendali D.N. Aidit.[]

POSTSCRIPTUM: SUKARNO, SOEHARTO, DAN PERTARUNGAN POLITIK PASCA-GESTAPU

Menengok balik ke belakang setelah 50 tahun, terlihat dengan jelas Gestapu 1965 menjadi isu politik dan keamanan berlangsung relatif singkat. Begitu efektifnya TNI dan kekuatan masyarakat anti-Komunis menghancurkan PKI, dalam waktu pendek PKI nyaris tidak lagi bertahan sebagai topik penting pembicaraan. PKI yang menakutkan hingga beberapa saat sebelum satu Oktober 1965, mendadak menghilang, tak terdengar, bahkan seperti tidak pernah ada. Yang masih rajin mengingatkan bahaya dan ancaman PKI ialah militer yang, antara lain, memanfaatkan bahaya Komunis sebagai cara mengukuhkan kekuasaan mereka.

Secara diam-diam, pada saat yang sama, sejumlah orang memang ada yang masih mempertanyakan posisi dan peran Soeharto hari-hari itu, hubungan lamanya dengan Kolonel Latif dan Letnan Kolonel Untung, pertemuan Soeharto dengan Latif di Rumah Sakit beberapa jam sebelum operasi Gestapu bergerak, serta

misteri di balik dua batalion Kostrad yang terlibat Gestapu. Tapi dalam waktu singkat, seiring dengan makin terkonsolidasinya kekuasaan Soeharto, semua pertanyaan tersebut menghilang dengan sendirinya dari wacana publik.

Yang bertahan lama adalah ketegangan Soeharto dengan Presiden Sukarno. Untuk beberapa bulan, Sukarno dengan gigih bertahan menolak pembubaran PKI. Tapi, lewat surat Perintah 11 Maret 1966 yang terpaksa diberikan Sukarno kepada Soeharto, PKI akhirnya dibubarkan oleh Pangkopkamtib. Selama ketegangan singkat mengenai nasib PKI itu, dari pihak PKI sendiri tak terdengar kabar sedikit pun. Tokoh-tokoh PKI, tingkat lokal maupun Nasional, menghilang, tertangkap, atau terbunuh. Sebagian dibunuh tentara, tapi kebanyakan terbunuh masyarakat. Maka yang kemudian terlibat dalam “pertarungan politik” (*power struggle*) ialah Soeharto berhadapan dengan Sukarno.

Kalau tentara sebagai kekuatan politik sebelum Gestapu dipimpin oleh Nasution kemudian Ahmad Yani, maka setelah Gestapu, Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat tampil sebagai ketua “Partai tentara”. Kendati memiliki legalitas dan kontrol atas Angkatan Darat, Soeharto tetap saja harus berhati-hati menghadapi Presiden Sukarno yang masih sangat berpengaruh waktu itu.

Menghadapi PKI, Jenderal Soeharto—dengan dukungan masyarakat anti-Komunis—nyaris tidak menemukan hambatan menghancurkan partai Komunis

dalam waktu singkat. Tapi ketika berhadapan dengan Sukarno, bahkan pasukan-pasukan Angkatan Darat tidak semuanya dengan cepat dikuasai Soeharto. Apalagi Angkatan lainnya.

Soeharto memerlukan sekitar dua tahun untuk secara perlahan menyempurnakan penguasaannya atas tentara, yang waktu itu lebih dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Selama proses yang dua tahun tersebut, dalam kalangan tentara Soeharto harus menghadapi pendukungnya yang radikal sembari berurusan dengan pendukung Presiden Sukarno yang fanatik. di pihak Soeharto, ada Jenderal Kemal Idris, Kolonel Sarwo Edhie, dan Jenderal Hartono rekso dharsono. Mereka bertiga inilah yang dengan loyal dan tegas terus mendesak agar Soeharto segera menyingkirkan Presiden Sukarno.

Di pihak loyalis dan pendukung fanatik Presiden Sukarno pada berbagai unit militer di Jawa Tengah dan timur tidak sulit ditemukan mereka yang siap mati untuk sang Presiden. Tapi yang paling menonjol di antara yang banyak itu adalah Panglima Marinir yang juga Wakil Panglima Angkatan Laut, Letnan Jenderal KKO Hartono.

Dengan kecerdikan politik serta kesabarannya, Soeharto bukan saja berhasil menyingkirkan para penantanganya di berbagai satuan militer, melainkan dengan dingin juga berhasil terbebas dari para perwira yang loyal dan radikal pendukungnya. Kemal Idris terlempar ke Makassar (menjadi Pangkowlhan) sebelum akhirnya dikirim ke Beograd sebagai duta besar, dharsono

ke Bangkok (menjadi duta besar), dan Sarwo Edhie mendapat tugas ke Medan sebelum akhirnya ditugaskan sebagai Pangdam di Papua. Soeharto akhirnya berhasil berdiri tegak sebagai Panglima Angkatan Darat dan Ketua “Partai tentara”. dari posisi kuat seperti itulah secara berangsur Soeharto memenangkan pertarungan politik melawan Presiden Sukarno.

Apakah Soeharto menyingkirkan Sukarno dengan melakukan apa yang sering dituduhkan kepadanya sebagai “Kudeta Merangkak?” *Pertama*, aksi kudeta haruslah dimengerti sebagai gerakan cepat dengan sasaran utama instalasi yang mendukung atau dikuasai oleh pemerintah yang menjadi sasaran penggulingan. *Kedua*, kudeta pada umumnya dilakukan oleh militer tak berpolitik yang lewat aksi kudeta memasuki politik untuk menguasai pemerintahan.

Dua kriteria ini tidak mudah ditemukan dalam kegiatan dan diri Soeharto. Presiden Sukarno tersingkir pada 1968 untuk digantikan oleh Jenderal Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia, setelah selama dua tahun terjadi pertarungan politik (*power struggle*) antara Soeharto melawan Sukarno. Jadi, jelas tidak ada kudeta.

Hal penting lainnya yang suka dilupakan para pengkritik Soeharto, tentara Indonesia adalah sebuah kekuatan politik legal sejak Presiden Sukarno—sebagai Ketua dewan Nasional pada november 1958—memasukkan tentara ke dalam Golongan Karya sebagai satu dari tujuh Angkatan Karya (nama Angkatan Bersenjata berasal dari sini) bersama enam “angkatan

Karya” lainnya.

Sejak itu, tentara yang untuk waktu lama hanya kekuatan politik nyata, pada november 1958 telah bertransformasi menjadi kekuatan politik legal. Inilah penjelasannya mengapa kemudian tentara mendapat kursi dalam dewan Perwakilan rakyat Gotong royong (dPrGr) dan Majelis Perwakilan rakyat sementara (MPrs)— di samping sejumlah kursi dalam kabinet— ketika lembaga-lembaga tersebut dibentuk Presiden Sukarno pada awal periode orde Lama.

Dengan demikian, yang sebenarnya terjadi antara tentara (Soeharto) dan Sukarno sejak terjadinya Gestapu hingga tersingkirnya Presiden pertama Republik Indonesia itu, adalah pertarungan politik (*power struggle*) antara dua kekuatan politik.

Dilihat dari perspektif pertarungan politik Sukarno melawan tentara tersebut, maka sebenarnya keputusan Sukarno melegalkan tentara sebagai kekuatan politik lewat dewan Nasional, adalah sebuah keputusan yang mudah dipandang sebagai suatu kebijakan memelihara anak macan. Pada saat resminya tentara menjadi kekuatan politik legal, Sukarno dengan tentara (A.H. Nasution) memang sedang berada dalam satu benteng “pertempuran” menghadapi partai-partai politik.

Dengan dukungan tentara (A.H. Nasution) pada 1959, Indonesia memberlakukan kembali undang-undang dasar 1945 yang memberi kekuasaan amat besar kepada Presiden Sukarno. Sejumlah politisi dan ahli hukum tata negara masa itu menilai kerja sama Nasution-Sukarno

memberlakukan kembali undang-undang dasar 1945 itu sebagai sebuah kudeta konstitusional.

Namun, dalam sejarah Republik Indonesia, pemberlakuan atau pembiaran konstitusi sudah terjadi pada awal Revolusi. Pada november 1945, pemerintahan presidensial—berdasarkan uud 1945—pimpinan Presiden Sukarno ditinggalkan begitu saja untuk digantikan dengan praktik parlementer.

Ironisnya, dengan kekuatan yang diperolehnya dari konstitusi masa-masa Revolusi itu, Sukarno tiba-tiba—pada masa demokrasi terpimpin—menyadari dirinya berhadapan dengan militer sebagai lawan politik. Menghindari posisi sebagai “sandera” militer, Sukarno—yang tidak menguasai satu partai pun—memutuskan merangkul PKI sebagai kekuatan pengimbang terhadap kekuatan tentara. Dasar filosofis hubungan mesra dan kerja sama PKI dengan Presiden Sukarno adalah doktrin Nasakom.

Yang tidak kurang ironis ialah nasib Jenderal A.H. Nasution. Pemimpin Angkatan Darat ini—orang yang berjasa mendukung Sukarno memperoleh kekuasaan besar lewat undang-undang dasar 1945—adalah target utama dan pertama dalam tentara untuk disingkirkan Sukarno. Nasution yang anti-Komunis adalah penghalang utama agenda politik Nasakom Sukarno. Berhasil menyingkirkan Nasution pada 1962, giliran berikutnya ialah Jenderal Ahmad Yani, orang yang secara pribadi dipilih Sukarno menggantikan Nasution. Pimpinan Angkatan Darat boleh berganti, tapi posisi anti-Komunis mereka

tidak berubah. di mata Sukarno, Yani yang ternyata anti-Nasakom, juga harus disingkirkan. dalam proses penyingkiran Yani itulah terjadinya Gestapu pada pagi hari satu Oktober 1965.

Nasution tersingkir, Yani terbunuh, tampillah Soeharto. Ketua baru “Partai tentara” ini sangat diuntungkan oleh kegagalan Gestapu yang menyebabkan hancurnya Partai Komunis Indonesia. Tanpa dukungan PKI, posisi politik Sukarno secara berangsur melemah. dengan kecanggihan politiknya, dalam dua tahun sejak Gestapu pertarungan politik akhirnya dimenangkan Soeharto. Artinya, Sukarno tersingkir.[]

TENTANG PENULIS



Lahir sebagai anak tertua Haji Said dan Hajjah Salmah pada 10 November 1943, di Desa Amparita, Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan. Salim menjalani pendidikan dasarnya di Kota Parepare sebelum akhirnya menyelesaikan sekolah Menengah atas (SMA) di Solo, Jawa Tengah. Selama lima tahun (1963-1968), dia belajar psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI).

Salim beralih mempelajari ilmu sosial pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI karena tidak lagi diizinkan bertahan di sekolah lamanya akibat tingkat absennya yang tinggi imbas kesibukannya sebagai demonstran dan wartawan. dari FISIP UI, Salim Haji Said mendapat gelar

sarjana (Drs.) dalam Ilmu sosiologi pada 1976. Pendidikan tingginya di Jakarta tersendat-sendat dan berlangsung lama karena kegiatannya sebagai aktivis mahasiswa dan kesibukannya sebagai wartawan.

Pada 1979, Salim Haji Said memulai pendidikan pascasarjana di Ohio University, Athens, Ohio Amerika Serikat. Mendapat gelar Master of Arts in International Affairs (MAIA) pada 1980, dia kemudian diterima pada program Doktor di Ohio State University (OSU) dan belajar ilmu politik di bawah bimbingan Prof. Dr. Raymond William Liddle (Bill). Salim Haji Said mendapat gelar Master (M.A.) kedua pada 1983, dan pada Desember 1985, dia memperoleh gelar Ph.d. dalam ilmu politik dengan disertasi mengenai peran politik militer Indonesia pada periode Revolusi Kemerdekaan.

Ketika menyelesaikan pendidikannya pada Jurusan sosiologi FISIP UI, Salim Haji Said menulis tesis mengenai sejarah sosial film Indonesia. Tidak terlalu sulit baginya menulis tesis tersebut karena selama bertahun-tahun dia juga bersibuk sebagai kritikus film majalah *Tempo*. Tesis itu merupakan usaha penulis menemukan jawaban atas keluhan terhadap rendahnya mutu film Indonesia. dari penelitiannya, Salim Haji Said berkesimpulan bahwa film Indonesia yang mendominasi pasar adalah memang buatan para pemilik modal yang memperlakukan film semata sebagai komoditas dagang. Karena kalkulasi pembuatan tontonan tersebut hanya didasarkan pada hitungan Untung rugi materiel, tentu saja mutunya hampir mutlak ditentukan oleh pasar dan para pemilik modal yang

memang tidak terlatih memperhitungkan aspek artistik. Tesis Salim Haji Said terbit sebagai buku dalam bahasa Indonesia dan Inggris (terjemahan).

Menurut pengakuannya sendiri, Salim hijrah ke Pulau Jawa pada usia 16 tahun dengan ambisi menjadi seniman. Semasa remaja di Parepare, salim mulai menulis cerita pendek dan puisi. di Pulau Jawa kemudian dia juga menulis sejumlah telaah karya sastra. Salim yang tertarik seni peran (*acting*) pernah belajar teater, menyutradarai pertunjukan drama, dan ikut tampil sebagai aktor. Di kemudian hari, dia belajar dunia perfilman, menyutradarai dan beberapa kali tampil di depan kamera.

Namun, dia secara berangsur menyadari bakat seninya ternyata tidak sepotensial daya kritisnya. Maka, dia pun beralih menjadi ilmuwan dan memusatkan perhatian pada studi ilmu sosial dan politik. Sebagai ilmuwan sosial politik, Salim Haji Said telah menerbitkan sekitar 10 buku—dalam bahasa Indonesia dan Inggris—yang pada umumnya membicarakan peranan politik militer Indonesia. Beberapa buku mengenai film dan perfilman juga dihasilkannya. Kendati tidak lagi berambisi menjadi seniman, Salim Haji Said tetap saja diangkat menjadi anggota dewan Kesenian Jakarta, bahkan menjadi ketua lembaga kesenian itu selama hampir 10 tahun.

Dalam riwayat hidupnya, Salim Haji Said tercatat sebagai wartawan selama 25 tahun. dari kedudukan sebagai wartawan dan *foreign travelling correspondent* majalah *Tempo* itulah, salim yang juga salah seorang

pendiri majalah mingguan tersebut, berkesempatan berkeliling ke berbagai penjuru dunia dan menulis laporan dan analisis menarik mengenai negara-negara yang dikunjunginya. Salim Haji Said bangga berkesempatan meliput hari-hari terakhir Kamboja sebelum jatuh ke tangan Khmer Merah yang menciptakan *killing field*, dan bulan-bulan terakhir sebelum Amerika Serikat dan rezim kanan di Vietnam Selatan secara sempurna ditendang keluar dari kawasan Indochina. dengan usaha sendiri, Salim Haji Said juga meliput pelaksanaan kesepakatan Camp David yang dicapai bersama Menachim Begin (Israel) dan Anwar Sadat (Mesir). untuk peliputan ini, Salim Haji Said harus terbang ke Kairo dengan biaya pribadi. Menyeberangi Terusan Suez dan melewati Kota Ismailia, dia melanjutkan perjalanan menuju Jerusalem melalui Gurun Sinai dan tanah Genteng Gaza.

Selama sembilan bulan pada awal masa reformasi, Salim Haji Said ditunjuk mewakili kaum cendekiawan pada Badan Pekerja-MPR (BP-MPR). Pada 2006, Guru Besar Ilmu Politik ini dipercayai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) untuk republik Ceko yang berkedudukan di Praha.

Pada tahun-tahun terakhir ini, sebagai Guru Besar Ilmu Politik, Salim Haji Said sibuk mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Pertahanan Indonesia, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), sekolah staf dan Komando TNI (Sesko TNI), dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). dia juga sibuk

melakukan penelitian bagi buku yang sedang dipersiapkannya. “Saya terobsesi menyelesaikan penelitian dan menulis buku mengenai dinamika hubungan Presiden Sukarno dan militer dari masa Revolusi hingga naiknya Soeharto,” katanya.[]

Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) 1965 adalah peristiwa besar yang mengubah sejarah Indonesia. Meski telah lewat setengah abad, Gestapu masih diselimuti kabut misteri dan pertanyaan. Buku ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan literatur sejenis, karena penulisnya menyaksikan langsung situasi di seputar Gestapu. Selain itu, sebagai akademisi, dia menguasai alat analisis dan kesempatan mempelajari dokumen dan literatur langka.

Dalam buku ini, penulis menjawab bermacam kontroversi secara berimbang serta berusaha menjawab pertanyaan terpenting: Siapa dalang sebenarnya dari Gestapu: Sukarno, Soeharto, atau Aduit?

"Bung Salim, menuliskan kesaksiannya tentang peristiwa sejarah yang super-misterius ini, dengan gaya amat menarik dan memukau tentang 3 tokoh sentral di sekitar Peristiwa G-30-S. Kesan saya dari membaca buku ini: Lebih baik menyalahkan seorang Aduit daripada PKI sebagai keseluruhan Partai."

—**Asahan Alham Aduit**

Seorang eksil Indonesia yang menetap di Amsterdam

"Meski setengah abad telah lewat, misteri siapa yang membunuh enam jenderal Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965 belum terungkap seluruhnya. Buku ini menawarkan analisis paling meyakinkan yang pernah saya baca. Berkat pengalaman pribadi selaku wartawan pada masa itu serta ilmuwan politik yang mengikuti dari dekat peran politik militer selama puluhan tahun, penulis menjelaskan dengan jitu dan cermat peran yang kemungkinan besar dimainkan para aktor penting, terutama Sukarno, Aduit, Syam, Latif, dan Soeharto."

—**R. William Liddle**

Profesor Emeritus Ilmu Politik, Ohio State University

"Dalam kaitan memperingati 50 tahun kegagalan Gestapu, saya mengusulkan agar Prof. Dr. Salim Said memperdalam, memperluas, dan memerinci satu bagian dari bukunya yang terdahulu. Buku inilah hasilnya. Salim Said adalah salah satu saksi sejarah yang perlu menuliskan apa yang dialaminya.

Rasa ingin tahunya yang kuat, ketajaman analisisnya, posisinya dan sudut pandang yang tepat, menjamin buku ini amat layak dibaca."

—**Salahuddin Wahid**

Pengasuh Pesantren Tebuireng

Pernah terbit sebagai bagian dari buku *Dari Gestapu ke Reformasi*.